

BUKU PANDUAN MENGAJAR



Jilid I

Manajemen Pertahanan

Dr. Sri Sundari, S.E., M.M
UNIVERSITAS

Buku Panduan Mengajar Manajemen Pertahanan

JILID I

**Penyusun :
Dr. Sri Sundari, SE., M.M**

**UNIVERSITAS PERTAHANAN
Sentul - Bogor, 2018**

**Pemilik Hak Cipta :
Dr. Sri Sundari, SE., M.M**

**mobile : 08121976660
website : srisundari65@yahoo.co.id**

ISBN: 978-602-74999-9-7

Hal 332 halaman

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



**Diterbitkan Oleh
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Bogor, Januari 2018**

Kawasan IPSC Sentul Bogor Indonesia 16730

Website: lib.idu.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Buku mengajar jilid I disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang salah satu materi kuliah Ekonomi Pertahanan , yang saya sajikan berdasarkan dari berbagai sumber. Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar.

Makalah ini memuat tentang *Inventory* Persediaan, Pengeluaran Pemerintah, *Social Welfare*.

Semoga Buku mengajar Jilid I ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Buku mengajar Jilid I ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.

Penyusun,

Dr. Sri Sundari,SE,MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PERECANAAN PERSEDIAAN BARANG (INVENTORY LANNING)	
A. Perencanaan	4
B. Pengendalian.....	7
C. Analisis Pengendalian Intern Persediaan Barang dagang	9
D. Sistem Pencatatan Persediaan.....	12
E. Pengawasan Persediaan.....	17
F. Pengertian dan Unsur - Unsur Pengendalian Intern	21
G. Jenis Persediaan	22
H. Fungsi Persediaan	24
I. Tujuan Manajemen Inventory.....	24
J. Keuntungan dan Kerugian adanya Persediaan.....	25
K. Fokus Pengelolaan Persediaan.....	25
L. Fungsi - Fungsi Persediaan	25

**BAB II. ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH
(COST BENEFIT DAN POLITICAL ECONOMIC)**

A.	Analisis Pengeluaran Pemerintah.....	28
B.	Model Pembangunan tentang perkembangan pengeluaran Pemerintah.....	31
C.	Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan ketimpangan pembangunan.....	40
D.	Pengeluaran pemerintah juga dapat dijadikan teori untuk melihat kebijakan apa yang sedang dirumuskan pemerintah.....	42
E.	<i>Cost Benefit Analysis</i> (Analisis biaya manfaat).....	43
F.	Metode Analisis Biaya dan Manfaat.....	53
G.	Penerapan Analisis Biaya dan Manfaat.....	61
H.	Teori Pilihan Publik.....	77
I.	Teori <i>Rent-Seeking</i>	78

BAB III. PENYEDIAAN BARANG PUBLIK.

A.	Definisi Barang Publik.....	99
B.	Barang Publik Murni.....	103
C.	Barang Publik Tidak Murni.....	104
D.	Argumen untuk Produksi Sektor Publik dan Sektor Swasta.....	104
E.	Ketentuan Optimal Barang Publik.....	110
F.	Teori Barang Publik.....	113

G.	Permintaan Barang Publik.....	129
H.	Kesimpulan.....	147
I.	Studi Kasus.....	149

BAB IV KESEJAHTERAAN SOSIAL (*SOCIAL WELFARE*)

A.	Kebijakan sosial.....	153
B.	Arti Kesejahteraan Sosial.....	156
C.	Indikator Kesejahteraan Sosial.....	158
D.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	162
E.	Orientasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial.....	164
F.	Metode dan Teknik.....	170
G.	Kasus Dan Pembahasan.....	177
H.	Kesimpulan Dan Saran.....	181

DAFTAR PUSTAKA..... 184

Lampiran I..... 191

Lampiran II..... 219

Lampiran III..... 257

Lampiran IV..... 291

Tentang Penulis 332

BAB I

PERENCANAAN PERSEDIAAN BARANG

(INVENTORY PLANNING)

Inventory adalah Persediaan suatu barang atau bahan yang disimpan untuk tujuan tertentu, diantaranya untuk tujuan memenuhi kebutuhan proses produksi atau mungkin untuk dijual lagi “ Bentuk *inventory* cukup beragam, seperti persediaan bahan baku, alat-alat kantor, barang jadi, atau mungkin barang yang sedang dalam proses. Sedangkan Manajemen adalah sistem pengelolaan sehingga sesuatu tersebut bisa benar-benar efektif dan terprogram.

Manajemen *inventory* itu sendiri merupakan asset yang sangat berharga bagi setiap perusahaan dan tidak akan bisa lepas dari berbagai perencanaan dan pengendalian persediaan, hingga akhirnya bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan.

Perencanaan Suatu rencana adalah langkah realistis yang telah ditentukan sebelumnya, rencana memuat rincian kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana harus menetapkan kriteria penilaian dan standart pengukuran serta memberi peluang bagi kreativitas dan fleksibilitas. Dalam merencanakan kita harus memperhitungkan

berbagai kondisi yang terjadi diperusahaan, Perencanaan juga harus saling berhubungan untuk memperbaiki profitabilitas, Perencanaan menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana alternatif untuk mencapai tujuan, termasuk biaya-biaya yang akan terjadi juga harus diukur.

Istilah persediaan (*Inventory*) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber – sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya mungkin internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen lain yang menjadi keluaran produk perusahaan (Handoko, 1997, hal: 333).

Sedangkan menurut Herjanto (1999, hal: 219) Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang.

Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan, dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat dengan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk mengatur tersedianya suatu tingkat persediaan yang optimum, maka diperlukan suatu sistem pengawasan persediaan. Tujuan dari pengawasan persediaan ini adalah (Assauri, 1998): 1) Menjaga jangan sampai kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi; 2) Menjaga agar pembentukan persediaan tidak terlalu besar atau berlebih, sehingga biaya yang timbul oleh persediaan tidak terlalu besar; 3) Menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan meningkatnya biaya pemesanan.

Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, karena persediaan fisik banyak perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar dalam pos aktiva lancar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan, dan mungkin mempunyai "*opportunity cost*" yang lebih besar. Demikian pula,

bila perusahaan tidak mempunyai persediaan yang mencukupi, dapat mengakibatkan biaya – biaya terjadinya kekurangan bahan.

Persediaan adalah segala sesuatu/sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dari sekumpulan produk fisik pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses, dan kemudian barang jadi (Handoko, 1997: hal 333)

Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 40% dari total modal yang diinvestasikan. Manajer operasi diseluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik itu sangatlah penting. Di satu pihak, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya dengan cara menurunkan tingkat persediaan di tangan. Di pihak lain, konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan konsumen.

A. Perencanaan.

Suatu Rencana adalah langkah realistis yang telah ditentukan sebelumnya, rencana memuat rincian kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana harus menetapkan kriteria penilaian dan standart pengukuran serta memberi peluang bagi kreativitas dan fleksibilitas.

Dalam merencanakan kita harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi diperusahaan, Perencanaan juga harus saling berhubungan untuk memperbaiki profitabilitas. Perencanaan menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilaksanakan, kapan dan bagaimana alternatif untuk mencapai tujuan, termasuk biaya-biaya yang akan terjadi juga harus diukur.

Untuk merencanakan besarnya jumlah persediaan, perlu mempertimbangkan biaya-biaya variabel berikut ini :

1. Biaya penyimpanan (*holding costs atau carrying costs*), yaitu terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang disimpan semakin besar. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah:
 - a. Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk penerangan, pendingin ruangan, dan sebagainya).
 - b. Biaya modal (*opportunity cost of capital*), yaitu alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan.
 - c. Biaya Keuangan.
 - d. Biaya perhitungan fisik.
 - e. Biaya asuransi persediaan.

- f. Biaya pajak persediaan.
 - g. Biaya pencurian, pengrusakan, atau perampokan.
 - h. Biaya penanganan persediaan dan sebagainya.
2. Biaya pemesanan atau pembelian (*ordering costs* atau *procurement costs*), biaya-biaya ini meliputi:
- a. Pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi.
 - b. Upah.
 - c. Biaya telepon.
 - d. Pengeluaran surat menyurat.
 - e. Biaya pengepakan dan penimbangan.
 - f. Biaya pemeriksaan (inspeksi) penerimaan.
 - g. Biaya pengiriman ke gudang.
 - h. Biaya utang lancar dan sebagainya.
3. Biaya penyiapan (*manufacturing*) atau *set-up cost*. Hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri oleh perusahaan, perusahaan menghadapi biaya penyimpanan untuk memproduksi komponen tertentu. Biaya-biaya ini terdiri dari:
- a. Biaya mesin-mesin menganggur.
 - b. Biaya persiapan tenaga kerja langsung.
 - c. Biaya penjadwalan.
 - d. Biaya ekspedisi dan sebagainya.
4. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan (*shortage costs*) adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak

mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut :

- a. Kehilangan penjualan.
- b. Kehilangan pelanggan.
- c. Biaya pemesanan khusus
- d. Biaya ekspedisi.
- e. Selisih harga.
- f. Terganggunya operasi.
- g. Tambahan pengeluaran kegiatan manajerial dan sebagainya.

Biaya kekurangan bahan sulit diukur dalam prakteknya, terutama karena kenyataan biaya ini sering merupakan opportunity costs yang sulit diperkirakan secara objektif.

B. Pengendalian

Pengendalian meliputi langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbesar kemungkinan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan dan juga untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi berfungsi sesuai tujuan organisasi.

Pengendalian menurut Dlenn, Welsch Ronald W Hilton Paul (1995, h.5), adalah suatu proses untuk memastikan tindakan yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini

mencakup ; 1) Penetapan sasaran dan standart, 2) Membandingkan hasil dengan sasaran dan standart, 3) Mendorong keberhasilan dan memperbaiki kekurangan.

Ada dua tujuan utama dalam pengendalian internal atas persediaan antara lain mengamankan persediaan dan melaporkan secara tepat dalam laporan keuangan. Pengendalian persediaan harus dimulai segera setelah persediaan diterima. Laporan penerimaan yang sudah diberi nomor sebelumnya harus diisi oleh departemen penerimaan perusahaan untuk menetapkan tanggung-gugat (*account-ability*) awal atas persediaan. Untuk memastikan bahwa persediaan yang diterima sesuai yang dipesan, setiap laporan penerimaan harus cocok dengan pesanan pembelian.

Pengendalian internal juga bersifat :

1. Preventif (pencegahan), pengendalian preventif dirancang untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan pencatatan.
2. Detektif, ditujukan untuk mendeteksi kesalahan atau kekeliruan yang telah terjadi.
3. Meningkatkan efisiensi dengan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk melakukan peningkatan yang mungkin dicapai.

Suatu sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sebuah sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi pengendalian administratif seperti anggaran untuk

perencanaan dan pengendalian operasi, dan pengendalian akuntansi seperti prosedur pengendalian internal mengenai pemisahan tugas orang yang menghitung kas dari tugas orang yang memiliki akses terhadap pencatatan piutang.

C. Analisis Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang

Persediaan adalah salah satu aktiva penting yang dimiliki oleh perusahaan. Karena persediaan merupakan suatu aktiva maka harus dilakukan pengendalian intern yang baik untuk menjaga persediaan tersebut dari hal-hal yang mungkin terjadi. Secara umum, perusahaan dagang dapat di definisikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak perusahaan lain kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk menghasilkan laba optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan, serta mengembangkan usaha ketinggian yang lebih tinggi.

Persediaan merupakan barang dagang yang dibeli kemudian disimpan untuk dijual dalam operasi normal perusahaan sehingga perusahaan senantiasa memberi perhatian yang besar dalam persediaan.

Penjualan akan menurun jika barang tidak tersedia dalam bentuk, jenis, mutu, dan jumlah yang diinginkan pelanggan. Prosedur

pembelian yang tidak efisien atau upaya penjualan yang tidak memadai dapat membebani suatu perusahaan dengan persediaan yang berlebihan dan tidak terjual. Jadi, penting bagi perusahaan untuk mengendalikan persediaan secara cermat untuk membatasi biaya penyimpanan yang terlalu besar.

Pengendalian intern persediaan bertujuan melindungi harta perusahaan yang rentan terhadap kerusakan, maupun pencurian. Kerusakan, pemasukan yang tidak benar, lalu mencatat permintaan, barang yang dikeluarkan tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya. Dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan yang sebenarnya di gudang. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan persediaan secara periodik atas catatan persediaan agar informasi mengenai persediaan lebih dapat dipercaya.

Contoh persoalan pada PT. X adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang importer dan distributor obat-obatan(farmasi). Cukup banyak produk yang distribusikan oleh PT. X, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kehilangan ataupun pencurian stok barang, akibatnya diperlukan pengendalian intern persediaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugas. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan tergantung pada jenis usaha perusahaan masing-masing.

Menurut Stice dan Skousen (2009 : 570), Pada setiap tingkat perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar, persediaan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat memperkirakan jumlah persediaan yang dimilikinya. Persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit karena akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan untuk persediaan tersebut.

Menurut Stice dan Skousen (2009 : 571), “Persediaan adalah istilah yang diberikan untuk aktiva akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau aktiva yang dimasukkan secara langsung atau tidak langsung kedalam barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual”. Kesimpulannya adalah bahwa persediaan merupakan suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu dari sumber daya yang ada dalam suatu proses yang bertujuan untuk mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi baik karena adanya permintaan maupun ada masalah lain.

Jenis-jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha perusahaan tersebut. Berdasarkan bidang usaha perusahaan dapat terbentuk perusahaan industri (*manufacture*), perusahaan dagan, ataupun perusahaan jasa. Untuk perusahaan industri maka jenis persediaan yang dimiliki adalah persediaan bahan baku (*raw material*), barang dalam proses (*work*

in process), persediaan barang jadi (*finished goods*), serta bahan pembantu yang akan digunakan dalam proses produksi. Dan perusahaan dagang maka persediaannya hanya satu yaitu barang dagang.

D. Sistem Pencatatan Persediaan

Metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu perpetual dan metode periodik. Metode perpetual disebut juga metode buku, karena setiap jenis persediaan mempunyai kartu persediaan, sedangkan metode periodik disebut juga metode fisik. Dikatakan demikian karena pada akhir periode dihitung fisik barang untuk mengetahui persediaan akhir yang nantinya akan dibuat jurnal penyesuaian.

Sedangkan dalam melaksanakan penilaian persediaan ada beberapa cara yang dapat dipergunakan, yaitu :

1. ***First in, first out (FIFO)*** atau masuk pertama keluar pertama.

Metode ini menilai persediaan berdasarkan pada asumsi bahwa harga-harga pokok harus dibebankan pada penghasilan sesuai urutan pembeliannya. Sehingga metode ini berkembang dengan asumsi bahwa barang yang paling dulu diterima digudang akan paling dulu dikeluarkan dari gudang. Hal ini terutama untuk barang-barang yang tidak tahan lama dan produk-produk yang modelnya cepat berubah. Contohnya : bahan pangan yang ada tanggal

kadaluwarsanya dan pakaian yang sesuai musimnya. Metode ini dapat digunakan dalam sistim perpetual dan dalam sistem periodik. Cara ini didasarkan atas asumsi bahwa arus harga bahan adalah sama dengan arus penggunaan bahan. Dengan demikian bila sejumlah unit bahan dengan harga beli tertentu sudah habis dipergunakan, maka penggunaan bahan berikutnya harganya akan didasarkan pada harga beli berikutnya. Atas dasar metode ini maka harga atau nilai dari persediaan akhir adalah sesuai dengan harga dan jumlah pada unit pembelian terakhir.

2. ***Last in, firstout (LIFO)*** atau masuk terakhir keluar pertama. adalah suatu metode yang merupakan kebalikan dari metode LIFO. Barang yang dikeluarkan terlebih dahulu akan diberi harga pada harga barang yang diterima terakhir. Metode ini berkembang dari anggapan bahwa barang yang paling akhir diterima digudang, akan lebih dahulu dikeluarkan dari gudang. Pemakaian metode LIFO pada awalnya terbatas untuk situasi yang jarang terjadi, diambil dari unit-unit yang dibeli paling akhir. Contohnya batu bara, yang diterima paling akhir akan berada ditempat teratas sehingga paling mudah diambil untuk dikeluarkan. Jelaslah barang seperti ini tidak mempunyai masa kegunaan terbatas atau mudah rusak. Metode ini dapat dipakai pada sistem perpetual maupun sistim periodik.

3. Biaya Rata-rata (*Moving average*).

adalah metode antara kedua metode diatas. Dalam metode ini, perhitungan harga barang tidak berdasarkan mana barang yang masuk dulu dan mana yang keluar terlebih dahulu, tetapi atas dasar harga rata-rata. Apabila metode biaya rata-rata digunakan dalam sistim persediaan perpetual, biaya rata-rata per unit untuk masing-masing barang dihitung setiap kali pembelian dilakukan. Biaya per unit kemudian digunakan untuk untuk menentukan harga pokok setiap penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan rata-rata baru dihitung.

Dengan metode ini perusahaan beranggapan bahwa harga beli terakhir dipergunakan untuk harga bahan baku yang pertama keluar sehingga masih ada (*stock*) dinilai berdasarkan harga pembelian terdahulu.

Rata-rata tertimbang (*weighted average*). Cara ini didasarkan atas harga rata-rata perunit bahan adalah sama dengan jumlah harga perunit yang dikalikan dengan masing-masing kuantitasnya kemudian dibagi dengan seluruh jumlah unit bahan dalam perusahaan tersebut.

4. Sistem pencatatan persediaan

Dalam perhitungan persediaan maka terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, antara lain:

a. Sistem Perpetual

Dimana setiap ada transaksi baik itu penjualan atau pembelian barang akan langsung dibukukan atau dicatat dalam kartu stock menurut tanggal kejadiannya, atau dengan kata lain semua kenaikan dan penurunan barang dicatat dengan cara sama seperti mencatat kenaikan dan penurunan kas. Akun persediaan barang dagang pada awal periode akuntansi mengindikasikan jumlah stock tanggal tersebut.

Pembelian dicatat dengan mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit kas atau utang usaha. Pada tanggal penjualan, harga pokok barang yang terjual dicatat dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Seperti ilustrasi berikut ini :

Jurnal yang lazim dibuat dalam sistem perpetual,

contoh :

Pada pembelian:

Persediaan barang dagang xxx

Utang usaha xxx

Pada penjualan:

Harga pokok penjualan xxx

Persediaan barang dagang xxx

Piutang Dagang xxx

Pendapatan penjualan xxx

b. Sistem Periodik

Setiap ada penjualan atau pemakaian atau pembelian terhadap persediaan tidak dilakukan pencatatan terhadap buku persediaan, dengan kata lain perusahaan tidak mempunyai kartu stock. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali penjualan dilakukan. Tidak ada jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat harga pokok penjualan. Pada akhir periode akuntansi perhitungan fisik dilakukan untuk menentukan biaya atau harga pokok persediaan dan harga pokok penjualan.

Penilaian persediaan dengan metode LIFO dengan menggunakan sistem perpetual berdasarkan data diatas adalah sebagai berikut:

E. Pengawasan Persediaan

Pengertian pengawasan persediaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan secara efektif dan efisien.

Fungsi pengawasan terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi. Untuk mengevaluasi tugas, para manager hendaknya mrngukur kinerja dibandingkan dengan standar dan harapan yang mereka tetapkan. Standar dapat ditetapkan pada volume produksi dan biaya, volume pejualan , keuntungan, dan berbagai variable yang lain, yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan.

Misalnya standar pada suatu operasi khusus dalam perusahaan, yaitu volume produksi , biaya produksi per unit dan standar tingkat persediaan yang dapat digunakan untuk memonitor produksi. Sehingga nantinya dapat diputuskan atau diambil tindakan untuk menentukan rencana kedepannya.

Tujuan Pengawasan dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Menyediakan persediaan yang dibutuhkan dengan efisien dan dapat menghindari terganggunya kegiatan perusahaan karena keterlambatan datangnya persediaan.
2. Menjamin adanya persediaan yang cukup untuk melayani permintaan pelanggan yang bersifat mendadak.

3. Menyelenggarakan jumlah persediaan yang agak longgar untuk menghadapi kelangkaan penawaran barang dipasar dalam jangka pendek karena faktor-faktor tertentu.
4. Menyelenggarakan penyimpanan bahan yang dapat menekan biaya dan waktu dan menjaga dari kemungkinan kebakaran, pencurian, penyelewengan, dan bentuk kerugian lainnya.
5. Menjaga agar persediaan yang rusak, usang dan kelebihan yang tidak dipakai dapat ditekan serendah mungkin.
6. Menentukan jumlah investasi dan dana yang tepat dalam persediaan dan sesuai kebutuhan untuk operai dan rencana manajemen.

Pengawasan terhadap persediaan dapat digolongkan atas tiga, yaitu:

1. Pengawasan Phisik.

Karena persediaan merupakan benda berwujud, sehingga persediaan harus disimpan pada tempat penyimpanan yang aman dari segala macam gangguan seperti pencurian, pengaruh suhu dan lain-lain. Perusahaan yang baik akan menugaskan orang-orang yang dapat dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap keamanan gudang serta mengasuransikan persediaan dari resiko kebakaran dan sebagainya.

2. Pengawasan Akuntansi.

Pengawasan akuntansi timbul karena adanya pemusatan tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara petugas di bidang pencatatan, penyimpanan dan operasi. Adapun pengawasan akuntansi terhadap persediaan meliputi :

- a. Perlindungan terhadap harta kekayaan perusahaan berupa persediaan, persediaan bahan baku maupun persediaan produksi/barang jadi.
- b. Melakukan pencatatan yang pantas atau wajar untuk penerimaan dan pemakaian atau penjualan persediaan serta menjaga agar arus barang berjalan dengan sebaik-baiknya, yang dimulai dari proses produksi sampai menjadi barang yang siap dipasarkan.

3. Pengawasan jumlah yang dibutuhkan.

Pengawasan ini penting agar perusahaan terhindar dari resiko kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan. Kekurangan persediaan akan menyebabkan terganggunya operasi perusahaan, sedangkan persediaan yang terlalu besar menyebabkan biaya penyimpanan yang terlalu besar pula. Untuk menentukan berapa besar jumlah yang dibutuhkan ada beberapa kebijakan umum yang biasa digunakan.

Adapun jumlah pengawasan yang dibutuhkan sebagai berikut :

a. Menetapkan jumlah maksimum dan minimum.

Dalam keadaan stabil, cara ini baik digunakan karena tingkat penjualan dapat diramalkan dengan tepat.

Pada penetapan ini yang diperhatikan adalah:

- 1) Tingkat penggunaan atau penjualan barang
- 2) Jangka waktu pesanan atau tibanya barang
- 3) Jangka waktu pembuatan barang untuk perusahaan industri.

b. Dengan menggunakan perputaran persediaan.

Perputaran persediaan merupakan angka yang menunjukkan kecepatan penggantian persediaan dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Tingkat perputaran persediaan dapat diketahui dengan cara: *Budgeting Control* yaitu dengan menyusun anggaran produksi dan anggaran penjualan, perusahaan dengan cepat dapat mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada dalam suatu periode berjalan. Hal ini sangat menguntungkan perusahaan, bahwa perusahaan dapat bertindak lebih dini terhadap hal-hal yang timbul dalam persediaan. Ramalan tentang jumlah persediaan memang bisa menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya, namun dengan

ramalan tersebut setidaknya perusahaan dapat mengadakan evaluasi sekaligus pengawasan yang lebih terarah terhadap persediaan.

F. Pengertian dan Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Pengendalian intern harus dilaksanakan seefektif mungkin dalam suatu perusahaan untuk mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kecurangan, dan penyelewengan. Diperusahaan kecil, pengendalian masih dapat dilakukan langsung oleh pihak pimpinan perusahaan. Namun semakin besar perusahaan, dimana ruang gerak dan tugas-tugas yang harus dilakukan semakin kompleks, menyebabkan pimpinan perusahaan tidak mungkin lagi melakukan pengendalian secara langsung, maka dibutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Perhitungan Fisik Persediaan Barang Dagang

1. Staf logistik memberikan laporan fisik kepada kepala logistik dan kepala logistik mengadakan perhitungan atas persediaan, kemudian membuat ke laporan stock opname dan menandatangani lalu menyerahkan kepada komputer logistik pada tanggal yang telah ditentukan.
2. Pada tanggal stock opname, komputer logistik mengeluarkan daftar stock opname rangkap dua dan menyerahkannya kepada kepala bagian keuangan dan

administrasi. Kepala bagian keuangan dan administrasi tim penghitungan fisik melakukan perhitungan, lalu menuliskan hasilnya ke dalam daftar perhitungan fisik persediaan, kemudian menyerahkannya ke komputer logistik satu lembar dan satu lembar lagi di arsipkan menurut tanggal.

3. Komputer logistik membandingkan laporan stock opname kabag K & A (Kepala Keuangan dan Administrasi) yang dibandingkan juga dengan data di file komputer. Selain itu, komputer logistik menghitung selisihnya lalu membuat laporan stock opname dan menyerahkannya kepada pimpinan cabang. Pimpinan cabang menandatangani laporan stock opname dan mengambil tindakan untuk mengenakan biaya kepada Kabag logistik apabila ditemukan pengangguran persediaan

G. Jenis Persediaan

Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk Persediaan dikelompokan :

1. Bahan Baku (*Raw Material Stock*)
2. Bagian Produk (*Purchased Parts*)
3. Bahan-Bahan Pembantu (*Supplies Stock*)
4. Barang Setengah Jadi (*Work in Process*)
5. Barang Jadi (*Finished Good*)

Persediaan Bahan Baku (*Raw Material Stock*) :

Persediaan dari barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Barang ini bisa diperoleh dari sumber-sumber alam, atau dibeli dari *supplier* yang menghasilkan barang tersebut.

Persediaan Bagian Produk (*Purchased Parts*)

Merupakan persediaan barang-barang yang terdiri dari parts yang diterima dari perusahaan lain, yang secara langsung diassembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi.

Persediaan Bahan-Bahan Pembantu (*Supplies Stock*)

Merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu kelancaran produksi, tetapi tidak merupakan bagian dari barang jadi.

Persediaan Barang Setengah Jadi (*Work in Process*)

Merupakan barang-barang yang belum berupa barang jadi, akan tetapi masih diproses lebih lanjut sehingga menjadi barang jadi.

Persediaan Barang Jadi (*Finished Good*)

Merupakan barang-barang yang selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk disalurkan kepada distributor, pengecer, atau langsung dijual ke pelanggan.

H. Fungsi Persediaan

1. Sebagai penyangga proses produksi sehingga proses operasi dapat berjalan terus
2. Menetapkan banyaknya barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada
3. Sebagai pengganggu inflasi
4. Menghindari kekurangan/kelebihan

I. Tujuan Manajemen *Inventory*

1. Mengantisipasi resiko keterlambatan datangnya barang.
2. Mengantisipasi pesanan bahan tidak sesuai dengan apa yang diperlukan
3. Menyediakan bahan-bahan sebagai bentuk antisipasi
4. Sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi
5. Memanfaatkan administrasi secara optimal

J. Keuntungan dan Kerugian adanya Persediaan

Keuntungan Perusahaan dapat :

- 1) Mempengaruhi ekonomi produksi;
- 2) Mempengaruhi pembelian ; dan
- 3) Dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat

Kerugian :

1. Biaya penyimpanan Biaya pemindahan
2. Pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan

K. Fokus Pengelolaan Persediaan

1. Berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu ?
2. Berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan ?
3. Kapan sebaiknya persediaan dipesan ?

L. Fungsi – fungsi Persediaan

Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena berbagai fungsi penting persediaan. Pertama, harus diingat bahwa persediaan adalah sekumpulan produk fisik pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses, dan kemudian barang jadi.

Fungsi – fungsi dari persediaan antara lain:

1. Fungsi “*Decoupling*”

Fungsi penting persediaan adalah memungkinkan operasi - operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan. Persediaan “**decouples**” ini memungkinkan perusahaan dapat memenuhi langganan tanpa terganggu supplier.

Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen – departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para langganan. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut *fluctuation stock*.

2. **Fungsi “*Economic Lot Sizing*”**

Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya – sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Persediaan “*Lot Size*” ini perlu mempertimbangkan penghematan dalam hal pembelian, biaya pengangkutan per unit lebih murah karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar, dibandingkan dengan biaya – biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gedung, investasi, resiko dan sebagainya).

3. **Fungsi Antisipasi**

Sering perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data - data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Disamping itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang selama periode permintaan kembali, sehingga memerlukan kuantitas persediaan ekstra yang sering disebut persediaan pengaman.

BAB II

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH, *COST BENEFIT* DAN *POLITICAL ECONOMIC*

Melakukan analisis dalam perhitungan dan perumusan terhadap ekonomi pertahanan dapat dilakukan dengan melihat pengeluaran pemerintah dan menggunakan *Cost Benefit* Analisa untuk dijadikan pendekatan dalam merekomendasikan kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi (*Political Economi*).

A. Analisis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan dana yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pemerintah, namun dalam hal ini, pengalokasian dan pengeluaran tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk sumber daya yang lain yang dimiliki negara untuk menjalankan kegiatan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah dalam APBN untuk berbagai sektor setiap tahunnya. Semakin besar dan banyak kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah maka akan semakin besar pula pengeluaran pemerintah tersebut.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Perubahan Permintaan akan barang publik
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang public dann perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan
3. Perubahan kualitas barang
4. Perubahan harga faktor-faktor produksi

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini

akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori *Peacock* dan *Wiseman*.

Dengan adanya teori tersebut diatas, maka pengeluaran pemerintah merupakan suatu kebijakan dalam hal menerapkan suatu pembelian atau berupa barang maupun jasa yang ditujukan untuk menjalankan kegiatan pemerintah dan fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pengeluaran pemerintah merupakan cermin kebijakan pemerintah, kita bisa melihat kalau saat ini pengeluaran pemerintah sangat besar dalam hal pembangunan infra struktur dengan demikian terlihat bahwa

kebijakan pemerintah mengutamakan sarana umum sebagai penopang dalam memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Indonesia Timur dan daerah terpencil lainnya sebagai cara pemerintah untuk pemerataan pembangunan.

Pengeluaran pemerintah sendiri dapat digolongkan menjadi:

1. Pengeluaran pemerintah pusat yang dibuat berdasarkan APBN
2. Pengeluaran pemerintah provinsi berdasarkan APBD Provinsi
3. Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan APBD Kabupaten/Kota

Pengeluaran pemerintah merupakan cermin kebijakan pemerintah, kita dapat melihat, kalau saat ini pengeluaran pemerintah sangat besar dalam hal pembangunan infrastruktur, dengan demikian terlihat bahwa kebijakan pemerintah mengutamakan percepatan sarana umum sebagai penopang dalam memacu pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah Indonesia timur dan daerah terpencil lainnya sebagai cara pemerintah untuk pemerataan pembangunan.

B. Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

1. Model Rostow dan Musgrave.

Menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan

ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut sebagai berikut :

Pada tahap awal, perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah, pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan

pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin kompleks, mencakup hubungan atau interaksi actor di dalamnya. Bukan hanya hubungan investor, pemerintah dan actor lainnya. Namun mencakup lingkungan yang ada pada daerah tersebut. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi.

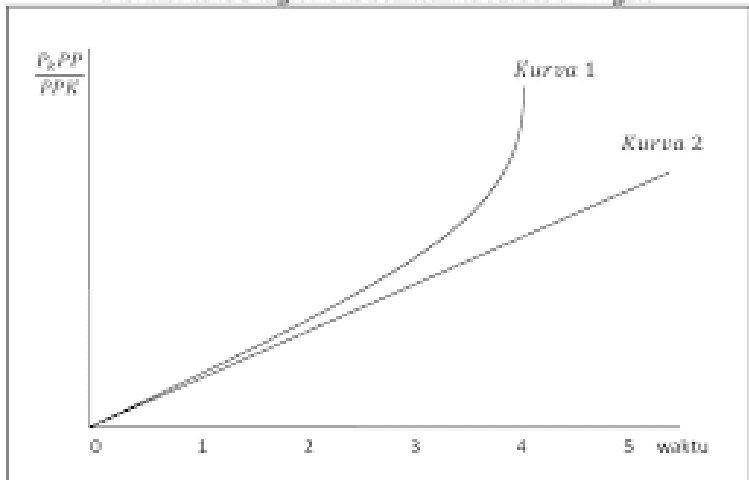
Contoh perkembangan pengeluaran pemerintah model ini adalah pengembangan sebuah kawasan industri di daerah. Sebuah kawasan industri jelas merupakan proyek besar yang tidak dapat dikerjakan hanya oleh pemerintah, namun membutuhkan dukungan swasta guna menarik investor maka pemerintah harus menyakinkan melalui perencanaan

persiapan sektor tersebut seperti menyediakan lahan serta sarana yang memadai dengan ini pemerintah harus banyak mengeluarkan dana. Selanjutnya, ketika pemerintah telah mampu menarik investor maka disilah peran investor atau swasta bersama dengan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri. Kawasan industri yang maju akan berimplementasi positif akan kesejahteraan masyarakat, namun negative juga bagi lingkungan. Sehingga pengembangan tersebut harus selalu dibarengi dengan program yang berorientasi mereduksi dampak industri terhadap lingkungan dan upaya penjagaan alam.

Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Musgrave (1983) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralihdari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas

sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber : Guritno Mangkoesebroto (1993, h.172)

Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman dan Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas

2. Model Wagner

Menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan

industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang).

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lainnya.

3. Model Peacock dan Wiseman .

Adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran

sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Sehingga pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang mulai meningkat, pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan

pemerintah dimana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta. Ini disebut efek konsentrasi (concentration effect). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga.

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan prosentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, prosentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Satu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi

pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional . Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan lainnya.

Menurut Dr. Guritno Mangkoesoe-broto, M.Ec. Perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Perubahan permintaan akan barang publik.
- b. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang public.
- d. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

C. Hubungan pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan pembangunan

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran

pemerintah dapat menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Melakukan analisa dalam penghitungan dan perumusan terhadap manajemen dan ekonomi dapat dilakukan dengan melihat pengeluaran pemerintah dan menggunakan cost Benefit Analisis untuk dijadikan pendekatan dalam merekomendasikan kebijakan - kebijakan yang dirumuskan untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi (Fiscal ekonomi)

Pengeluaran pemerintah merupakan dana yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pemerintah, namun dalam hal ini pengalokasian dan pengeluaran tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk sumber daya yang lain yang dimiliki negara untuk menjalankan kegiatan negara guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

D. Pengeluaran pemerintah juga dapat dijadikan teori untuk melihat kebijakan apa yang sedang dirumuskan pemerintah secara teori pengeluaran pemerintah dikategorikan ke dalam teori Makro dan Mikro sebagai berikut :

1. Teori Makro. Teori ini mengatakan pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk melihat beberapa besar kegiatan pemerintah yang dibiayai dari alokasi dana tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan semakin besarnya dana yang dikeluarkan berarti kegiatan tersebut besar atau banyak. Menurut Boediono, teori ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : pengeluaran untuk barang dan jasa, pengeluaran gaji pegawai dan pengeluaran secara langsung kepada masyarakat bukan dalam bentuk barang atau jasa namun tunai kepada masyarakat.
2. Teori Mikro. Teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara dana dan barang publik. Teori Mikro dapat digunakan dalam analisa apa saja yang mempengaruhi adanya permintaan barang publik serta yang mempengaruhi persediaannya. Anggaran belanja dapat dijadikan alat untuk melihat permintaan barang publik dan jumlah barangnya.

E. *Cost Benefit Analysis* (Analisis biaya manfaat)

Cost Benefit Analysis (CBA) atau analisis biaya dan manfaat, merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk membandingkan biaya sebuah implemantasi program serta manfaat yang bisa didapatkan. CBA sering digunakan guna menganalisis kelayaka proyek proyek pemeintah ddalam mengevaluasi penggunaan sumber smber ekonomi agar dapat digunakan secara efisien namum tetap efektif

Tujuan dari CBA adalah,

1. Menentukan kelayakan proyek sebagai sebuah investasi
2. Menjadi dasar perbandinga suatu proyek termasuk biaya total keuntungan dan pengeluaran
3. Mengetahui besaran keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi
4. Meramalkan perubahan yang akan terjadi

Manfaat dari penerapan CBA pada suatu program/proyek adalah memberikan bantuan yang berarti dalam pengambilan keputusan baik pemerintah maupun sumber dana / investor. Melalui penerapan CBA maka investor bisa yakin untuk menginvestasikan dana pada proyek proyek yang diiginkan, selain itu CBA juga dapat digunakan sebagai alat ddalam mengontrol perkembangan proyek. Manfaat lain dari CBA adalah dalam mengevaluasi suatu proyek yang telah dikerjakan. Tujuannya adalah untuk

mengetahui secara detail tentang total biaya yang telah dikeluarkan, sejauhmana kinerja dari pihak proyek tersebut dan bagaimana manfaat yang dapat dirasakan baik secara *tangible* maupun *intangible*

Analisis biaya manfaat (Cost Benefit Analysis) adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang (Dunn, 2003). Awal perkembangan analisis biaya manfaat (CBA) mulai familiar ketika menjadi klausul dalam Undang – Undang Pengendalian Banjir AS (US Flood Control Act) tahun 1936. CBA berkembang sebagai landasan teoritis ilmu ekonomi kesejahteraan, terutama konsep ilmu kesejahteraan yang mengutamakan efisiensi (Pearce, 2008: 181). CBA saat ini merupakan teknik mapan yang banyak digunakan dalam pemerintahan maupun organisasi internasional. Meskipun tertentu yang mendasari konsep teknik berasal dari Eropa pada 1840-an, penggunaan CBA di lingkungan ekonomi merupakan model implementasi yang tergolong baru. Implementasi CBA mulai berjalan ketika peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah AS yang membuat penggunaan CBA wajib di keadaan tertentu di tahun 1930. Dua konsep dasar yang berasal dari Eropa adalah konsep surplus konsumen dan konsep eksternalitas. Konsep

surplus konsumen diperdebatkan oleh Jules Dupuitin 1844, ketika ia menunjukkan bahwa pengguna jalan dan jembatan di Perancis menikmati keuntungan melebihi jumlah korban yang mereka bayar untuk penggunaan. Pigou mengembangkan secara efektif konsep eksternalitas dengan menyatakan bahwa ada perbedaan antara swasta ekonomi produksi dan produk ekonomi masyarakat (mishan and Quah :243).

Analisis Biaya Manfaat (Benefit Cost) sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek-proyek pemerintah. Pelaksanaan proyek pemerintah umumnya mempunyai tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Pada proyek swasta, biasanya diukur berdasarkan kepada keuntungan yang didapatkan. Pada proyek pemerintah, keuntungan seringkali tidak dapat diukur dengan jelas karena tidak berorientasi kepada keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan kepada manfaat umum yang diperoleh oleh masyarakat. Sebagai contoh proyek pemerintah antara lain : proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pengendalian banjir, pengendalian polusi, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis NPV dan IRR yang umumnya digunakan untuk proyek investasi swasta tidak digunakan untuk menilai kelayakan investasi dari proyek pemerintah.

Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang memenuhi kriteria efisiensi. **Analisis manfaat dan biaya** merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua pihak yang menaruh perhatian pada analisis ini, yaitu pertama, para praktisi teknis dan ekonom yang berperan dalam mengembangkan metode analisis, pengumpulan data, dan membuat analisis serta rekomendasi. Kedua, pemegang kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan dan prosedur untuk melaksanakan keputusan publik.

Menurut Kadariah (1999) tentang *biaya(cost)* dan *manfaat (benefit)* :

1. **Biaya (Cost)**

Biaya dalam proyek digolongkan menjadi empat macam, yaitu :

a. Biaya Persiapan

Biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar

dilaksanakan, misalnya biaya studi kelayakan pada lahan yang akan digunakan untuk proyek termasuk di dalamnya studi kelayakan pada daerah dan masyarakat sekitarnya dan biaya untuk mempersiapkan lahan yang akan digunakan.

b. Biaya Investasi atau Modal

Biaya investasi biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri atau luar negeri. Yang termasuk biaya investasi adalah biaya tanah, biaya pembangunan termasuk instalasi, biaya perabotan, biaya peralatan (modal kerja).

c. Biaya Operasional

Biaya operasional masih dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan sebagainya.

d. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Pada awal umur proyek biaya ini belum muncul tetapi setelah memasuki usia tertentu, biasanya pada bangunan mulai terjadi kerusakan-kerusakan yang memerlukan perbaikan. Tentu saja terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut waktunya tidak menentu, sehingga jenis biaya ini sering dijadikan

satu dengan biaya operasional. Selain itu, masih ada lagi biaya yang mencerminkan true values tetapi sulit dihitung dengan uang, seperti pencemaran udara, air, suara, rusaknya/tidak produktifnya lagi lahan, dan sebagainya.

2. **Manfaat (Benefit).**

Saat ini analisis biaya dan manfaat merupakan alat utama dalam membuat evaluasi program proyek untuk kepentingan public. CBA sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek proyek pemerintah dalam mengevaluasi penggunaan sumber sumber ekonomi agar sumber yang langka dapat digunakan secara efisien. CBA juga dapat diprioritaskan sebagai proses dalam membandingkan biaya untuk mengimplementasikan system informasi dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan sari system informasi tersebut. Dari hasil analisis CBA akan didapat manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan suatu proyek, yaitu manfaat langsung, tidak langsung dan manfaat terkait.

Manfaat yang akan terjadi pada suatu proyek dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. **Manfaat Langsung**

Dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih, keterampilan yang lebih baik dan sebagainya.

Hasil dari pengembangan proyek yang dilakukan oleh pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Ini berarti ada sebuah wujud nyata dari hasil proyek yang dilaksanakan baik output secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai akibat dari penggunaan alat alta produksi yang canggih, baiknya perencanaan dan aktualisasikan keterampilan maupun aspek lainnya.

b. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat yang muncul di luar proyek, namun sebagai dampak adanya proyek. Manfaat ini dapat berupa meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar lokasi proyek. (sulit diukur). Hasil dari pengembangan sebuah proyek juga bisa bersifat tidak langsung dan intergible. Manfaat yang dimaksud bisa saja berwujud peningkatan dari pendapatan masyarakat di sekitar proyek

Saya memberikan contoh bagaimana manfaaat tidak langsung ini bisa dibuktikan suatu pemindahan bandara polonia medan ke bandara kualanamu yang terletak disebuah desa bernama kualanamu dimana jarak dari jalan besar (jalan lintas provinsi) kearah bandara itu sekitar 18 Km dimana pada saat itu kondisinya hanya perkampungan kecil tanpa adanya pembangunan. Akan tetapi dengan adanya pembangunan bandara tersebut maka seluruh sarana

jalan telah diperbaiki tanah-tanah kosong sepanjang jalan berubah menjadi ruko, hotel dan banyak masyarakat yang kemudian membuka usaha di sepanjang jalan menuju bandara. Developer juga berani membangun perumahan di lokasi-lokasi bandara

c. Manfaat Terkait

Keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang, namun benar-benar dapat dirasakan, seperti keamanan dan kenyamanan. Dalam penelitian ini untuk penghitungan hanya didapat dari manfaat langsung dan sifatnya terbatas, karena tingkat kesulitan menilainya secara ekonomi. Manfaat ini tidak tercepat dari pembangunan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. manfaat ini tidak dapat diukur oleh uang namun bersifat lebih luas.

Masih dalam percontohan pembangunan bandara kualanamu, maka bila dilihat manfaat terkait ini saya melihat bahwa dengan adanya bandara Internasional yang bagus dan megah, pemerintah tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan bandara tersebut, agar aset Negara itu tidak rusak dengan adanya pengamanan yang bagus tentu juga mengakibatkan lingkungan sekitar bandara akan aman termasuk jalan menuju bandara

Untuk menganalisis 3 manfaat diberikan tiga contoh pembangunan pelabuhan/dermaga di pulau terluar seperti Papua.

a. Manfaat langsung.

Dari pembangunan tersebut maka diharapkan wujud nyata pembangunan pelabuhan / dermaga secara fisik yang dapat dilihat dan digunakan oleh masyarakat.

b. Manfaat tidak langsung.

Melalui pembangunan pelabuhan/dermaga maka rasio kapal yang datang akan meningkat peat terutama yng memuat bahan kebutuhan pokok rakyat sehingga kesenjangan harga dapat diminimalisir dan perputaran ekonomi dapat berjalan lancar

c. Manfaat terkait.

Dari semua itu maka akan muncul manfaat terkait berupa kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dan dapat berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Contoh Perhitungan Analisis Biaya Manfaat

Rincian Biaya dan Manfaat	Tahun ke-0 (ribuan)	Tahun ke-1 (ribuan)	Tahun ke-2 (ribuan)	Tahun ke-3 (ribuan)
Rincian Biaya				
Biaya Pengembangan	20.000			
Hardware	2.000			
Software	3.000			
Biaya Operasi/Pemeliharaan	-	1.500	2.000	2.5000
Total Biaya (TB)	25.000	1.500	2.000	2.500
Rincian Manfaat				
1. Manfaat Wujud				
• Pengurangan Biaya Operasional		500	700	900
• Peningkatan Penjualan		500	1.000	2.000
• Peningkatan Efisiensi		400	700	1.000
• Pengurangan Biaya Persediaan		200	600	1.100
Total Wujud (TW)		2.000	3.000	5.000
2. Manfaat Tak Wujud				
• Peningkatan nama baik kepada pelanggan		1.500	2.500	3.500
• Peningkatan Moral Karyawan		1.500	2.000	2.500
• Peningkatan kepuasan kerja karyawan		500	1.500	2.500
		2.000	3.000	4.000

<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan pada pelanggan • Peningkatan pengambilan keputusan 		1.000	2.000	3.000
Total Tak Wujud (TTW)		6.500	11.000	15.500
Manfaat (TM) Total		8.500	14.000	20.500
Proceed (Selisih TM dan TB)		7.000	12.000	18.000

F. Metode Analisis Biaya dan Manfaat

Di dalam menganalisa suatu investasi terdapat dua aliran kas, yaitu aliran kas keluar (*cash outflow*) dan aliran kas masuk (*cas inflow*). Untuk aliran kas masuk sering dihubungkan dengan proceed, yaitu keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan depresiasi. Pada dasarnya untuk menganalisis efisiensi suatu proyek langkah-langkah yang harus diambil adalah :

1. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan
2. Menghitung manfaat dan biaya dalam nilai uang
3. Menghitung masing-masing manfaat dan biaya dalam nilai uang sekarang.

Ada beberapa metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek. Guna melakukan Analisis CBA terdapat beberapa alternative yaitu Payback Periode (PP), Net Present Value (NPV) dan Interval Rate of Return (IRR) sebagai berikut :

a. Metode *Payback Period* (PP)

Menurut Bambang Riyanto (2004) Payback Periode merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceeds atau aliran kas netto (net cash flows) Bila dilihat pendapat Abdullah Choliq,dkk (2004) Payback Periode dapat diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi yang dikeluarkan. Dari dua pendapat tersebut saya memperoleh gambaran dan pemahan bahwa payback periode adalah sebuah metode yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali dalam jangka waktu tertentu

Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu satuan hasilnya bukan persentase. Tetapi satuan waktu (bulan, tahun, dan sebagainya). Karena model ini mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali, maka dasar yang dipergunakan adalah aliran kas (*cash flow*).

Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Penilaian Proyek menggunakan PP terkait seberapa cepat investasi dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk dan faktor bunga tidak dimasukkan. Namun demikian, *Payback period* mengandung kelemahan, yaitu:

1. Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau *proceeds* yang diperoleh setelah *payback period* tercapai.
2. Metode *payback period* mengabaikan nilai waktu uang.
3. Metode *payback period* tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat *mutually exclusive*

Perhitungan analisis *payback* periode adalah sebagai berikut (berdasarkan tabel di atas) :

Total Biaya Pengadaan Sistem pada tahun 0	:	Rp.25.000.000
Proceed pada Tahun I	:	<u>Rp. 7.000.000 (-)</u>
Sisa Biaya Sistem pada Tahun I	:	Rp.18.000.000
Proceed pada Tahun II	:	<u>Rp.12.000.000 (-)</u>

Sisa Biaya Sistem pada Tahun II : Rp. 6.000.000

$$\text{Sisa} = \frac{6.000.000}{18.000.000} \times 1 \text{ tahun} = 0,35 \text{ tahun}$$

Contoh lain :

- 1) perhitungan PP : Pengadaan system informasi manajemen pada tahun pertama adalah Rp.20.000.000 dan Cash flow tiap tahun sama, yaitu Rp.6.000.000 maka PP adalah: $20.000.000 : 6.000.000 = 3.33$ tahun maka di dapakan hasil pay back periode dari investasi selama 3 tahun 3 bulan.
- 2) Contohnya: PT. Makmur investasi 45 Milyar jumlah proceed pertahun adalah 22,500 Milyar maka payback periode nya adalah

Payback periode : $\frac{\text{Investment cost}}{\text{Annual Cash Flow}} \times 12 \text{ months}$

PP : $\frac{45.000}{22.500} = 2$ Milyar

Dengan demikian payback periode dari investasi itu adalah 2 Milyar

b. Metode *Net Present Value* (NPV)

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan cash bersih di masa yang akan datang. Nilai ini memperhatikan nilai waktu dan uang. Berbeda dengan PP karena tidak memperhatikan nilai, waktu dan uang. Dan metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang inventasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di massa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Pada perhitungan ini tingkat bunga yang dipakai adalah 14% (diambil dari rata-rata tingkat bunga bank). NPV merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan *social opportunity cost of capital* sebagai diskon faktor.

Perhitungan metode NPV sebagai berikut (berdasarkan table diatas) :

$$NPV = - \text{nilai proyek} + \frac{\text{proceed1}}{(1 + 14\%)^1} + \frac{\text{proceed2}}{(1 + 14\%)^2} + \frac{\text{proceed3}}{(1 + 14\%)^3}$$

Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15 % pertahun maka :

$$NPV = - 25.000.000 + \frac{7.000.000}{(1+0.15)^1} + \frac{12.000.000}{(1+0.15)^2} + \frac{18.000.000}{(1+0.15)^3}$$

$$NPV = \mathbf{1.995.972,69}$$

Keterangan :

I = *diskon factor*

n = tahun (waktu ekonomis)

Dari Hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ke 3 apabila sistem ini diterapkan adalah : Rp. 1.995.972,69, atau NPV > dari **0**, maka proyek tersebut **layak dilaksanakan**.

Keterangan :

Nilai proyek = Rp.20.000.000

Proceed I = Rp.6.000.000, Diskon 10%

Proceed II = Rp.9.000.000

Proceed III = Rp.12.000.000

c. **Metode Tingkat Pengembalian Internal / *Internal Rate of Return (IRR)*.**

Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang di diskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya :

$i_1 = 15 \%$, maka $NPV_1 = 1.995.972,69$ (nilai NPV positif)

$i_2 = 20 \%$, maka

$$NPV_2 = - 25.000.000 + \frac{7.000.000}{(1+0.2)^1} + \frac{12.000.000}{(1+0.2)^2} + \frac{18.000.000}{(1+0.2)^3}$$

$NPV_2 = - 416.666,67$ (nilai NPV negatif)

$$IRR = 15 + \frac{(20\% - 15\%) \cdot 1.995.972,69}{NPV_1 - NPV_2}$$

$$IRR = 15\% + \frac{(5\%) \cdot 1.995.972,69}{1.995.972,69 - (-416.666,67)}$$

$$IRR = 15\% + \frac{9.979.863,45\%}{2.412.639,36}$$

$$IRR = 15\% + 4,14\% = \underline{\underline{19,14\%}}$$

$$IRR = 19,14\%$$

artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,14 % per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian (rate of return) yang diinginkan 15 % per tahun, maka $IRR > 15 \%$, dengan kata lain proyek dapat diterima.

Contoh lainnya :

Diskonto I = 10%

Diskonto II = 15%

NPV 1 = 1.908.339,58 (NPV positif)

$$NPV 2 = -20.000.000 + \frac{6.000.000}{(1 + 0,15)^1} + \frac{9.000.000}{(1 + 0,15)^2} + \frac{12.000.000}{(1 + 0,15)^3}$$

$$= - 367.170,92$$

$$IRR = 10\% + \frac{(15\% - 10\%) \cdot 1.908.339,58}{1.908.339,58 - (- 367.170,92)}$$

$$= 10\% + 4,89\% = 14,89\%$$

Proyek dapat di terima karena $IRR > 10\%$ atau 14,8%

G. Penerapan Analisis Biaya dan Manfaat

a. Perusahaan Swasta

Pada analisis perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat umumnya diukur dengan cara mengalikan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang diperhitungkan adalah semua biaya yang langsung digunakan dalam proyek tersebut berdasarkan harga pembeliannya.

b. Pemerintah

Proyek-proyek pemerintah pada umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber- sumber ekonomi yang diukur dengan harga pasar oleh karena harga pasar pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Pada keadaan dimana tidak terdapat persaingan sempurna maka harga-harga pasar tidak menunjukkan nilai sumber-sumber ekonomi yang sesungguhnya. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menyesuaikan harga sumber ekonomi dengan menggunakan harga bayangan (*shadow prices*).

Misalnya pemerintah membangun suatu dam di daerah Cilacap. Apabila tenaga kerja yang dipakai untuk membangun dam tersebut adalah tenaga kerja yang menganggur, maka harga buruh atau upah yang dihitung bukanlah upah yang diberikan kepada para buruh, akan tetapi upah bayangan yang besarnya adalah nol. Jadi dalam menghitung manfaat dan biaya kita hanya menghitung manfaat dan biaya yang mencerminkan nilai *oportunitas* hasil proyek atau biaya proyek. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terdapatnya harga-harga sebagaimana yang terjadi pada pasar persaingan sempurna adalah adanya unsur monopoli, adanya pajak, adanya pengangguran, dan adanya surplus konsumen. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada proyek-proyek pemerintah, semua input yang digunakan haruslah diukur dari biaya marginal produksinya (atau harga yang terjadi pada pasar persaingan sempurna).

c. Pengukuran Kebijakan Analisis Biaya dan Manfaat

Pengukuran secara tepat dari keuntungan seringkali tidaklah mungkin. Kesukaran-kesukaran dasar akan muncul dengan barang-barang umum yang tak dapat

dijual pada masyarakat, dan tiap penilaian harus didasarkan atas taksiran mengenai kesukaan orang-orang dalam masyarakat sebagai satu keseluruhan untuk barang-barang tersebut. Sebagai akibat, maka dengan barang-barang yang benar-benar sifatnya umum, cara analisa biaya keuntungan akan menurun tarafnya menjadi perbandingan cara-cara alternatif saja dan tak dapat memberi jawaban pada pertanyaan apakah suatu proyek atau rencana tertentu dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan lebih langsung pun, maka penilaian dari hasil-hasil itu seringkali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius. Hasilnya seringkali tidak dijual dan diperlukan suatu penilaian yang konstruktif. Suatu contoh adalah rekreasi; bagaimana harus menilai suatu hari yang dipergunakan seseorang untuk memancing di danau yang diciptakan oleh bendungan, atau berpiknik dalam hutan margasatwa?. Percobaan-percobaan telah dibuat untuk memberikan penilaian-penilaian itu, namun sifatnya adalah sewenang-wenang. Bahkan penentuan dari jumlah yang patut dari hasil fisiknya pendapat bersifat sangat ruwet. Jumlah para pemakai dari suatu proyek

rekreasi dapat dihitung bila proyek itu sudah berjalan, dan peramalan dimuka mungkin dapat dibuat. Akan tetapi bila dari para pemakai tidak ditagih pembayaran untuk penggunaan dari jasa-jasa tersebut, maka jumlah orang yang menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara cuma-cuma mungkin akan jauh lebih besar dari pada jumlah pemakai seandainya dipungut bayaran. Penggunaan jumlah yang pertama akan membesar-besarkan keuntungan-keuntungan dari proyek tersebut.

Persoalan penilaian yang lain akan timbul karena tidak adanya pasaran hasil-hasil yang diakibatkan oleh rencana itu. Bila pemerintah memungut bayaran untuk jasa tersebut dan harganya didasarkan atas dasar monopoli, maka hasil total, dan karenanya juga ukuran keuntungan, akan berlainan dari jumlah yang diperoleh bila ada keadaan persaingan bebas. Atau, bila keuntungan-keuntungan itu diukur secara tidak langsung berdasarkan hasil penjualan produk yang dihasilkan dengan bantuan kegiatan pemerintah (hasil pertanian dari tanah yang mendapat pengairan), maka penjualan-penjualan itu mungkin tak akan dilakukan dalam pasaran yang bersifat persaingan murni, atau, dalam soal hasil pertanian, mungkin akan dilakukan

dengan harga-harga yang mungkin dibuat tinggi oleh rencana bantuan dari pemerintah. Atau sebaliknya, terutama dengan proyek-proyek besar di negara-negara yang sedang berkembang, proyek pemerintah itu mempunyai pengaruh yang demikian besar terhadap susunan harga seluruhnya, sehingga penilaian berdasarkan harga-harga lama atau baru memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai keuntungan-keuntungan yang sebenarnya.

d. Tingkat Diskonto atau Bunga

Penentuan tingkat diskonto atau tingkat bunga merupakan hal yang sangat penting oleh karena hasil suatu proyek dapat berbeda-beda tergantung dari tingkat bunga yang dipilih. Misalnya pemerintah harus memilih salah satu dari 2 proyek, yaitu proyek I yang memberi hasil bersih sebesar Rp 90 juta yang diterima seketika, atau proyek II yang memberi hasil bersih sebesar Rp 100 juta dua tahun setelah proyek tersebut selesai. Tabel dibawah ini memberikan nilai bersih sekarang (NBS) untuk kedua proyek tersebut.

Nilai Bersih Sekarang (NBS) Proyek I dan II

Tingkat Bunga	NBS Proyek I	NBS Proyek II
0	$90 = 90 / (1+0)^0$	$100 / (1+0)^2 = 100$
5	$90 = 90 / (1+0,5)^0$	$100 / (1+0,5)^2 = 90,9$
10	$90 = 90 / (1+0,10)^0$	$100 / (1+0,5)^2 = 82,6$

Sumber : Mangkoesebroto (1998)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai bersih sekarang (NBS) dari proyek I sebesar 90 pada tingkat bunga manapun yang dipilih oleh karena hasil dari proyek tersebut, diterima seketika. Sebaliknya nilai bersih sekarang dari proyek II berbeda-beda tergantung dari tingkat bunga yang dipilih.

Apabila tingkat bunga yang dipilih adalah nol dan 5 persen, maka pemerintah akan memilih proyek II karena proyek tersebut memberikan nilai bersih sekarang yang lebih besar daripada proyek I. Sebaliknya apabila tingkat bunga yang dipilih adalah 10 persen maka proyek I yang akan dipilih karena memberikan nilai bersih sekarang yang lebih besar dari pada proyek II. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat bunga yang dipilih dalam

melakukan evaluasi proyek, akan semakin rendah nilai bersih sekarang dari suatu proyek yang menghasilkan jumlah tertentu pada suatu waktu yang akan datang. Ini berarti dari segi efisiensi akan semakin sedikit proyek yang dilaksanakan oleh karena proyek- proyek yang memberikan nilai bersih sekarang yang positif dengan semakin tingginya tingkat bunga akan memberikan nilai bersih yang negatif. Jadi tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kebutuhan akan pengeluaran pemerintah untuk melaksanakan program-programnya.

Karena sulitnya menentukan tingkat diskonto yang tepat sedangkan penentuan tingkat diskonto adalah hal yang sangat penting dalam evaluasi suatu proyek maka para ahli ekonomi menggunakan tingkat diskonto sosial (social discount rate) yang mereka perkirakan dengan mempertimbangkan risiko pajak dan tingkat inflasi. Suatu contoh perhitungan tingkat diskonto sosial, misalnya dalam suatu proyek yang mempunyai derajat risiko yang kecil sekali sedangkan tingkat diskonto pada pinjaman pemerintah (yang tidak memperhitungkan risiko) sebesar 10 persen serta pajak perusahaan sebesar 50 persen. Dalam hal ini biaya oportunitas dari uang yang dipinjamkan sebesar 5 persen karena sektor swasta yang melakukan suatu investasi dan

menghendaki tingkat hasil bersih sebesar 5 persen harus memperoleh manfaat paling sedikit sebesar 10 persen, sebab dari manfaat sebesar 10 persen tersebut sebagian, yaitu sebesar 50 persen harus dibayar kepada pemerintah sebagai pajak.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam suatu evaluasi proyek adalah tingkat inflasi. Faktor ini merupakan faktor yang penting untuk diperhitungkan terutama pada perekonomian yang selalu mengalami inflasi. Tingkat diskonto yang diumumkan atau yang dikenakan pada badan-badan perbankan adalah tingkat diskonto nominal. Suatu analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan menggunakan tingkat harga konstan sehingga tingkat diskonto yang digunakan haruslah tingkat diskonto nyata (real discount rate), yaitu tingkat diskonto nominal dikurangi tingkat inflasi. Suatu contoh perhitungan besarnya tingkat diskonto social ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Penghitungan Tingkat Diskonto Sosial

Tingkat Diskonto Umum
6.7 persen
Risiko
+2.0 persen

Pajak penghasilan

+4.3 persen

13.0 persen

Tabungan (tambahan karena adanya proyek) - 1.5

Tingkat Inflasi - 3.5

Tingkat Diskonto Sosial 8.0 persen

Sumber : Mangkoesebroto 1998

Dari tabel tersebut kita lihat bahwa dengan menambahkan faktor-faktor risiko dan pajak penghasilan serta memperhitungkan besarnya tabungan dan tingkat inflasi kita dapat menghitung besarnya tingkat diskonto sosial (*social discount rate*) yang harus digunakan dalam evaluasi proyek-proyek pemerintah.

a. Keuntungan dan Kelemahan

Cost Benefit Analysis (CBA)

Melihat pada proses implementasinya, Analisis biaya manfaat (CBA) memiliki keuntungan dalam penentuan program pemerintah, antara lain sebagai berikut :

1. Penggunaan sumber - sumber ekonomi secara efisien. Jika efisiensi terjamin, pencapaian kesejahteraan masyarakat dari kebijakan publik

yang di implementasikan lebih maksimal (Mangkoesoebroto,2001: 165-166).

2. Analisis biaya manfaat dalam penghitungan biaya maupun manfaat diukur dengan mata uang sebagai unit nilai, sehingga memudahkan efisiensi (Dunn, 2003:448).
3. Sangat kompatibel dengan penghitungan biaya manfaat kebijakan / proyek dalam skala besar atau makro khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan (Sjafrizal, 2008 :170).

Sedangkan kelemahan CBA antara lain sebagai berikut :

1. Sangat kompatibel dengan penghitungan biaya manfaat kebijakan / proyek dalam skala besar atau makro khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan (Sjafrizal, 2008 :170).
2. Pemilihan kebijakan / proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh proses penghitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan beberapa proyek atau

kebijakan tidak dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif (Mangkoesobroto, 2001: 166).

3. Analisis ini tidak memiliki fleksibilitas tinggi, karena semua penghitungan dilakukan secara kuantitatif. Hal ini menimbulkan interpretasi jika analisis ini dilaksanakan terlalu jauh, pemerintah tidak lagi dilaksanakan oleh wakil wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, melainkan seakan akan dilaksanakan oleh robot komputer (Mangkoeseobroto, 2001: 167).

Analisis manfaat dan biaya dalam kenyataannya lebih sudah dari pada teori yang sudah dibahas, karena baik manfaat maupun biaya bisa berubah sepanjang waktu. Hal ini dapat terjadi pada proyek investasi yang nilai ekonomisnya berlangsung lama dan kebanyakan mempunyai aspek resiko. Disamping itu meskipun biaya modal hanya terjadi pada permulaan investasi tetapi biaya operasi yang jumlahnya cukup besar kemungkinan harus dikeluarkan dalam tahun-tahun mendatang. Implikasi ini adalah perlunya ketelitian dalam menentukan faktor diskonto dan memperkirakan resiko yang tidak dikehendaki yang mungkin terjadi.

b. POLITIK EKONOMI

Ekonomi dan politik adalah beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari komunikasi media, komunikasi massa, dan komunikasi politik itu sendiri. Komunikasi-komunikasi dalam dunia politik misalnya, bergantung pada teori-teori politik untuk memahami bagaimana cara menyusun pesan yang tepat untuk menghadapi kompetitor, menyampaikan informasi pada masyarakat agar tidak resisten dan lain sebagainya. Di Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu teori politik ekonomi sangat penting untuk dipelajari terutama bagi mereka yang harus berurusan dengan masalah komunikasi-komunikasi di bidang politik.

Politik ekonomi merupakan tindakan atau cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya bahwa perlu dipahami setiap Negara dalam menerapkan politik ekonominya tentu tidak sama antara satu Negara dengan Negara lainnya. Bahwa dalam pelaksanaan politik ekonomi ditopang juga oleh politik moneter, dimana pemerintah mengeluarkan

kebijakan dalam mengatur keuangan dan perkreditan Negara. Politik fiskal, bagaimana Negara mengatur keuangan dan pajak. Ada juga politik produksi yang merupakan kebijakan Negara berkenaan dengan peningkatan produksidalam negeri dengan menggunakan sumber-sumber alam denga efisien begitu juga dengan politik perdagangan luar negeri, politik harga dan upah, politik sosial dan ketenagakerjaan yang merupakan sarana penopang politik ekonomi.

c. Sejarah Politik Ekonomi

Dalam perjalanan sejarah ilmu ekonomi dan juga politik, dalam menganalisis fenomena ekonomi ditemukan bahwa unsur politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis ekonomi. Meski ekonomi dan politk memiliki sudut pandang analisis masing-masing yang kadang berlainan, akan tetapi dua sudut pandang tersebut tetap dapat disandingkan dengan pertimbangan perhatian yang sama dalam analisis isu-isu : mengkoordinasi dan mengorgnisasikan kegiatan manusia, pengelolaan konflik, pengalokasian beban dan keuntungan, serta

menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.

Menurut Clark (1998:21-23) dalam Erani (2013), kemunculan teori ekonomi berawal dari periode antara abad 14 dan 16, yang juga dikenal sebagai masa transformasi besar di Eropa Barat sebagai implikasi dari sistem perdagangan baru yang secara perlahan menyisihkan sistem ekonomi feodal pada abad pertengahan. Pada abad 18 mulai muncul pencerahan yang marak di Prancis (dikenal dengan masa Renaissance) dengan para pelopor seperti Voltaire, Diderot, D'Alembert, dan Condillac yang menyatakan keberadaan otonomi individu dan eksplanasi kapasitas manusia.

Ekonomi politik atau politik ekonomi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh penulis Antoyne de Montchretien (1575-1621) yang berasal dari Prancis dalam bukunya yang berjudul *Treatise on Political Economy*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, Sir James Steuart (1712-1789) mengawali pemakaian istilah ini lewat bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Principles of Political Economy*. Perdebatan antara

para ahli memunculkan banyak sekali aliran dalam tradisi pemikiran ekonomi politik.

Secara garis besar, aliran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Aliran ekonomi politik konservatif yang dipelopori oleh Edmund Burke.
2. Aliran ekonomi politik klasik yang didukung oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean Baptiste Say
3. Aliran ekonomi politik radikal yang disebarkan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan Karl Marx.

Teori politik ekonomi atau ekonomi politik sangat tepat digunakan untuk memahami realitas kebijakan-kebijakan ekonomi dan hubungannya dengan kedudukan politik atau hubungannya dengan negara. Oleh karena itu, para komunikator politik juga harus memahami bagaimana mengatasi serangan dari lawan yang didasarkan atas kritik terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh dirinya atau pemerintah yang ia bela. Walaupun kamu bukan komunikator politik, memahami teori politik ekonomi juga dapat membantumu menebak arah kebijakan

ekonomi yang dibuat pemerintah atau kelompok tertentu dengan melihat bagaimana mereka mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Politik Ekonomi merupakan sebuah terminology bahwa aktivitas ekonomi terjadi karena ada kaitan yang erat terhadap makro politik secara luas. Politik ekonomi sendiri beraktualisasikan menjadi kebijakan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam bidang ekonomi sebagai langkah kongkrit memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat. Beberapa kebijakan ekonomi, yaitu;

- 1) Kebijakan Fiskal, merupakan kebijakan yang dilakukan guna mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah
- 2) Kebijakan moneter, merupakan proses dalam mengelola persediaan uang Negara guna mencapai tujuan tertentu, seperti menahan laju inflasi serta memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian

- 3) Kebijakan segi Penawaran, merupakan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah dengan mutu yang lebih baik

Jenis-jenis Teori Politik Ekonomi

Berikut ini adalah beberapa teori politik ekonomi, diantaranya sebagai berikut :

H. Teori Pilihan Publik

Pendekatan baru dalam ekonomi politik yang menilai bahwa negara/pemerintah, politikus atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan memicu lahirnya pendekatan *public choice*. Masyarakat pemilih dianggap sebagai pembeli barang-barang publik sekaligus sebagai aktor yang akan memilih calon legislatif dan eksekutif. Sementara itu pemerintah dianggap sebagai penyedia barang publik. Pemerintah yang telah dipilih harus menyediakan barang publik setelah menang sebagai wujud adanya ekonomi politik berupa demokrasi.

Menurut Knight (2014;190), aktor-aktor yang ada di dalam suatu negara memiliki kepentingan sendiri. Kepentingan tersebut termasuk di dalam proses tawar-menawar. Kepentingan langsung memicu aktor mengabaikan pelayanan eksternal, sementara

kepentingan tidak langsung mengakibatkan cacat dalam distribusi dari kelembagaan formal dalam menyusun kebijakan jangka panjang.

I. Teori *Rent-Seeking*

Teori *Rent-Seeking* di perkenalkan oleh Anne O. Krueger pada tahun 1974. Krueger pada waktu itu sedang membahas tentang praktik-praktik kelompok tertentu untuk memperoleh kuota impor. Kuota impor dipahami sebagai perbedaan perbedaan antara harga batas dan harga lokal. Dia menganalisis perilaku pemerintah sebagai penentu strategi ekonomi yang menarik pihak-pihak tertentu untuk menjalin hubungan dengan pemerintah demi mendapatkan keuntungan.

Pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pemerintah tersebut lazim disebut sebagai pemburu rente (*rent-seekers*). *Rent-seekers* pada dasarnya mencari peluang untuk menjadi penerima rente dari pemerintah dengan melakukan hal-hal tertentu seperti menyerahkan sumber daya, menawarkan proteksi, atau memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu yang diaturnya. Semakin besar tindakan pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente (Little, 2002;128).

Perilaku mencari rente dianggap sebagai upaya pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau memodifikasi kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente, baik dengan melakukan lobi-lobi tertentu atau dengan tindakan lainnya. Lobi-lobi tersebut lebih cenderung membuat pemerintah lama dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Hal ini berdampak pada terlambatnya kebijakan untuk menyelesaikan masalah dengan fakta yang sudah terjadi dan terus berkembang di lapangan. Rente dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mendapatkan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi, dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis.

LATIHAN SOAL

1. Analisis Implementasi Pengeluaran Pemerintah, Cost Benefit Dan Politik Ekonomi Tentang Pembangunan Jembatan Layang
2. Analisis Implementasi Pengeluaran Pemerintah, Cost Benefit Dan Politik Ekonomi Tentang Pembangunan Lrt

FORMAT PENULISAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
 - b. Tujuan
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
 - a. Pendahuluan
 - b. Faktor yang mempengaruhi
 - c. Hambatan yang dihadapi
 - d. Pembahasan
 - e. Kesimpulan dan Saran
 - f. Dasar Referensi

B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

C. HAMBATAN YANG DIHADAPI

D. PEMBAHASAN

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KETENTUAN TUGAS :

- I. Semua tugas di kertas A4 dengan 1,5 spasi, font 12 Arial
- II. Setiap halaman di beri nomor kecuali halaman cover
- III. Semua tugas di beri sumber kutipan dan dilampirkan daftar pustaka
- IV. Jumlah halaman minimal 15 hal
- V. Tugas dikumpulkan tepat waktu

ESSAY :

1. Sebutkan pengertian pengeluaran pemerintah, cost benefit dan politik ekonomi ?
2. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah salah satunya model Rostow dan Musgrave, sebutkan pertahapnya mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir ?
3. Bagaimana pengertian dan kelemahan model Wagner yang anda ketahui ?
4. Bagaimana dengan model Peacock dan Wiseman ?
5. Bagaimana pengertian tentang analisis manfaat dan biaya, dalam upaya membantu pemerintah dan swasta ?
6. Sebutkan biaya (cost) dalam proyek digolongkan menjadi empat macam ?
7. Manfaat (benefit) yang akan terjadi pada suatu proyek dapat dibagi menjadi tiga sebutkan secara jelas ?

8. Ada beberapa metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek dengan menggunakan metode *Payback Period* (PP) , metode *Net Present Value* (NPV) dan metode tingkat pengembalian internal / internal rate of return (IRR), sebutkan dan berikan contoh?
9. Bagaimana penerapan Analisis Biaya dan Manfaat dilihat dari Perusahaan Swasta dan Pemerintah?
10. Bagaimana sejarah politik ekonomi dan jenis-jenis teori politik ekonomi uraikan secara lengkap ?

JAWABAN

1. Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis biaya manfaat (Cost Benefit Analysis) adalah pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang (Dunn, 2003).

Politik ekonomi adalah beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari komunikasi media, komunikasi massa, dan komunikasi politik itu sendiri. Komunikasi-komunikasi dalam dunia politik misalnya, bergantung pada teori-teori politik untuk memahami bagaimana cara menyusun pesan yang tepat untuk menghadapi kompetitor, menyampaikan informasi pada masyarakat agar tidak resisten dan lain sebagainya.

2. Model Rostow dan Musgrave.

Menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut sebagai berikut :

Pada tahap awal, perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah, pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pada tahap lanjut ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi dan mengurangi dampak negatif dari polusi.

3. Model Wagner.

Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang).

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lainnya.

4. Model Peacock dan Wiseman .

Adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang

semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

3. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Dengan analisis ini pemerintah menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi yang efisien dengan memilih program-program yang memenuhi kriteria efisiensi.

Analisis manfaat dan biaya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Ada dua pihak yang menaruh perhatian pada analisis ini, yaitu pertama, para praktisi teknis dan ekonom yang berperan dalam mengembangkan metode analisis, pengumpulan data, dan membuat analisis serta rekomendasi. Kedua, pemegang kekuasaan eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan dan prosedur untuk melaksanakan keputusan publik.

4. Biaya dalam proyek digolongkan menjadi empat macam, yaitu :

a. Biaya Persiapan

Biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan, misalnya biaya studi kelayakan pada lahan yang akan digunakan untuk proyek termasuk di dalamnya studi kelayakan pada daerah dan masyarakat sekitarnya dan biaya untuk mempersiapkan lahan yang akan digunakan.

b. Biaya Investasi atau Modal

Biaya investasi biasanya didapat dari pinjaman suatu badan atau lembaga keuangan baik dari dalam negeri atau luar negeri. Yang termasuk biaya investasi adalah biaya tanah, biaya pembangunan termasuk instalasi, biaya perabotan, biaya peralatan (modal kerja).

c. Biaya Operasional

Biaya operasional masih dapat dibagi lagi menjadi biaya gaji untuk karyawan, biaya listrik, air dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan, dan sebagainya.

d. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Pada awal umur proyek biaya ini belum muncul tetapi setelah memasuki usia tertentu, biasanya pada bangunan mulai terjadi kerusakan- kerusakan yang memerlukan perbaikan. Tentu saja terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut waktunya tidak menentu, sehingga jenis biaya ini sering dijadikan satu dengan biaya operasional. Selain itu, masih ada lagi biaya yang mencerminkan true values tetapi sulit dihitung dengan uang, seperti pencemaran udara, air, suara, rusaknya/tidak produktifnya lagi lahan, dan sebagainya.

5. Manfaat (Benefit)

Manfaat yang akan terjadi pada suatu proyek dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Manfaat Langsung.

Dapat berupa peningkatan output secara kualitatif dan kuantitatif akibat penggunaan alat-alat produksi yang lebih canggih, keterampilan yang lebih baik dan sebagainya.

- b. **Manfaat Tidak Langsung**
Manfaat yang muncul di luar proyek, namun sebagai dampak adanya proyek. Manfaat ini dapat berupa meningkatnya pendapatan masyarakat disekitar lokasi proyek. (sulit diukur).

 - c. **Manfaat Terkait**
Keuntungan-keuntungan yang sulit dinyatakan dengan sejumlah uang, namun benar-benar dapat dirasakan, seperti keamanan dan kenyamanan. Dalam penelitian ini untuk penghitungan hanya didapat dari manfaat langsung dan sifatnya terbatas, karena tingkat kesulitan menilainya secara ekonomi.
6. Ada beberapa metode untuk menganalisis manfaat dan biaya suatu proyek adalah sebagai berikut :
- a. **Metode *Payback Period* (PP)**
Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu satuan hasilnya bukan persentase. Tetapi satuan waktu (bulan, tahun, dan sebagainya). Karena model ini mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali, maka dasar yang dipergunakan adalah aliran kas (*cash*

flow). *Payback period* merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Sehingga banyak digunakan. Namun demikian, *Payback period* mengandung kelemahan, yaitu:

Metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau *proceeds* yang diperoleh setelah *payback period* tercapai.

Metode *payback period* mengabaikan nilai waktu uang. Metode *payback period* tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat *mutually exclusive*

Perhitungan analisis *payback* periode adalah sebagai berikut (berdasarkan table diatas) :

Total Biaya Pengadaan Sistem pada tahun 0	:
Rp.25.000.000	
Proceed pada Tahun I	:
<u>Rp. 7.000.000 (-)</u>	
Sisa Biaya Sistem pada Tahun I	:
Rp.18.000.000	

Proceed pada Tahun II :

Rp.12.000.000 (-)

Sisa Biaya Sistem pada Tahun II :

Rp. 6.000.000

$$\text{Sisa} = \frac{6.000.000}{18.000.000} \times 1 \text{ tahun} = 0,35 \text{ tahun}$$

b. Metode *Net Present Value* (NPV)

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang inventasi dengan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Pada perhitungan ini tingkat bunga yang dipakai adalah 14% (diambil dari rata-rata tingkat bunga bank). NPV merupakan net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan *social opportunity cost of capital* sebagai diskon faktor.

Perhitungan metode NPV sebagai berikut (berdasarkan table di atas) :

$$\text{NPV} = - \text{nilai proyek} + \frac{\text{Proceed 1}}{(1 + I \%)^1} + \frac{\text{Proceed 2}}{(1 + I \%)^2} + \frac{\text{Proceed n}}{(1 + I \%)^n}$$

Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15 % pertahun maka :

$$NPV = - 25.000.000 + \frac{7.000.000}{(1+0.15)^1} + \frac{12.000.000}{(1+0.15)^2} + \frac{18.000.000}{(1+0.15)^3}$$

$$NPV = 1.995.972,69$$

Keterangan :

I = *diskon factor*

N = tahun (waktu ekonomis)

Dari Hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ke 3 apabila sistem ini diterapkan adalah :

Rp 1.995.972,69, atau NPV > dari **0**, maka proyek tersebut **layak dilaksanakan.**

- c. Metode Tingkat Pengembalian Internal / Internal Rate of Return (IRR)

Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proceed yang di diskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek.

Misalnya :

$i_1 = 15 \%$, maka $NPV_1 = 1.995.972,69$ (nilai NPV positif)

$i_2 = 20 \%$, maka

$$NPV_2 = -25.000.000 + \frac{7.000.000}{(1+0.2)^1} + \frac{12.000.000}{(1+0.2)^2} + \frac{18.000.000}{(1+0.2)^3}$$

$NPV_2 = -416.666,67$ (nilai NPV negatif)

$$IRR = 15 + \frac{(20\% - 15\%) \cdot 1.995.972,69}{NPV_1 - NPV_2}$$

$$IRR = 15\% + \frac{(5\%) \cdot 1.995.972,69}{1.995.972,69 - (-416.666,67)}$$

$$IRR = 15\% + \frac{9.979.863,45\%}{2.412.639,36}$$

$$IRR = 15\% + 4,14\% = \underline{\underline{19,14\%}}$$

$$IRR = 19,14\%$$

artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,14 % per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian (rate of return) yang diinginkan 15 % per tahun, maka $IRR > 15 \%$, dengan kata lain proyek dapat diterima.

9. Penerapan Analisis Biaya dan Manfaat

a. Perusahaan Swasta

Pada analisis perhitungan manfaat dan biaya pada proyek swasta, manfaat umumnya diukur dengan cara mengalikan jumlah barang yang dihasilkan dengan perkiraan harga barang. Biaya yang diperhitungkan adalah semua biaya yang langsung digunakan dalam proyek tersebut berdasarkan harga pembeliannya.

b. Pemerintah

Proyek-proyek pemerintah pada umumnya mengukur manfaat penggunaan sumber- sumber ekonomi yang diukur dengan harga pasar oleh karena harga pasar pada pasar persaingan sempurna mencerminkan nilai sesungguhnya dari sumber-sumber ekonomi yang digunakan. Pada keadaan dimana tidak terdapat persaingan sempurna maka harga-harga pasar tidak menunjukkan nilai sumber-sumber ekonomi yang sesungguhnya. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah menyesuaikan harga sumber ekonomi dengan menggunakan harga bayangan (*shadow prices*).

10. Sejarah Politik Ekonomi

Dalam perjalanan sejarah ilmu ekonomi dan juga politik, dalam menganalisis fenomena ekonomi ditemukan bahwa unsur politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis ekonomi. Meski ekonomi dan politik memiliki sudut pandang analisis masing-masing yang kadang berlainan, akan tetapi dua sudut pandang tersebut tetap dapat disandingkan dengan pertimbangan perhatian yang sama dalam analisis isu-isu : mengkoordinasi dan mengorganisasikan kegiatan manusia, pengelolaan konflik, pengalokasian beban dan keuntungan, serta menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia.

Jenis-jenis Teori Politik Ekonomi

Berikut ini adalah beberapa teori politik ekonomi, diantaranya:

a. Teori Pilihan Publik

Pendekatan baru dalam ekonomi politik yang menilai bahwa negara/pemerintah, politikus atau birokrat sebagai agen yang memiliki kepentingan memicu lahirnya pendekatan *public choice*. Masyarakat pemilih dianggap sebagai pembeli barang-barang publik sekaligus sebagai aktor yang akan memilih calon legislatif dan eksekutif.

Sementara itu pemerintah dianggap sebagai penyedia barang publik. Pemerintah yang telah dipilih harus menyediakan barang publik setelah menang sebagai wujud adanya ekonomi politik berupa demokrasi.

b. Teori Rent-Seeking

Teori *Rent-Seeking* di perkenalkan oleh Anne O. Krueger pada tahun 1974. Krueger pada waktu itu sedang membahas tentang praktik-praktik kelompok tertentu untuk memperoleh kuota impor. Kuota impor dipahami sebagai perbedaan perbedaan antara harga batas dan harga lokal. Dia menganalisis perilaku pemerintah sebagai penentu strategi ekonomi yang menarik pihak-pihak tertentu untuk menjalin hubungan dengan pemerintah demi mendapatkan keuntungan.

Pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pemerintah tersebut lazim disebut sebagai pemburu rente (*rent-seekers*). *Rent-seekers* pada dasarnya mencari peluang untuk menjadi penerima rente dari pemerintah dengan melakukan hal-hal tertentu seperti menyerahkan sumber daya, menawarkan proteksi.

BAB III

PENYEDIAAN BARANG PUBLIK

Para ekonom menggunakan istilah barang publik untuk merujuk pada sejumlah karakteristik yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya. Sebagian besar umumnya, istilah barang-barang publik hanya digunakan untuk menggambarkan barang yang diproduksi di sektor publik. Dengan demikian, sebagai contoh jalan raya dan pertahanan nasional adalah barang publik karena pemerintah yang memproduksi mereka. Jika istilah ini digunakan secara umum, maka akan timbul pertanyaan mengapa beberapa barang seperti contoh tersebut (jalan raya, pertahanan nasional, dll) cenderung diproduksi oleh pemerintah sementara barang yang lain cenderung diproduksi di pasar swasta.

Barang publik adalah unik dan menarik karena hampir tidak mungkin untuk mengalokasikan barang publik murni melalui mekanisme pasar. Adam Smith, pendiri ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan argumen yang mendukung pasar bebas. Smith juga menyatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah untuk menyediakan dua macam barang publik yakni pertahanan nasional dan sistem hukum, dan juga menyarankan bahwa keduanya harus dibayar dari perbendaharaan publik, (Smith, (1776) 1991, hal. 471)

A. DEFINISI BARANG PUBLIK

I. Perbedaan Barang Publik dengan Barang Lainnya

Barang publik mempunyai sifat yakni non-persaingan dan non- dikecualikan. Konsep pengecualian dan persaingan ini tidak hanya menuntun kita dalam mengartikan barang publik saja, namun juga untuk membedakan barang publik dengan kategori barang lain.

Untuk menyederhanakannya, beberapa ahli ekonomi menggolongkan sifat pengecualian dan persaingan suatu barang sebagai variabel dikotomi. Sifat barang publik ada persaingan maupun tidak, ada pengecualian maupun tidak digambarkan dalam variabel dikotomi. Variabel ini yang menggambarkan empat kemungkinan kombinasi yang selanjutnya disebut taksonomi sederhana dengan empat kuadran di dalamnya (perhatikan tabel di bawah ini

PERSAINGAN DALAM KONSUMSI	
Tidak	Ya
Pengecualian	
Barang kena Bea (pajak)	Barang Swasta
Cnth: Jalan tol, kabel TV bioskop, kursus (LBB)	Cnth: permen karet sekaleng soda, dll

Non-Pengecualian	
Barang Publik	Barang umum
Cnth: pertahanan nasional, penerangan jalan, gelombang radio	cnth: ikan di air, Air bersih, udara yang bersih

Barang publik disebut juga barang kolektif. Barang jenis ini dapat dikonsumsi oleh beberapa individu secara berkala atau terus-menerus. Hal ini menutup kemungkinan untuk memberlakukan sifat pengecualian bagi siapa saja yang ingin menikmati barang publik. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak penyedia barang publik untuk mendapatkan pengembalian dari biaya yang telah mereka keluarkan.

Jadi kesimpulannya **Barang Publik** adalah suatu barang yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Barang – barang publik dapat digunakan terus – menerus, serta tidak mengeluarkan biaya. Contohnya : Udara, Cahaya Matahari, Papan Marka Jalan, Lampu Lalu Lintas , Pertahanan Nasional

Ada dua aspek barang publik yaitu :

- a. *Non-rivalry*, berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap barang publik tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang publik tersebut.
- b. *Non-excludable*, berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Free Riders adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik tersebut. Contoh : mereka yang tidak membayar pajak tadi, tapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya pajak.

Barang swasta (barang pribadi) adalah barang yang mempunyai sifat yang berlawanan dengan barang publik. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sifat barang swasta adalah adanya persaingan dan pengecualian di dalamnya. Mayoritas barang yang dijual di pasar tergolong ke dalam barang swasta. Adanya barang swasta menyebabkan produsen akan mendapatkan biaya (laba) pribadi atas barang swasta yang mereka jual. Namun di satu sisi, adanya barang swasta akan menutup kemungkinan bagi seorang individu untuk menjadi *free-rider* atau dapat menikmati barang yang dimiliki oleh orang lain tanpa membayar.

Jadi kesimpulannya **Barang Swasta** adalah barang yang mempunyai sifat yang berlawanan dengan barang publik. Adanya persaingan, serta biaya yang timbul, apabila ingin memiliki barang tersebut. Contohnya : Rumah, pakaian , kendaraan.

Selanjutnya adalah **Barang umum** adalah barang yang mempunyai sifat adanya persaingan di dalamnya namun tidak ada sifat pengecualian. Barang yang termasuk ke dalam sifat ini biasanya adalah sumber daya alam. Contohnya saja ikan di laut, bagi para nelayan dibutuhkan adanya persaingan dalam berlomba-lomba menjangkau banyak ikan di laut. Namun, sebenarnya ikan di laut tersebut tidak berlaku sifat

pengecualian karena siapa saja selain nelayan dapat mengambil ikan di laut tersebut namun tetap dengan adanya persaingan di dalamnya.

Yang terakhir adalah **barang kena bea** (pajak, masuk, dll) adalah barang yang sifatnya tanpa persaingan dalam mendapatkannya namun terdapat pengecualian di dalamnya. Contohnya adalah kabel televisi (parabola), individu yang ingin memasang kabel televisi (parabola) di dalam rumahnya dapat memasang tanpa harus bersaing dengan individu yang lainnya namun dengan konsekuensi individu tersebut harus membayar untuk mendapatkan kabel televisi (parabola) tersebut.

B. Barang Publik Murni

Barang publik murni telah menjadi subjek dari sebagian besar analisis ekonomi barang publik. Dalam beberapa hal, barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus *benchmark* terhadap yang lain, yang dapat dinilai. Sebuah barang publik murni memiliki dua sifat berikut :

- 1) Non-dikecualikan. Jika kepentingan publik diberikan, konsumen tidak dapat dikecualikan dari konsumsi
- 2) Non-persaingan. Konsumsi barang publik oleh salah satu konsumen tidak mengurangi jumlah yang tersedia

untuk dikonsumsi oleh negara lainnya.

Sebaliknya, barang swasta sifatnya dikecualikan dan perlu adanya persaingan di dalamnya, yang artinya jika dikonsumsi oleh satu orang maka tidak ada yang tersisa untuk yang lain.

C. Barang Publik Tidak Murni

Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Dalam praktik, barang publik akhirnya cenderung menderita kemacetan ketika penggunaan cukup besar. Contoh jelas termasuk taman dan jalan. Kemacetan menghasilkan pengurangan dalam pengembalian barang publik kepada setiap pengguna sebagai akibat meningkatnya penggunaan pasokan yang diiringi oleh peningkatan rumah tangga. Barang publik tersebut disebut barang publik tidak murni. Utilitas yang diperoleh setiap rumah tangga dari barang publik murni adalah fungsi naik dari tingkat pasokan dan fungsi penurunan dari segi penggunaannya.

D. Argumen untuk produksi sektor publik dan sektor swasta

a. Argumen untuk Produksi Sektor Publik

Untuk melihat mengapa produksi sektor publik dari barang konsumsi kolektif diinginkan, asumsikan bahwa suatu barang diproduksi di sektor swasta dan perusahaan sektor swasta menetapkan biaya untuk setiap konsumen yang akan menikmati barang tersebut.

Contohnya adalah pelayanan kabel film pribadi yang hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan televisi kabel. Setelah kabel dipasang di rumah seseorang, saluran film yang biasanya acak sekarang hanya bisa ditonton dengan baik jika pelanggan membayar biaya ekstra. Pemrograman seperti contoh ini membutuhkan biaya untuk memproduksinya, tetapi setelah diproduksi, barang tersebut hanya diperuntukkan bagi seorang konsumen, namun bisa diperluas ke semua pelanggan tanpa biaya tambahan.

Asumsikan bahwa kabel perusahaan biaya \$ 10 per bulan untuk menerima saluran film. Jika pelanggan bersedia untuk membayar hanya \$5 per bulan untuk menerima saluran tersebut padahal biaya perusahaan

kabel sebesar \$10, pelanggan tidak akan mendapatkan saluran, meskipun layanan ini dapat diperluas ke penonton tanpa biaya tambahan. Dalam hal ini, perusahaan TV kabel di sektor swasta tidak bisa melakukannya, tentu saja, karena menggunakan pendapatan dari pelanggan untuk membiayai kabel dan membayar pemrograman sehingga harus mengenakan harga positif.

Dengan tidak membiarkan pelanggan yang bersedia membayar \$5 per bulan untuk menerima pemrograman, nilai sosial yang mungkin dari layanan kabel dikurangi dengan \$5. Kabel perusahaan dapat menerima tambahan \$ 5 pendapatan tanpa menimbulkan biaya apapun, atau, sebagai alternatif, pelanggan bisa menonton program senilai \$ 5 tanpa memungut biaya pada orang lain. Itu akan lebih baik untuk menetapkan harga sehingga perusahaan kabel dan pelanggan dapat menciptakan langkah Pareto unggul.

Argumen yang sama berlaku untuk seseorang yang akan bersedia membayar hanya \$ 1 untuk layanan. Karena biaya marjinal menambahkan penampil tambahan adalah nol, nilai barang sosial akan dimaksimalkan ketika semua orang yang menempatkan nilai apapun

sama sekali pada layanan ini diizinkan untuk mengkonsumsi itu. Tentu saja, perusahaan kabel tidak memiliki cara untuk mengetahui yang bersedia membayar hanya \$ 5 dan yang bersedia membayar hanya \$ 1, jadi harus mengisi harga yang sama untuk semua orang. Untuk memaksimalkan nilai barang sosial, ini berarti harus tersedia untuk semua orang tanpa biaya. Ini adalah argumen untuk pembiayaan barang melalui pajak dan mendistribusikan hal ini kepada siapapun yang menginginkannya tanpa biaya. Jika barang memiliki harga yang bersifat sembarang, maka akan mengecualikan beberapa konsumen yang menempatkan nilai di atasnya, sehingga nilai barang sosial tidak akan maksimal.

b. Argumen untuk Produksi Sektor Swasta

Sebagian tentang produksi sektor publik telah terlihat dari argumen yang diberikan, namun ada yang menarik dari argumen terhadap produksi sektor publik juga. Bioskop mungkin memiliki karakteristik barang konsumsi kolektif. Hal yang sama dapat dikatakan untuk barang-barang seperti kolam renang dan jalan raya. Jika salah satu diantara barang tersebut tidak ramai, tambahan konsumen yang mengonsumsi barang

tersebut tidak akan mengganggu konsumsi orang lain. Namun, jika barang-barang tersebut dalam keadaan ramai, mereka kehilangan karakteristik konsumsi kolektif.

Dalam setiap kasus ada biaya marjinal yang berhubungan dengan konsumen tambahan. Jalan raya dan kolam renang yang tidak memiliki tol atau biaya masuk harus dibangun lebih besar untuk mengakomodasi semua orang yang ingin menggunakannya tanpa membayar, yang mewakili biaya marjinal konsumen tambahan. Dilihat dalam hal ini, hal-hal ringan banyak yang muncul untuk menjadi barang konsumsi kolektif. Jalan raya yang tidak ramai berfungsi sebagai contoh sempurna bahwa barang ini menjadi barang konsumsi swasta yang telah dioverproduksi. Jika jalan dibangun dengan jalur yang lebih sedikit, mereka akan kehilangan karakteristik konsumsi kolektif. Namun beberapa barang tampaknya tidak rentan terhadap kemacetan sama sekali. Meskipun bioskop itu sendiri mungkin menjadi padat, jika teater lain dibangun, bisa menunjukkan film yang sama tanpa harus memproduksi film lagi. Informasi apapun mungkin memberikan contoh yang baik, dan sinyal

siaran televisi yang dibahas sebelumnya adalah tidak mungkin memiliki masalah kemacetan. Bahkan dalam kasus di mana tidak ada masalah kemacetan, mungkin masih ada alasan untuk memproduksi barang di sektor swasta.

Misalnya, konsumen dapat memilih dari beberapa saluran kabel yang menunjukkan musik, cuaca, olahraga, dan sebagainya. Jika layanan ini semua diberikan gratis, produsen akan tidak tahu tentang nilai setiap layanan. Jadi meskipun mungkin tidak efisien untuk mengecualikan beberapa konsumen, pembayaran untuk layanan ini menyediakan sinyal pasar dari nilai pelayanan kepada mereka yang mengkonsumsinya dan dengan demikian memberikan indikasi mana yang harus diperluas dan yang kurang diperluas. Seiring waktu sumber daya dialokasikan secara lebih efisien bila sinyal pasar memberikan indikasi yang barang lebih berharga.

E. Ketentuan Optimal Barang Publik

Samuelson berpendapat suatu model tentang ketentuan barang publik yang optimal, yang merupakan formulasi neoklasik yang dipengaruhi oleh karya sebelumnya dari Wicksell dan Lindahl. Samuelson berpendapat bahwa dalam kasus dua barang dimana satu barang adalah barang publik, alokasi yang efisien mensyaratkan

$$MRS_{xg}^1 + MRS_{xg}^2 = MRT_{xg}$$

bahwa:

Dimana : x = barang swasta

g = barang publik

Dibandingkan dengan pareto optimal dari barang pribadi yang mengharuskan:

$$MRS_{xy}^1 + MRS_{xy}^2 = MRT_{xy}$$

Dimana x dan y = barang pribadi (swasta)

Kogiku (1971: 155-16) telah menunjukkan bahwa kondisi efisiensi Samuelson diatas dapat diturunkan jika fungsi utilitas individu pertama dimaksimalkan atas utilitas individu kedua yang konstan, dan pada fungsi produksi lengkap.

Model ini mengasumsikan dua konsumen, satu barang swasta dan satu barang publik. Brown dan Jackson (1990:70) juga memberikan derivasi diagram kondisi Samuelson.

Kondisi efisiensi Samuelson berdasarkan pada asumsi yang sifatnya membatasi. Pertama, model ini mengasumsikan adanya seorang perencana yang mengetahui harga pajak setiap individu yang bersedia membayar untuk barang publik. Artinya, perencana harus memiliki informasi tentang kurva permintaan-palsu dari setiap individu. Kedua, sejak model ini mengasumsikan preferensi pembukaan rahasia oleh setiap individu, itu tidak memperhitungkan masalah *free rider*. Ketiga, Model ini berdasarkan pada kegagalan informasi karena biaya untuk mengumpulkan informasi dalam kasus kelompok besar akan menjadi sulit.

Pendekatan Wicksell dan Lindahl untuk penyediaan barang publik didasarkan pada prinsip kepentingan perpajakan yang menyatakan bahwa setiap orang harus membayar pajak dalam kaitannya dengan manfaat yang mereka terima dari mengonsumsi barang publik.

Menurut Musgrave (1985:13), model Wicksell hanya dimulai dengan distribusi pendapatan, yang diperlukan untuk proses pemungutan suara untuk mencapai keadilan dan distribusi efisien dari harga pajak.

Pengambilan suara untuk saham pajak dan barang dalam model Wicksell didasarkan pada aturan suara bulat dimana seratus persen dukungan pemilih diperlukan. Namun, mengingat kesulitan yang akan timbul dari penerapan peraturan ini, Wicksell mengakui bahwa perkiraan kebulatan suara akan mencukupi (Musgrave 1985; Musgrave dan Merak 1964:92).

Lindahl khawatir dengan ditemukan keseimbangan yang mencerminkan hanya pada saham pajak dan output barang publik. Diskusi kami tentang Keseimbangan Lindahl berdasarkan pada pendapat Musgrave. Lindahl mengasumsikan dua konsumen yang menentukan saham pajak mereka melalui proses tatonnement. Kesepakatan bulat telah diasumsikan. Semakin tinggi proporsi pajak yang dibayar oleh A semakin rendah proporsi yang dibayar oleh B. Saham pajak yang direncanakan bersama kurva permintaan A dimana B sebagai kurva penawaran untuk barang publik. Perpotongan kedua kurva permintaan menentukan jumlah keseimbangan barang publik dan keseimbangan saham pajak. Jumlah dari dua harga pajak sama dengan biaya penyediaan barang publik.

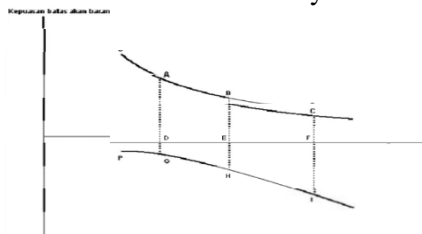
Keseimbangan Lindahl, seperti model Samuelson, didasarkan pada melihat dari individu mengungkapkan preferensi mereka. Kegagalan individu untuk mengungkapkan preferensi mereka menjadi masalah dalam kasus kelompok besar. Selain itu, asumsi Lindahls kesepakatan bulat di antara individu tidak mungkin

realistis bagi masyarakat luas. Selanjutnya, Rubinfeld memiliki pendapat bahwa aturan suara bulat memberikan hak veto untuk permintaan individu rendah "yang dapat menghentikan proses kecuali dikompensasi oleh pembagian pajak yang lebih rendah ". Dengan asumsi juru lelang (*auctioneer*) mengatur proses pemungutan suara, permintaan veto yang rendah dapat memanipulasi juru lelang.

F. Teori Barang Publik.

a. Teori Pigou

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai satu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal (marginal disutility) akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.



Kurva Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal Menurut Pigou

Keterangan kurva:

- 1) Kurva UU adalah kepuasan marginal pada barang publik, kurva menurun menunjukkan semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka kepuasan marginal semakin menurun. Contoh: pemungutan pajak.
- 2) Kurva PP menunjukkan ketidakpuasan marginal. Pada titik F kepuasan marginal barang publik $CF >$ dari ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak (jarak FI), jadi pemerintah harus memperkecil anggaran untuk barang-barang publik. Sedangkan pada titik D kepuasan marginal $AD >$ dari ketidakpuasan masyarakat akan pembayaran pajak DG. Sehingga kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menambah anggaran pemerintah untuk menghasilkan publik.
- 3) Titik E merupakan titik optimim dimana kepuasan marginal barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak.
- 4) Pengurangan budget dari F ke E adalah pengurangan penggunaan sumber-sumber ekonomi oleh pemerintah sehingga sumber-sumber ekonomi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan barang swasta.

Kesimpulan :

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik).

Pada teori ini kurva kepuasan akan barang publik ditunjukkan oleh kurva UU. Dimana kurva tersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah kepuasan marginalnya yang dirasakan masyarakat. Di lain pihak, semakin banyak pajak yang dipungut, semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Oleh karena itu kurva ketidakpuasan marginal akan pembayaran pajak mempunyai bentuk yang meningkat.

Kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal.

Teori Samuelson

Dikarenakan Samuelson menerbitkan karakterisasi penyediaan efisien barang publik murni yang pertama kali, maka untuk alasan ini aturan untuk penyediaan barang publik yang efisien biasanya disebut aturan Samuelson. Analisis berikut akan memperoleh aturan Samuelson untuk barang publik murni, dengan dan tanpa pembuangan bebas (*Free Disposal*), dan barang publik dengan kemacetan.

Untuk memberikan derivasi cukup sederhana dari aturan efisiensi akan diasumsikan bahwa ada tersedia sebuah masyarakat tunggal yang baik dan, pada awalnya, pembuangan yang tidak mungkin. Asumsi yang terakhir menyiratkan bahwa semua rumah tangga harus mengkonsumsi kuantitas sama baik masyarakat untuk pasokannya. Perpanjangan untuk umum banyak barang sepenuhnya mudah. Ekonomi rumah tangga terdiri dari H , diindeks $h = 1, \dots, H$. Setiap rumah tangga memiliki fungsi utilitas

$$U^h(x^h, G)$$

Dimana x^h adalah konsumsi rumah tangga h dari vektor barang pribadi dan G adalah penyediaan barang publik. Faktanya bahwa total pasokan, G , muncul dalam semua fungsi utilitas rumah tangga yang menunjukkan bahwa barang publik tersebut murni.

Perhatikan persamaan berikut!

$$\sum_h MRS^h = MRT$$

$$G_i = \sum_h g_i^h$$

Persamaan berikut adalah aturan Samuelson yang menyatakan bahwa ketentuan Pareto efisien dari barang publik terjadi ketika tingkat transformasi marjinal antara barang publik dan masing-masing barang swasta disamakan penjumlahan tersebut, dari tingkat substitusi marjinal semua rumah tangga. Hasil pada persamaan tersebut harus dikontraskan dengan aturan yang sesuai untuk efisien penyediaan dua barang pribadi i dan j

$$MRS^h = MRT, \text{ for all } i, j, h$$

$$J_i = J_j$$

Perbedaan antara persamaan yang pertama dan kedua terjadi karena fakta bahwa setiap unit tambahan barang publik akan meningkatkan utilitas dari seluruh rumah tangga sehingga manfaat sosial dari unit tambahan ditemukan dengan menjumlahkan manfaat marjinal, diukur dengan MRS, untuk rumah tangga. Pada saat optimal, MRS ini disamakan dengan marjinal biaya yang diberikan oleh tingkat transformasi marjinal (MRT). Sebaliknya, sebuah unit tambahan barang swasta hanya meningkatkan kesejahteraan penerima tunggal dan keadaan optimal terjadi ketika manfaat marjinal yang menyamakan kedudukan di seluruh rumah tangga dan biaya marjinal.

Dua hal harus dicatat dalam interpretasi hasil ini. Pertama, meskipun non-dikecualikan telah diadopsi sebagai ciri khas murni barang publik, hal ini tidak memainkan peran dalam derivasi aturan Samuelson. Bahkan, ketentuan tingkat optimal tidak tergantung pada derajat sifat dikecualikan. Sebaliknya, sifat dikecualikan hanya relevan untuk menentukan mekanisme penyediaan layak. Kedua, meskipun aturan Samuelson adalah tampak sederhana dalam bentuk, ketelitian harus diambil sebelum percaya bahwa hal tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan. Agar dapat memperoleh aturan tersebut, diasumsikan bahwa pemerintah

memiliki kontrol penuh atas alokasi sumber daya. Ekuivalen pemerintah bisa menggunakan lumpsum perpajakan untuk redistribusi pendapatan dan untuk membiayai penyediaan barang publik, dengan desentralisasi penyediaan barang swasta. Seperti yang telah diketahui bahwa optimal lumpsum pajak jarang dapat digunakan dalam praktek dan pengamatan yang sama meniadakan pelaksanaan aturan Samuelson. Kesimpulan ini telah memotivasi penyelidikan bentuk-bentuk alternatif keuangan dan kontras alokasi yang dihasilkan untuk aturan pertama terbaik Samuelson.

Free Disposal (Pembuangan Bebas) Jika pembuangan bebas dari barang publik adalah mungkin itu tidak lagi diperlukan bahwa setiap rumah tangga perlu mengkonsumsi jumlah total yang disediakan. Jika diasumsikan bahwa semua rumah tangga ingin mengkonsumsi beberapa barang publik, tingkat utilitas rumah tangga h dapat ditulis

$$U^h = U^h(x^h, g^h)$$

Dimana g^h adalah konsumsi dari barang publik oleh h , dan kendala $g^h \leq G$.

Kesimpulan :

Samuelson menyatakan bahwa adanya barang yang mempunyai dua karakteristik, yaitu : non exclusionary dan

non rivalry, tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi Pareto Optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal.

Kelemahan teori ini :

1. Hasil analisis sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan individu mana yang dipilih, dan tingkat kesejahteraan mana yang mula-mula di pilih.
2. amulson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto optimal akan tetapi kita tidak tahu apakah perpindahan dari D ke W pada diagram diatas menunjukkan perbaikan atau penurunan kesejahteraan seluruh masyarakat.
3. Kelemahan yang terbesar adalah pada anggapan bahwa konsumen secara terus terang mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik dan kesukaan mereka inilah yang menjadi dasar pengenaan biaya untuk menghasilkan barang publik. Yang menjadi persoalan dalam penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memungut pembayaran dari konsumen barang publik.
4. Barang publik yang dibahas adalah barang yang mempunyai sifat kebersamaan, yaitu barang publik yang dipakai oleh konsumen dalam jumlah yang sama.

c. Teori Bowen

Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-barang publik dan teorinya didasarkan pada teori harga seperti halnya pada penentuan harga pada barang-barang swasta. Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang dimana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut.

Keterangan kurva:

- 1) Kurva permintaan individu A dan B ditunjukkan oleh kurva DA dan DB. $D(A+B)$ dari penjumlahan vertikal DA dan DB.
- 2) OY adalah barang yang disediakan oleh pemerintah, yaitu titik perpotongan kurva penawaran dan permintaan $D(A+B)$. Kurva OY adalah barang publik yang dapat dinikmati oleh A dan B dalam jumlah yang sama.
- 3) Jumlah yang harus dibayar oleh konsumen A adalah OPA dan yang dibayar oleh konsumen B adalah OPB. $OPA+B$ adalah jumlah yang harus dibayar oleh konsumen A dan B pada tingkat harga PA dan PB atas barang publik.

- 4) Titik potong antara kurva penawaran S dan kurva permintaan DA+B adalah OY, yaitu jumlah barang yang harus disediakan oleh pemerintah atas barang publik.

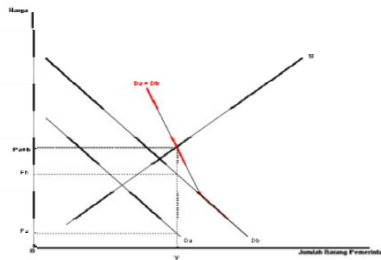
jadi, menurut bowen perbedaan antara barang swasta dan barang publik adalah:

Kurva Harga dan Jumlah barang Publik

Dimana:

P = harga barang

X = jumlah barang swasta yang dihasilkan



	Barang Swasta	Barang Publik
Harga	$P = P_A = P_B$	$P = P_A + P_B$
Jumlah Barang	$X = X_A + X_B$	$G = G_A + G_B$

G = jumlah barang publik yang dihasilkan

A&B = individu A dan B

Kesimpulan :

Bowen mengemukakan teori yang didasarkan pada teori harga sama halnya pada penentuan harga pada barang swasta.

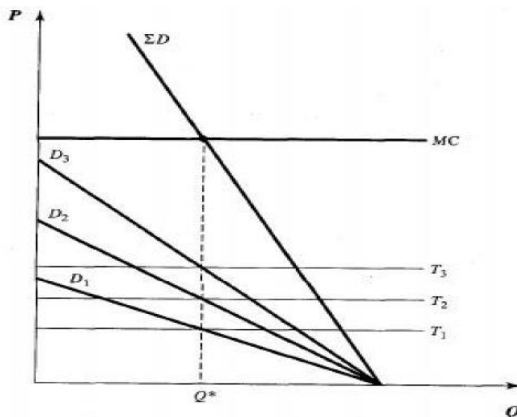
Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang dimana

pengecualian tidak dapat ditentukan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut.

Kelemahan teori ini adalah karena Bowen menggunakan permintaan permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan mereka akan barang tersebut sehingga permintaan kurva permintaan menjadi tidak ada .

Teori Erick Lindahl (*Lindahl Pricing*)

Berikut ini adalah grafik barang konsumsi kolektif



Harga Lindahl untuk barang publik diatur sedemikian rupa sehingga setiap individu membayar harga marjinal sama dengan keuntungan marjinal yang diperoleh individu saat mengonsumsi barang. Harga Lindahl digambarkan dalam gambar 5.1. Pada kuantitas Q^* , yang merupakan kuantitas yang optimal, nilai marjinal suatu untuk konsumen 1 adalah T_1 , untuk konsumen 2 adalah T_2 , dan untuk konsumen 3 adalah T_3 .

Jika harga tersebut dibebankan pada permintaan individu, maka masing-masing individu akan membayar harga marjinal yang sama dengan nilai marjinal konsumen terhadap barang tersebut yang merupakan harga Lindahl.

Dalam suatu cara, harga Lindahl seperti harga pasar kompetitif karena dengan harga pasar yang kompetitif, individu memilih kuantitas yang mereka konsumsi sehingga harga di pasar sama dengan nilai marjinal konsumen untuk barang yang mereka konsumsi. Kondisi dalam pasar kompetitif untuk barang swasta menunjukkan alokasi sumber daya yang efisien, tetapi perhatikan bahwa harga Lindahl tidak diperlukan untuk tingkat output yang efisien dari barang konsumsi kolektif. Tingkat optimal output, Q^* , ditentukan oleh perpotongan kurva GD dan MC, tidak peduli

siapa yang membayar biaya tersebut. Hal ini dikarenakan bagi barang dengan jumlah yang sama diproduksi untuk semua konsumen, tidak akan mungkin bagi seorang konsumen untuk mengkonsumsi sedikit barang jika konsumen tersebut berpikir harga barang terlalu tinggi atau bagi konsumen lain untuk mengkonsumsi barang lebih sedikit jika ia berpikir harga barang terlalu rendah. Karena setiap konsumen (individu) tidak dapat menyesuaikan kuantitas tetapi harus mengambil kuantitas yang dihasilkan untuk semua orang, harga barang tidak harus sama dengan penilaian marjinal konsumen untuk barang tersebut dari barang konsumsi kolektif untuk dapat menjadi efisien.

Terkadang, terdapat kondisi yang memungkinkan untuk membayangkan sebuah kasus di mana harga Lindahl bisa dianggap tidak adil. Asumsikan bahwa terdapat suatu antena siaran televisi yang sewenang-wenang (*Arbitrarily*) terletak di suatu daerah. Mereka yang tinggal di dekat antena akan menerima sinyal yang jelas dan akan memiliki nilai marjinal yang relatif rendah untuk setiap watt tambahan, sedangkan mereka yang tinggal agak jauh dari antena dan tidak mendapatkan sinyal yang jelas akan menempatkan nilai marjinal lebih tinggi pada setiap watt tambahan untuk meningkatkan sinyal. Harga Lindahl akan berarti bahwa

mereka yang tinggal paling jauh, yang menerima sinyal paling lemah dan menempatkan nilai tertinggi pada watt tambahan, akan membayar harga tertinggi. Karena antena terletak sewenang-wenang di tempat pertama, tampaknya tidak adil untuk mematok harga tertinggi bagi mereka yang menerima sinyal yang terlemah. Dengan demikian, harga Lindahl tidak dianjurkan untuk kriteria efisiensi dan melanggar pengertian umum tentang keadilan.

Seberapa praktis penerapan harga Lindahl di dunia nyata? Kita lihat bahwa sangat mudah untuk melihat harga Lindahl dalam gambar 5.1, tetapi di dunia nyata di mana kurva permintaan individu tidak dapat dilihat dengan jelas, maka hal tersebut akan menyulitkan untuk menghitung harga Lindahl secara akurat. Namun, perkiraan dapat dilakukan jika setiap orang dikenakan biaya sebesar perkiraan harga sesuai dengan tuntutan mereka untuk barang yang dikonsumsi.

Dengan demikian, menggunakan pajak bensin guna dialokasikan untuk perbaikan jalan raya niscaya akan lebih dekat dengan harga Lindahl daripada jika pajak penjualan bensin tersebut digunakan untuk mendanai jalan raya.

Demikian pula, orang dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki tuntutan yang lebih tinggi untuk pendidikan dan hidup di rumah yang lebih mahal. Demikian juga, orang dengan keluarga yang lebih besar akan memiliki lebih banyak permintaan untuk pendidikan dan akan cenderung untuk tinggal di rumah yang lebih mahal. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan publik melalui pajak properti mungkin lebih dekat dengan mendekati harga Lindahl daripada jika pajak gas atau bahkan pajak penghasilan digunakan.

Hal ini dimungkinkan untuk struktur sistem pajak untuk mendekati harga Lindahl ketika tuntutan individu untuk barang-barang tertentu yang berkorelasi dengan basis pajak yang diberikan yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai barang publik. Yang lebih dekat datang ke harga Lindahl, semakin mudah akan mencapai kesepakatan tentang jumlah barang yang akan diproduksi dan semakin besar kemungkinan efisiensi perkiraan kuantitas barang.

Kesimpulan :

Teori Lindahl mirip dengan yang dikemukakan oleh Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak dalam bentuk harga absolut akan tetapi berupa presentase dari total biaya penyediaan barang publik. Analisa Lindahl didasarkan

pada analisa kurva indifferen dengan anggaran tetap yang terbatas (*fixed budget constrains*).

Kelemahan teori Lindahl adalah karena teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta. Selain itu kelemahan utamanya adalah penggunaan kurva indifferen. Sifat barang publik tidak dapat dikecualikan menyebabkan tidak ada seorang individu juga yang bersedia menunjukkan prefrensinya terhadap barang publik. kritikan lainnya ialah teori ini hanya melihat penyediaan barang publik saja tanpa memperhitungkan jumlah barang swasta yang seharusnya diproduksi agar masyarakat mencapai kesejahteraan optimal

Teori Anggaran

Teori ini didasarkan pada suatu analisa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang-barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta (*private goods*).

Kesimpulannya :

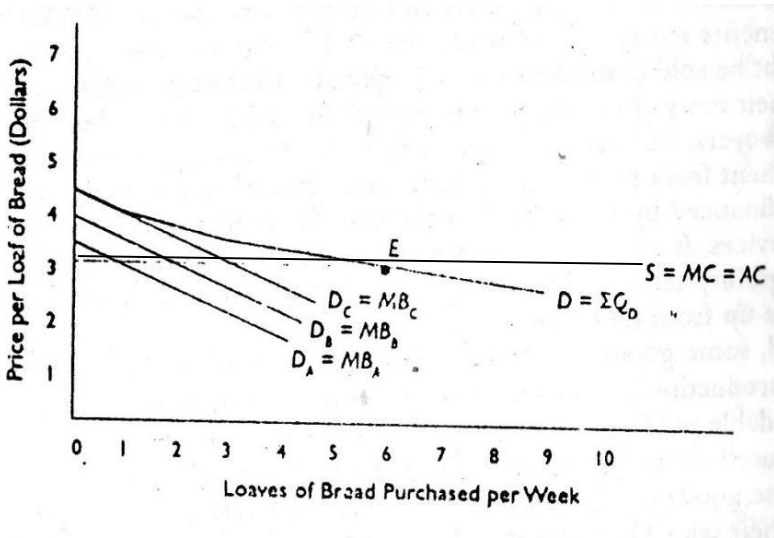
Teori ini didasarkan pada suatu analisa di mana setiap orang membayar atas penggunaan barang -barang publik dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Teori alokasi barang publik melalui

anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kelemahan dari teori ini, yaitu digunakannya kurva indifferens sebagai alat analisis yang baik dari segi teori akan tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari-hari.

G. Permintaan Barang Publik

Tuntutan akan barang publik haruslah diinterpretasikan berbeda dari tuntutan akan barang swasta. Pasar perdagangan sebagai salah satu barang publik melayani beberapa kuantitas permintaan kepada seluruh konsumen dengan harga seekonomis mungkin yang bisa dicapai. Pasar sebagai pihak swasta, sebagai contoh toko roti, Pada berbagai harga yang telah diberikan, tujuan dari pasar sebagai pelaku penyedia layanan publik dari pihak swasta dicerminkan dari penambahan kuantitas pada tiap konsumen yang telah membeli produknya. Permintaan konsumen akan produk juga akan meningkatkan kurva penghasilan dari pasar tersebut.



Gambar 4.4 Permintaan untuk Barang Swasta

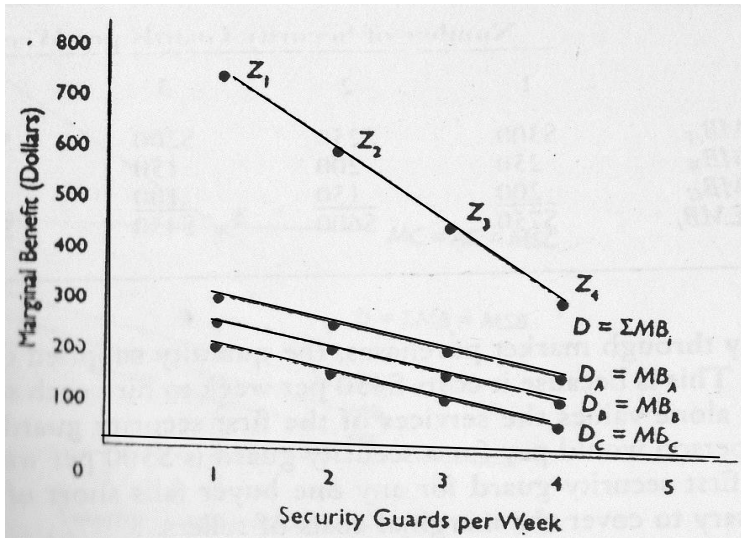
Pada figur 4. 4 hanya ada tiga jenis konsumen dari swasta. Pada harga \$3 tiap satu roti, kurva permintaan orang konsumen tersebut adalah D_A pada pembelian satu roti tiap minggu. Itu adalah kuantitas kesetaraan harga dari keuntungan marginal per minggu ($MB_A = \$3$). Konsumen pada kurva permintaan dipresentasikan dengan D_B yang telah membeli dua roti per minggu dengan harga \$3 tiap rotinya. Sehingga jumlah pembelian mingguan dari roti, $MB_B = \$3$. Pada akhirnya konsumen dengan kurva permintaan D_C pembelianya tiga roti pada tiap minggunya dengan harga \$3

tiap rotinya karena $MB_C = \$3$ pada jumlah konsumsi mingguannya. Total permintaan kuantitas pasarnya oleh tiga jenis konsumen sehingga enam roti tiap minggunya dengan harga \$3 tiap rotinya. Hal itu telah dipresentasikan pada poin E pada kurva permintaan pasar. Sampai harga tiap rotinya turun, hanya orang dengan pembelian yang baik akan menjadi satu dengan kurva permintaan yang telah dipresentasikan D_C . Pada harga yang lebih rendah, individu lain yang melakukan permintaan dipresentasikan dengan D_B dan D_A secara progresif masuk pasar, dan kuantitas permintaan mereka akan harga lebih rendah jadi dikategorikan konsumen dengan permintaan D_C . Kurva permintaan pasar pada swasta diberi label $D = \sum Q_D$.

Untuk barang publik, *semua konsumen haruslah mengonsumsi barang dengan kuantitas yang sama*. Pembeli pada barang publik tidak akan memungkinkan untuk menyesuaikan konsumsi mereka jadi satu, orang hanya punya satu unit item per pekannya sementara orang lainnya bisa menikmati dua unit item per pekannya dan tentu saja orang lainnya bisa mencapai tiga unit per pekannya. Jika konsumen memiliki tiga unit per pekannya, semua orang pun akan mengonsumsi 3 unit per pekannya. Bagi konsumsi barang publik, konsumen tidak bisa menyesuaikan jumlah

pembeliannya sampai harga yang sama/sesuai dengan margin keuntungan per pekannya. Faktanya, barang publik yang baik tidak bisa memberi harga dikarenakan bukan termasuk barang pengeluaran.

Kemudian bagaimana kurva permintaan pada barang publik bisa didapatkan? Variabel pada akses vertikal bukanlah harga pasar. Sebaliknya, tercapai jumlah max. Pada orang yang akan membayar per unit dari barang publik murni sebagaimana fungsi dari jumlah aktual yang tersedia. Sebagai contoh, kira-kira tiga jenis konsumen tinggal bersama pada komunitas yang kecil dan menginginkan melengkapinya dengan perlindungan pengamanan. Kuantitas dari pengamanan dapat diukur dari jumlah penjaga keamanan yang telah disewa per minggu untuk berjaga-jaga pada komunitas mereka. Penjaga keamanan mencerminkan dari barang publik murni pada tiga jenis konsumen. Tidak ada jalan lain bagi tiap orang dalam komunitas itu untuk menyewa petugas keamanan bagi keuntungan diri sendiri tanpa menguntungkan tetangga mereka.



Gambar 4.5 Permintaan Barang Publik Murni

Figur 4.5 memperlihatkan tiap kurva permintaan individual akan penjaga keamanan. Poin dari kurva permintaan individual memperlihatkan jumlah max. Sehingga konsumen akan membayar untuk mendapatkan tiap unit kuantitas korespondensi dari barang publik. Hal itu adalah jumlah max. Dari keuntungan marginal dari perlindungan kemandi di tiap kuantitasnya. Tiap kurva permintaan individual memperlihatkan bagaimana keuntungan marginal dari penjagaan keamanan merosot lebih tajam yang mungkin mereka lakukan.

Total jumlah yang akan diberikan per penjaga keamanan yang diinginkan per minggu adalah jumlah keuntungan marginal mingguan tiap tahunnya dari tiap tiga konsumen. Poin dari agregasi kurva permintaan untuk barang publik bisa dicapai dengan menambah tiap orang keuntungan marginla pada tiap kuantitas yang memungkinkan. Kurva permintaan pada barang publik sehingga tercapai dengan menambahkan jumlah kurva permintaan individual vertikal. Keuntungan marginal, atau harga permintaan, sehingga tiap orang akan membayar per unit dari barang publik pada tiap kuantitasnya karena semua orang harus mengonsumsi kuantitas yang sama.

Sebagai contoh, seseorang dengan kurva permintaan D_A diharuskan membayar \$300 tiap penjaga keamanan jika hanya ada satu orang penjaga tersedia tiap pekannya. Umumnya, jumlah maks. Orang dengan kurva permintaan D_B dan D_C akan membayar tiap penjaga keamanan jika hanya tiap minggunya bayarannya \$250 dan \$200, secara bertanggung jawab. Inti dari kurva permintaan pasar tercapai dengan menambahkan jumlah maksimalnya. Karena jumlah maksimal merefleksikan keuntungan marginal dari penjagaan kemananan, poin dari kurva permintaan dipresentasikan dengan poin Z_I koresponden si pada jumlah

keuntungan marginal dari semua konsumen. Rata-rata \$750 per tahun ketika hanya satu penjaga keamanan tersedia.

Keuntungan marginal dari unit tambahan pada barang publik merosot tajam pada bidang fashion seperti halnya yang dilakukan swasta. Jumlah penjaga keamanan bisa dikumpulkan jika dua orang penjaga digunakan per minggu kurang dari yang bisa dikumpulkan per penjaga jika hanya ada satu yang tersedia tiap minggu. Hal itu juga diperlihatkan pada figur 4.5. Jumlah max. Per penjaga pada tiap konsumen akan bertambah ketika dua penjaga yang tersedia per minggu \$250 untuk *A*, \$200 untuk *B*, dan \$150 untuk *C*. Sehingga jumlah keuntungan marginal ketika dua penjaga keamanan per minggunya tersedia adalah \$600, seperti dipresentasikan dengan poin B_2 pada figur 4.5. penambahan keuntungan marginal diterima dari tiap konsumen dari tiap jumlah penjaga keamanan pada jalur ini diberikan poin pada kurva permintaan pada barang publik murni. Kurva ini diberi label $D = \sum MB_i$

Barang publik, seperti telah kita tahu, bersandar pada prinsip pengecualian. Permintaan untuk barang publik ditemukan dengan menambahkan kurva permintaan secara vertikal. Kurva permintaan menggambarkan kesediaan konsumen untuk membayar harga pajak tertentu untuk suatu kepentingan publik. Samuelson telah menjelaskan kurva ini sebagai "pseudo- *demand curve*" atau "kurva substitusi tingkat marjinal", karena mereka menganggap bahwa setiap orang menyatakan kesediaannya untuk membayar output dari barang publik.

Keseimbangan ditemukan saat total kesediaan membayar pajak sama dengan harga dari barang publik. Keseimbangan ini mencerminkan penjumlahan dari substitusi tingkat marjinal yang sama dengan tingkat transformasi marjinal. Dalam situasi dunia nyata, estimasi dari "pseudo- kurva permintaan" dalam kasus kelompok besar akan membutuhkan informasi yang cukup besar yang mungkin mustahil untuk menyediakannya.

Estimasi dari permintaan tertutupi oleh masalah free rider yang muncul ketika individu tidak mengungkapkan preferensi mereka, tetapi masih mengonsumsi barang publik. Sulit untuk memaksa semua orang untuk mengungkapkan kebenaran preferensi mereka. Kadang-kadang wajib pajak juga dibutuhkan untuk perlengkapan keuangan barang publik.

Kendala anggaran adalah representasi dari kombinasi barang individu yang dapat dibeli, di sini barang publik dan swasta, dilihat dari tingkat pendapatan dan harga pajak. Kita dapat menyatakan kendala anggaran individu dalam cara berikut:

$$C + tG = Y$$

Dimana:

t = pajak individu

C = konsumsi individu atas barang swasta

G = jumlah total barang publik yang disediakan

Y = pendapatan individu

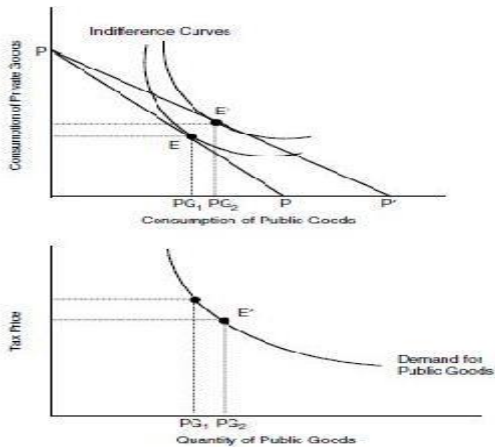


Figure 6.3 Individual demand curve for public goods.

Keterangan Kurva:

- a. Garis PP adalah sebagai batasan anggaran.
- b. Titik E mendefinisikan titik dimana kemiringan kurva indifferens dan kemiringan kurva kendala anggaran adalah sama.
- c. Kemiringan kurva kendala anggaran menunjukkan seberapa banyak barang swasta dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keuntungan sebesar satu unit barang publik yang sama dengan harga pajak individu.
- d. Kemiringan kurva indifferen menunjukkan berapa banyak individu yang bersedia membayar untuk menerima satu unit lebih barang publik.
- e. Titik E merupakan titik individu yang paling disukai (keseimbangan individu) dan jumlah indikator yang harus individu bayar untuk menerima satu unit lebih dari barang publik.
- f. Karena harga barang publik (harga pajak) diturunkan, individu menyadari pergeseran dalam anggaran kendala dari PP ke PP', dengan tingkat kepuasan individu bergeser dari titik E ke E' yang menyebabkan peningkatan permintaan individu untuk barang publik.
- g. G 1 dan PG 2 menunjukkan jumlah barang publik yang diminta pada harga pajak, yang sesuai dengan poin E dan E'.

a. MODEL TIEBOUT

Didalam Model Tiebout akan dibahas mengenai mobilitas, pembentukan komunitas sukarela dan penyediaan barang publik yang efisien. Disini Model Tiebout mengasumsikan seperti penggunaan ponsel di masyarakat, yang mana pemerintah menawarkan barang dan jasa publik pada rata-rata minimum biaya yang memenuhi pola individu. Pemerintah membuat asumsi sebagai berikut:

1. Para konsumen pindah ke pilihan yang lebih disukai dan memuaskan mereka
2. Konsumen memiliki informasi yang sempurna pada pendapatan dan pengeluaran.
3. Adanya sejumlah besar komunitas atau masyarakat
4. Semua individu hidup pada pendapatan dividen
5. Tidak ada ekonomi eksternal atau disekonomis antara masyarakat
6. Ada ukuran komoditas yang optimal. Masyarakat di bawah optimal mencoba menarik warga baru untuk biaya rata-rata yang lebih rendah.

Begitu juga sebaliknya bagi masyarakat di atas optimal Rubinfeld telah menambahkan asumsi tambahan dari yang di atas yaitu bahwa "barang publik dibiayai oleh pajak lump-

sum" dan terdapat bukti dari tidak adanya lahan dalam model Tiebout, karena Tiebout diasumsikan bahwa beberapa faktor produksi atau sumber daya adalah tetap.

Model Tiebout asli telah menimbulkan banyak kritik terutama yang berasal dari asumsi-asumsinya yang bersifat membatasi. Buchanan dan Goetz, misalnya, mengkritik model tersebut dengan alasan bahwa itu mengabaikan "ketetapan lokasional" dan mengasumsikan tidak adanya "Milik kewirausahaan". Brown dan Jackson berpendapat bahwa "keseimbangan Tiebout bisa menjadi sangat tidak stabil jika semua faktor selalu berpindah-pindah ". Model Tiebout dapat membantu untuk menjelaskan mengapa individu pindah ke tempat yang dapat dikategorikan dengan pajak rendah, dan mengapa pemerintah menyediakan barang publik lokal di suatu wilayah, untuk memenuhi permintaan serupa, meskipun selernya berbeda-beda

b. Tantangan dalam menyediakan Barang Publik

Meskipun barang publik yang sangat diperlukan dalam ekonomi pasar, penyediaan barang-barang publik menyajikan tantangan sulit untuk pasar tersebut. Pasar sangat efisien dalam memproduksi barang swasta karena barang tersebut keduanya rival dalam konsumsi dan dikecualikan. Pasar

mengalami kesulitan mengalokasikan sumber daya untuk produksi barang publik karena barang publik tidak memiliki kedua kualitas ini.

Salah satu cara untuk memahami kesulitan pasar adalah dalam memproduksi barang publik murni adalah untuk mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan pasar untuk secara efektif menghasilkan barang swasta murni dan untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan antara barang publik murni dan swasta dalam mekanisme pasar.

Pasar Persaingan untuk pengalokasian barang yang dikecualikan.

Persaingan dan dikecualikan sangat penting untuk penyediaan pasar barang dari beberapa alasan. Persaingan memungkinkan produsen untuk secara akurat mengukur permintaan produk mereka, dan pengecualian barang publik ini memungkinkan produsen untuk mendapatkan bayaran sendiri untuk barang-barang mereka. Bersama dengan asumsi kepentingan pribadi rasional, menyebabkan efisien dan alokasi optimal dari sumber daya yang ada.

Adam Smith dalam buku klasiknya *The Wealth of Nations* mensugestikan bahwa pasar berlaku seperti tangan tidak terlihat (*invisible hand*) untuk mengkoordinasikan aksi individual. Masing-masing pasar bertindak untuk kepentingannya sendiri untuk menyediakan barang publik. Seperti contoh, tukang roti yang menginginkan kepentingannya sendiri tetapi secara tidak sadar dia membuat roti untuk kebutuhan orang banyak.

Persaingan Pelanggan untuk Mengungkapkan Preferensi

Setiap individu memiliki pilihan yang sedikit untuk mengungkapkan preferensinya sendiri ketika membeli barang persaingan. Dalam hal ini roti adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan barang persaingan dalam konsumsi. Sepotong roti dimakan oleh satu orang yang tidak tersedia untuk dinikmati orang lain. Juga tidak bisa satu orang menikmati rasa roti yang dimakan oleh orang lain. Oleh karena itu, setiap individu menghadapi insentif untuk membuat preferensinya transparan dengan membeli jenis roti yang benar-benar disukai. Dalam hal ini pembuat roti berusaha mencari profit dengan cara membuat berbagai jenis roti yang diinginkan oleh konsumen.

Penyediaan barang publik yang dikecualikan

Pengecualian menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk menggunakan barang tanpa membayar. Insentif kepada pelanggan untuk membayar, atau tanpa ada resiko, memungkinkan para produsen barang yang dikecualikan untuk biaya yang mereka upayakan. Jika roti tidak dibayar, para pembuat roti tidak mampu membeli gandum, ragi, dan bahan-bahan lain untuk membuat roti. Mereka juga tidak mampu membayar untuk membuat roti karena mereka harus menghidupi keluarga mereka. Sementara seorang tukang roti mungkin telah memilih profesi tersebut karena untuk menghidupi keluarga, itu adalah rasional kepentingan diri sendiri dan harapan yang wajar. Jika sifat dari roti ini tidak dikecualikan (dijadikan sebagai barang publik murni), maka produksi roti akan segera berhenti.

a. Kesulitan Menyediakan Barang Publik melalui Pasar

Karena barang publik murni dan barang swasta murni bersifat polar berlawanan, alasan bahwa pasar sangat efektif untuk memberikan barang pribadi adalah alasan yang sama untuk mereka tidak efektif dalam menyediakan barang publik.

b. Membuat *Nonrivalry Insentif*

Preferensi Orang-orang dapat menikmati baik nonrival yang diproduksi untuk tetangga mereka. Oleh karena itu, seseorang mungkin memiliki insentif untuk tidak menyuarakan-nya atau dia benar menghargai barang nonrival yang didanai oleh sukarela sumbangan, seperti musik di taman, untuk menghindari kontribusi. Oleh karena itu, permintaan untuk barang publik mungkin tersembunyi, dan organisasi pasar sukarela dapat memutuskan untuk tidak mencoba untuk menawarkan barang publik yang tidak diinginkan.

c. Membuat *Nonexcludability Insentif* Belum Berkontribusi terhadap Barang Publik

Karakteristik barang publik tidak bisa dipisahkan jika memungkinkan orang tanpa membayar. Hal ini menciptakan barang publik yang insentif untuk menjadi *free rider*. *Free riders* adalah individu yang menikmati tanpa membayar. Berikut ini adalah kedudukan *free-riders* dalam keterkaitannya dengan barang publik:

1. *Free-rider* sebagai sebuah kekurangan dalam dunia manusia.
Fenomena *Free-riders* dapat dilihat sebagai kekuarangan dalam manusia secara alami. David Hume, dalam risalah-Nya pada *Human Nature*, mengamati fenomena *free-riders* di awal 1700-an. Sebagai contoh, jika terdapat padang rumput yang terbuka, sangat dimungkinkan banyak orang yang berlomba-lomba untuk menggunakannya demi kepentingan mereka sendiri misalnya untuk memberi makan ternak mereka secara gratis. Namun, jika orang-orang tersebut dikenakan biaya setiap kali mereka menggunakan padang rumput tersebut, maka setiap orang akan cenderung mengelak dan mencari dalih untuk menyelamatkan diri mereka dari ketetapan biaya tersebut dan akhirnya mereka cenderung melimpahkan beban biaya tersebut pada orang lain. (Hume {1739} 2000, hal 345;.. Musgrave 1999b, hal 38-39).

2. *Free-rider* sebagai Utilitas Rasional yang maksimal.
Menjadi seorang *free-riders* juga konsisten dengan gambaran ekonom rasional bahwa manusia sebagai individu yang memaksimalkan kepuasan. Adalah kepentingan individu terbaik untuk mencari kombinasi barang publik dan swasta yang akan memaksimalkan kesejahteraannya. Karena setiap dolar individu menghabiskan konsumsi akan barang publik hal itu berarti satu dolar akan berkurang ketersediannya

untuk digunakan dalam konsumsi barang pribadi. Hal ini merupakan disinsentif bagi seseorang untuk berkontribusi adil dalam barang publik. Perhatikan contoh sederhana dari sebuah perekonomian di mana hanya ada dua barang: makanan dan pertahanan. Makanan adalah barang pribadi, sedangkan pertahanan adalah barang publik. Individu memiliki dua pilihan untuk menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka pada makanan atau menghabiskan mayoritas pendapatan pada pertahanan nasional. Jika seseorang memberikan kontribusi sebagian besar pendapatannya atau penghasilannya untuk kepentingan publik yakni pertahanan nasional, maka keluarga tersebut akan mengalami penurunan nyata dalam hal pangan namun perbaikan yang lebih baik cenderung tak terlihat dalam tingkat pertahanan nasional. Namun, jika individu yang sama menghabiskan sebagian besar pendapatannya atau penghasilannya pada makanan, pengeluaran pangan yang lebih tinggi akan membuat peningkatan yang nyata dalam hal kesejahteraan pangan keluarga tersebut sementara pengurangan kesejahteraan tak terlihat dalam hal keamanan nasional. Dengan demikian, setiap individu menghadapi godaan untuk menjadi *free-riders* dan cenderung untuk bergantung pada kontribusi orang lain untuk barang umum seperti pertahanan nasional.

3. *Free-rider* Mencegah pareto efisiensi karena barang publik.

Pareto efisiensi tidak tercapai dengan dana sukarela barang publik karena barang publik akan kekurangan dana, jika mereka disediakan secara keseluruhan. Masyarakat secara keseluruhan akan merasa lebih baik dengan perdagangan beberapa barang pribadi untuk penyediaan tingkat yang lebih besar barang publik, tetapi individu tidak memiliki insentif untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh individu terutama dalam hal bertindak secara individual di pasar untuk mengatasi insentif struktural untuk semua warga yang menjadi *free-riders*. Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan barang publik murni melalui mekanisme pasar ditakdirkan untuk adanya kegagalan oleh masalah struktural yang disebabkan oleh sifat *nonrivalry* dan *nonexcludability* barang publik murni

H. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat adalah barang publik mempunyai karakteristik utama yakni tidak dikecualikan dan tanpa persaingan. Setiap orang dapat menikmati barang publik dikarenakan dua karakteristik tersebut. Barang publik sendiri dibedakan menjadi barang publik murni dan barang publik tidak murni.

Konsep dari barang publik tidak murni terletak antara kasus barang swasta dan barang publik, dimana persaingan dalam konsumsi mungkin dapat terjadi, sementara barang publik murni sendiri mengacu pada tidak adanya persaingan dalam mengkonsumsi dan tidak adanya pengecualian. Barang publik tidak murni berisi elemen-elemen dari keduanya, barang publik tidak murni dapat terjadi tanpa persaingan dalam konsumsi, tapi setelah titik/hal tertentu barang- barang ini menjadi padat/banyak, dan kadang-kadang disebut sebagai barang publik padat. Meskipun tidak ada satupun masyarakat yang mau membeli barang publik (efek *free rider*), pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga pajak yang berbeda untuk setiap individu yang berbeda.

Pembayaran tambahan yang harus dibayar individu untuk setiap tambahan unit barang publik itulah yang disebut harga pajak. Selanjutnya dalam hal permintaan untuk barang publik ditemukan dengan menambahkan kurva permintaan secara vertikal. Kurva permintaan menggambarkan kesediaan konsumen untuk membayar harga pajak tertentu untuk suatu kepentingan publik.

I. Studi Kasus

Sumber : Kompas.com (Harian Kompas Online) Minggu, 29 April 2012 diakses pada Selasa, 15 Mei 2012

Air di Jakarta Jadi “PR” Gubernur Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) meminta para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk memperjuangkan masalah air di Jakarta. Pasalnya, air yang seharusnya disediakan untuk publik, justru dikomersilkan. Masalah air jadi pekerjaan rumah (PR) gubernur baru.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta saat ini dianggap menjadi salah satu aktor utama beralihnya air dari *public goods* (barang publik) menjadi *privat goods* (barang pribadi). Dengan itu, hanya orang berduit yang bisa menikmati air bersih. "Air itu hak asasi manusia. Setiap manusia punya hak atas air. Tapi, masalahnya ada ketika air menjadi barang yang *private*, sama seperti bahan bakar minyak. Lebih dari 40 persen rumah warga Jakarta tidak memiliki sambungan air perpipaan ," ujar, Islah, aktivis Wahan Lingkungan Hidup (Walhi), di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (29/4/2012). Dalam acara bertajuk "Tatap Muka Cagub-Cawagub dengan Warga Jakarta: Warga Bertanya Kandidat

Menjawab" dijadwalkan akan dihadiri oleh semua cagub dan cawagub DKI. Namun, tak semua memenuhi undangan tersebut. Hanya calon gubernur DKI independen Hendarji Soepanji yang bersedia hadir dalam acara itu.

Saat ini, kata Islah, warga miskin di Jakarta terpaksa membeli air dengan harga Rp 37 ribu hingga 85 ribu per meter kubik. Hal ini karena Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya seharusnya menjadi representasi negara untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia atas air dan sanitasi, kata dia, telah terjebak dengan kontrak privatisasi.

Hingga akhir 2010 menurut data koalisi ini, PT PAM Jaya telah menanggung akumulasi kerugian senilai Rp 1,3 triliun akibat swastanisasi. "Sudah 25 tahun sejak tahun 1997 Pam Jaya terjebak dengan kontrak. Sehingga air yang seharusnya untuk publik tidak bisa dilaksanakan. Cagub dan Cawagub harus mengembalikan fungsi air untuk publik ini dengan memutus kontrak kerja sama PT PAM Jaya dan mitra swasta," terangnya.

SOLUSI :

Menurut kelompok kami, cara mengatasi permasalahan diatas adalah bagaimana pemerintah mengalokasikan pajak yang dikenakan kepada masyarakat menengah ke atas untuk dapat dialokasikan bagi perbaikan dalam pengelolaan air bersih untuk masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, diharapkan adanya kerjasama antara Pemerintah, pihak pengelola air bersih, serta masyarakat menengah ke atas untuk membantu permasalahan air bersih tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menengah ke bawah tidak terlalu terbebani dengan harus membayar mahal untuk air bersih seolah-olah barang tersebut sebagai barang tersier.

BAB IV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

(SOCIAL WELFARE)

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan bathin. Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakukan oleh manusia. Jangankan yang halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup.

Kesejahteraan adalah hakikat pembangunan yang mencakup bidang kehidupan yang luas. Secara praktis, Semua upaya ini perlu "tindakan" untuk memungkinkan setiap 'orang' agar dapat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan sejahtera.

A. Kebijakan sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik, dan merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, seperti mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Bessant, Watts, Dalton dan Smith: 2006).

Kebijakan dalam kesejahteraan sosial sangat dituntut untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang belum maju (regress) ke pola pikir yang maju (progress). Untuk mengubah itu semua dituntut adanya kebijakan dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah kebijakan publik. Dari konsep kebijakan publik ini dituntut agar pemegang kekuasaan bisa diterima oleh publik apakah itu eksekutif (pemerintah) maupun legislatif (wakil rakyat) agar menjadi pembuat kebijakan (policy makers) yang profesional.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial dan dapat pelayanan sosial dari negara. Sudahkah masyarakat Indonesia sejahtera? Jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Namun apabila dilihat pada undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (1), mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah

dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 di atas, rasanya masyarakat (rakyat) ingin sekali mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran sesuai dengan kata-kata dalam undang-undang tersebut. Jikalau kita meniru negara lain seperti di Jerman yang menganut kebijakan publik redistribusi yakni penganjur praktik negara kesejahteraan (welfare state), masyarakat mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan sosial

Sebagai atribut tingkat kepuasan individu, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan.

Secara generik, pembangunan kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelayanan sistem yang terencana dan berkesinambungan.

Dalam konteks mensejahterakan rakyat telah menjadi perhatian yang universal karena berkaitan dengan hak-hak hidup manusia, sebagaimana telah dilaporkan UNDP menjelang World Summit for Social Development pada Maret 1995 di Copenhagen. Masalah ini mencakup tujuh unsur perlindungan yakni : 1) Perlindungan ekonomi. 2) Perlindungan makanan. 3) Perlindungan kesehatan. 4) Perlindungan lingkungan. 5) Perlindungan sosial. 6) Perlindungan polusi dan 7) Perlindungan pendidikan.

Semua unsur ini berkaitan dengan pembangunan manusia yang mengarah kepada Global Human Security Fund (Boer & Koekkoek:1994). Sejak krisis multidimensi yang mengawali proses reformasi, masalah fundamental ekonomi Indonesia ditandai dengan adanya kesenjangan antar daerah, antar sektor ekonomi, dan antar golongan penduduk. Keadaan ini yang sesungguhnya sudah terjadi sejak awal orde baru, telah memunculkan problema pengangguran, kemiskinan dan ketertinggalan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Mereka adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dampak krisis karena tidak memiliki akses kepada sumber daya

ekonomi, terutama modal, sumber daya alam, teknologi, kesehatan, dan pendidikan, selain tidak mampu berperan serta dalam pembangunan dan kegiatan sosial ekonomi produktif.

Manusia atau angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang normal. Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di Indonesia, sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar rakyat dapat hidup secara layak.

B. Arti Kesejahteraan Sosial

Menurut Segel dan Bruzy (1998:8), “Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.” Sedangkan menurut Midgley (1995:14) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut: Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan bahkan seluruh masyarakat.

Sedangkan Wilensky dan Lebeaux (1965:138) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu dalam pengembangan kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Romanyshyn (1971:3) kesejahteraan sosial dapat mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup penyediaan pertolongan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan kualitas hidup itu meliputi pelayanan-pelayanan sosial bagi individu-individu dan keluarga-keluarga juga usaha-usaha untuk memperkuat atau memperbaiki lembaga-lembaga sosial.

C. Indikator Kesejahteraan Sosial

Menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Lebih jauh, menurut Wikipedia, dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Menurut Wikipedia pula, dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Tak perlu juga melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. Adapun indikator tersebut diantaranya adalah:

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan.

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan

faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan yang mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat.

Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya

manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

ini adalah tiga indikator tentang kesejahteraan sosial. Indikator ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan. Ketiga hal ini diyakini merupakan puncak dari gunung es kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang.

D. Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Membicarakan masalah komunitas, maka kita tidak dapat lepas dari peran pemerintah dalam menciptakan suatu pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pengertian lain juga dapat dikembangkan dari hasil *Pre-Conference Working for the 15th International Conference of Social Welfare* (Sulistiati, 2004: 25) yakni: “Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya”

Pelayanan kesejahteraan sosial adalah semua bentuk kegiatan pelaksana usaha dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara profesional, yang meliputi:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial .
- b. Penyembuhan dan pemulihan sosial
- c. Penyantunan dan penyediaan bantuan sosial.

- d. Pengembangan nilai-nilai, potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- e. Pengorganisasian, pengadministrasian dan pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial.
- f. Perumusan kebijakan dan perencanaan program kesejahteraan sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang dibuat pemerintah meliputi kebijakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Upaya mewujudkan suatu pelayanan kesejahteraan sosial yang baik sangat mungkin untuk menemukan banyak tantangan, terutama pelayanan kesejahteraan di Indonesia sendiri. Tantangan strategik untuk membangun masa depan Indonesia yang sejahtera, meliputi: (1) memelihara integrasi sosial dalam konteks NKRI, (2) memperbaiki kualitas manusia dengan meregulasi semua aspek kehidupan bangsa, (3) memiliki strategi pelaksanaan dengan menempatkan manusia sebagai sumber daya dan mengutamakan pelayanan kemanusiaan secara efisien dan (4) melakukan *audit sosial* berdasarkan masalah nyata dan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.

Pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi

kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

M.Fadhil Nurdin (1986:50), bahwa pelayanan sosial bukan hanya sebagai usaha memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial individu dan keluarga melainkan juga sebagai usaha untuk menjamin berfungsinya kolektivitas seperti kelompok-kelompok sosial, organisasi-organisasi serta masyarakat.

E. Orientasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka menyikapi diterapkannya otonomi daerah, maka orientasi pembangunan kesejahteraan sosial perlu direformulasikan sehingga pelayanan sosial benar-benar dapat berorientasi pada implementasi otonomi daerah. Berkaitan dengan itu, ada 6 paradigma baru pembangunan kesejahteraan social sebagai berikut :

1. Pelayanan yang berorientasi masalah menjadi pelayanan karena pendekatan HAM.

Pelayanan perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah selama ini pada dasarnya hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dan sangat

berorientasi masalah dengan pendekatan selektif. Hal ini tentu saja, karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana untuk melayani semuanya melalui pendekatan universal.

2. **Pendekatan residual menjadi pelayanan pengembangan (*developmental*)**

Ada dua pandangan tentang fungsi pelayanan kesejahteraan sosial sebagai pelayanan residual.

Pandangan yang *pertama* melihat bahwa fungsi pelayanan kesejahteraan sosial adalah fungsi kelembagaan yang secara terus menerus diberikan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan tanpa kecuali (*general well-being*), seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pandangan yang *kedua* melihat bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dilihat sebagai *pelayanan residual*, yaitu pelayanan yang ditujukan kepada kelompok sasaran yang bermasalah bila mana lembaga keluarga, lembaga ekonomi, struktur politik *tidak dapat berfungsi dengan baik* di dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran sehingga tidak dapat dimanfaatkan (*disfungsikan*). Biasanya kelompok ini mengalami permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar yang sangat sulit dipecahkan dan memerlukan waktu cukup

panjang, seperti milasnya penanganan lanjut usia, WTS, anak terlantar, dan lain-lain.

Bila hal ini yang menjadi sasaran pelayanan pekerjaan sosial, maka pelayanan kesejahteraan sosial menjadi kurang berperan. Pelayanan kesejahteraan sosial tidak akan berkembang dan permasalahan sosial akan semakin kompleks karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan, maka pelayanan pekerjaan sosial harus mengarahkan pelayanan pada pelayanan pengembangan (*developmental*), misalnya pengembangan potensi-potensi kepemudaan, pengembangan potensi lingkungan melalui pengembangan potensi sumber daya lingkungan, pengkajian dampak lingkungan sosial, penyusunan standarisasi penyelenggaraan dan pengembangan panti sosial, dan lain-lain yang sifatnya *developmental*. Pelayanan itu berada di hulu bukan di hilir.

3. Pelayanan yang bersifat lokalistik menjadi pelayanan yang komprehensif.

Ada kesan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial selama ini terkesan sangat berskala mikro, seperti pelayanan terhadap lanjut usia, wanita rawan sosial, wanita tuna susila, dan lain-lain. Penanganan-penanganan terhadap masalah ini sangat

sektoral, kurang melibatkan instansi terkait. Sesuai dengan perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat, maka untuk masa-masa yang akan datang pelayanan kesejahteraan sosial perlu diarahkan kepada pelayanan-pelayanan yang berskala luas (*makro*). Pelayanan-pelayanan yang dikembangkan jangan hanya pelayanan yang bersifat sektoral semata, tetapi harus bersifat lintas sektoral dengan disiplin/instansi terkait tanpa meninggalkan fungsi substansi pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial harus dapat berperan sebagai liding sektor yang dapat mengkoordinir disiplin terkait untuk terlibat, seperti dalam penanganan anak jalanan, narkotika, kemiskinan, HAM dan lain-lain.

4. Pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik (*bottom-up*)

Dengan digulirkannya otonomi daerah melalui UU No. 32 /2004, maka peranan pelayanan kesejahteraan sosial berubah dari yang selama ini diterapkan melalui pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik. Melalui pendekatan sentralistik memang kurang dapat menampung aspirasi dan nilai-nilai serta kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat. Kurang dapat menyentuh persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Banyak terjadi benturan-

benturan baik dari segi pelayanan, kebutuhan, tindakan dan lain-lain. Sehingga tidak jarang terjadinya kegagalan suatu pelayanan atau bantuan yang diberikan karena kurang sesuai dengan yang diharapkan atau kebutuhan. Untuk masa yang akan datang, maka pelayanan kesejahteraan sosial harus menerapkan pendekatan desentralistik (*bottom up*). Pusat-pusat pelayanan masyarakat berada pada daerah masing-masing. Pekerja atau petugas sosial dalam memberikan pelayanan, perencanaannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai serta karakter masyarakat setempat.

5. Pendekatan negara sejahtera menjadi masyarakat sejahtera

Pada awalnya pelayanan kesejahteraan sosial dimulai dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan negara kesejahteraan. Dalam pandangan ini kesejahteraan masyarakat atau individu diukur dari tingkat keberhasilan negara, seperti PDB. Pendekatan negara sejahtera di atas sudah kurang relevan dengan perkembangan sekarang ini dan sangat bertentangan dengan hak-hak azasi manusia. Hasil karya dan kreativitas orang lain kurang mendapat penghargaan. Oleh karena itu, dengan digulirkannya

otonomi daerah maka pendekatan *negara sejahtera* berubah menjadi pendekatan *masyarakat sejahtera*. Dalam pendekatan ini, peranan pemerintah menjadi semakin kecil, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator masyarakat agar masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

6. Pendekatan modal ekonomi menjadi modal sosial (*social capital*).

Upaya-upaya pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat selama ini sangat mengandalkan modal ekonomi melalui anggaran pemerintah, kurang dapat melibatkan kemampuan masyarakat. Alhasil, banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi yang sangat terbatas. Sementara di satu sisi permasalahan sosial semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Bila pelayanan sosial hanya mengandalkan kemampuan pemerintah atau modal ekonomi niscaya bahwa permasalahan sosial tidak akan tertangani.

Didasarkan pada pengalaman ini, untuk masa yang akan datang pelayanan sosial harus diupayakan melalui pemanfaatan modal sosial (*social capital*). Apa yang dimaksud dengan modal sosial adalah bahwa pelayanan sosial yang diberikan dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan potensi-potensi yang ada pada masyarakat.

F. Metode dan Teknik

Beberapa metode dalam pelayanan kesejahteraan sosial (pekerjaan sosial) yang dapat diterapkan, antara lain:

a. Bimbingan sosial / terapi individu.

Metode bimbingan sosial individu ditujukan kepada PMKS (Pelayanan Masyarakat Kesejahteraan Sosial) yang bersifat individual yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara pekerja/petugas sosial dengan PMKS.

Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat mengganggu terhambatnya proses pelayanan. Selanjutnya proses konsultasi dilakukan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah PMKS dan kehidupan yang sedang di jalannya. Dalam metode ini pekerja/petugas sosial

dituntut untuk dapat mendorong para PMKS untuk mengungkapkan masalah-masalahnya baik yang bersifat individu maupun masalah-masalah lainnya seperti masalah keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu, pekerja/petugas sosial juga dituntut untuk dapat memfasilitasi para PMKS didalam mencari berbagai alternatif dan solusi pemecahannya.

b. Bimbingan sosial / terapi kelompok.

Bimbingan sosial/ terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media terapi bagi PMKS. Diharapkan dari media ini para PMKS akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari adanya interaksi antara para PMKS dengan kelompok. Dalam metode ini pekerja sosial menciptakan berbagai kelompok dan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan para PMKS. Dalam proses kegiatan kelompok ini diharapkan pekerja/petugas sosial mampu memberikan penguatan terhadap sikap dan perilaku para PMKS yang positif yang dapat mendorong para PMKS untuk berupaya memecahkan masalahnya. Tujuan terapi kelompok ini antara lain merupakan media pertukaran informasi.

c. Bimbingan Sosial Komunitas

Metoda bimbingan sosial komunitas ini menggunakan kehidupan dan interaksi komunitas yang menjadi lingkungan sosial para PMKS dalam proses pelayanan. Melalui penerapan metoda ini lingkungan komunitas perlu disadarkan sehingga dapat menerima dan mendukung kehadiran dan penanganan permasalahan para PMKS. Karena itu, dalam metoda ini diharapkan pekerja/petugas sosial dapat menyiapkan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk dapat menerima kehadiran dan permasalahan para PMKS. Di samping itu, pekerja/petugas sosial perlu memotivasi para PMKS untuk dapat menerima dan hidup bersama dengan lingkungannya. Bimbingan sosial komunitas ini merupakan metode yang bersifat komprehensif yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatoris dan untuk mempersatukan seluruh segmen masyarakat dalam penanganan permasalahan para PMKS.

d. Penelitian Sosial

Metoda penelitian sosial merupakan suatu upaya untuk menemukan, menggali, mengkaji perbagai eksistensi permasalahan sosial yang sesungguhnya, sehingga ditekan

fakta yang sebenarnya pentang permasalahan tersebut. Suatu tindak pelayanan (apakah berupa kebijakan, program dan kegiatan) yang dilakukan hendaknya diawali dengan kegiatan penelitian sosial.

Dalam proses seperti ini, tindakan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, bukan kebutuhan perumus program atau pembuat kebijakan. Namun, dalam kenyataannya, metoda ini belum sepenuhnya dilakukan berbagai hasil penelitian yang sudah dihasilkan belum diterapkan. Banyak faktor yang menjadi kendala penerapannya, seperti: faktor kualitas penelitian yang dihasilkan, faktor kurangnya pemahaman terhadap hasil penelitian, faktor komitmen para pengguna, faktor terbatasnya sosialisasi hasil penelitian, faktor keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya.

e. Administrasi Sosial.

Metoda administrasi sosial merupakan tindakan perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengevaluasian berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial. Banyak pihak yang melihat bahwa kegiatan administrasi sosial hanya dalam arti sempit, seperti: pencatatan, pengadministrasian surat menyurat, pelaporan dan yang terkait dengan itu.

Administrasi sosial dipandang sebagai kegiatan pendukung dalam proses pelayanan sosial tersebut sehingga kurang mendapat perhatian yang serius.

Sesungguhnya bahwa administrasi sosial merupakan tindakan bagaimana merumuskan program dan kegiatan yang strategis, mendasar dan dapat mempengaruhi persoalan-persoalan sekundernya. Bukan pekerjaan yang mudah, tetapi diperlukan ketajaman analisis dan penerapan hasil-hasil penelitian yang relevan. Bila sudah dirumuskan bagaimana pengorganisasiannya, siapa yang terlibat, apa tugas dan tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan. Rencana yang sudah disusun harus dilaksanakan, bagaimana proses dan tahapannya, apa saran dan prasaran yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengukur keberhasilannya melalui tindakan evaluasi, kemudian menyempurnakannya.

f. Aksi Sosial

Metoda aksi sosial dapat diartikan dari dua hal yaitu: sebagai tindakan pelaksanaan suatu program atau kegiatan dan sebagai tindakan suatu aksi (demonstrasi) dari sekelompok orang yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mempengaruhi perubahan suatu kebijakan yang ada.

Kenyatannya menunjukkan bahwa metoda aksi sosial dalam bentuk tindakan aksi (demonstrasi) sangat efektif dalam perubahan kebijakan dibandingkan dengan metoda atau pendekatan lainnya, seperti diskusi, seminar, dan lain-lain.

Banyak teknik yang dapat diterapkan dalam pelayanan kesejahteraan sosial, beberapa di antaranya adalah:

- 1) *Berbicara/berkomunikasi*, yaitu kemampuan seorang pekerja/petugas untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan PMKS. Seorang pekerja/petugas sosial harus mempengaruhi seorang PMKS yang menjadi sasaran pelayanan.
- 2) *Memotivasi*, yaitu kemampuan memberikan dorongan dan mempengaruhi semangat dan kemauan kelompok sasaran sehingga mau melaksanakan apa yang disampaikan. Pekerja/petugas tidak semata-mata hanya mampu berkomunikasi dengan baik, tetapi harus mampu untuk memotivasi kelompok sasaran sehingga mau terlibat dalam penanganan permasalahan yang dihadapi.
- 3) *Timing*, yaitu kemampuan untuk menyusun atau mengatur jadwal serta manage waktu pelaksanaan pelayanan sesuai dengan permasalahan kelompok sasaran.

- 4) *Focus*, yaitu kemampuan untuk menemukan apa yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi kelompok sasaran.
- 5) *Diferensial Diagnosis*, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga seorang pekerja/petugas sosial memiliki pemahaman yang luas dan objektif terhadap masalah tersebut, bukan pemahaman yang sempit dalam melihat masalah tersebut. Tidak lah mudah untuk melakukan seperti ini, tetapi perlu pemahaman dan wawasan yang luas tentang materi atau masalah tersebut.
- 6) *Partialization*, yaitu kemampuan untuk memilih-milah masalah sehingga mudah dipahami. Ini penting dilakukan oleh seorang pekerja/petugas sosial sehingga kelompok sasaran mudah menangkap apa pesan yang sesungguhnya, bagaimana melakukannya tetapi tidak menjadi membingungkan.
- 7) *Observasi*, yaitu kemampuan untuk mengenali masalah yang terjadi dan untuk mengamati apa yang terjadi. Pengamatan seperti ini penting untuk melihat sejauh permasalahan yang sebenarnya, seperti kondisi lingkungan sosial yang ada.

- 8) *Evaluasi*, yaitu kemampuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelayanan yang sudah dilakukan.

Indikator keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial pada hakekatnya dapat dilihat dari tingkat keberfungsian sosial kelompok sasaran yang dilayani, yang meliputi 3 hal yaitu, keberfungsian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, keberfungsian dalam mengatasi masalah yang terjadi, dan keberfungsian dalam menampilkan peranan sosialnya.

G. Kasus Dan Pembahasan

a. Kasus

Kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM baru akan dimulai 1 April mendatang. Tapi dampaknya sudah terasa sekarang. Harga-harga berbagai kebutuhan pokok naik. Padahal belum disetujui DPR. Demikian informasi yang dirangkum SCTV, Kamis (8/3).

Pemerintah memang mau tak mau mengusulkan kenaikan harga BBM. Sebab jika tidak biaya subsidi bakal melonjak menjadi Rp 191 triliun tahun ini. Perubahan harga ini dipicu harga minyak mentah yang mencapai US\$ 118 dollar per barrel. Kalau ada kenaikan BBM pasti itu pilihan terakhir, pilihan yang pahit.

Persoalannya adalah sekarang bagaimana agar masyarakat yang terkena dampak itu kita lindungi buruh, petani, nelayan, masyarakat rentan, UMKM," tutur Menko Perekonomian Hatta Radjasa .

Menyikapi situasi ini pemerintah menyatakan memiliki program untuk menekan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin. Kompensasi ini nantinya akan berupa bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 150 ribu per keluarga. Dana dibagikan untuk 18 setengah juta keluarga miskin dengan anggaran Rp 25,6 triliun.

Kedua berupa tambahan subsidi beras miskin selama dua bulan. Anggarannya sebesar Rp 5,3 triliun. Ketiga subsidi berupa penambahan jumlah beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin dengan anggaran Rp 3,4 triliun. Kemudian keempat subsidi bagi angkutan umum massal seperti kapal penumpang, kereta api, serta bus umum sebesar Rp 5 triliun.

Pengamat Ekonomi Didik J. Rachbini menilai bengkaknya subsidi BBM saat ini adalah buah dari lemahnya peran negara menentukan alokasi anggaran. "Karena salah kaprah dalam kebijakan BBM yang ragu-ragu atau momentumnya hilang. Dan salah kaprah

APBN-nya menjadi hancur dan tidak mempunyai kapasitas untuk membangun infrastruktur," jelas Didik.(AIS)

b. Pembahasan

Kasus diatas merupakan contoh dari kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akibat dari kenaikan harga minyak sedunia merupakan suatu kebijakan yang memberi dampak sangat luas namun dampak yang paling besar dirasakan oleh rakyat miskin. Tidak sedikit dari masyarakat yang menolak kebijakan tersebut dan memberi dampak luar biasa bagi masyarakat, contohnya aksi demo dan kecaman dimana-mana. Mungkin masyarakat menengah dan menengah ke bawah yang paling merasakan dampak negatifnya. Kebijakan pemerintah tersebut membuat mereka harus berpikir lebih keras lagi untuk mengelola keuangan terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pemerintah tidak begitu saja membuat kebijakan tanpa mpedulikan efeknya, apalagi kebijakan ini menyangkut masyarakat luas. Oleh karena itu pemerintah menjanjikan untuk memberikan sejumlah kompensasi kepada rakyat miskin seperti kompensasi

berupa bantuan uang, subsidi beras miskin yang biasa disebut dengan raskin, beasiswa, dan subsidi untuk angkutan umum. Kompensasi tersebut merupakan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat agar masyarakat tidak terlalu menderita dengan adanya kebijakan kenaikan BBM.

Salah satu metode yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial akibat kenaikan BBM, yaitu bimbingan sosial komunitas. Melalui penerapan metoda ini lingkungan komunitas perlu disadarkan sehingga dapat menerima dan mendukung kehadiran dan penanganan permasalahan rakyat yang kurang beruntung akibat implementasi kebijakan. Karena itu, dalam metoda ini diharapkan pemerintah dapat menyiapkan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk dapat menerima kehadiran dan permasalahan rakyat, contohnya dengan menyiapkan berbagai macam kompensasi. Selain itu pemerintah juga harus mensosialisasikan terlebih dahulu tentang rencana kebijakan kenaikan BBM, agar masyarakat terutama komunitas rakyat menengah dan menengah kebawah dapat melakukan persiapan, sehingga tidak ada

kesalahpahaman antara pemerintah dan rakyat. Bimbingan sosial komunitas ini merupakan metode yang bersifat komprehensif yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, sehingga cock digunakan dalam kasus kenaikan BBM saat ini.

Namun selain pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat kecil pemerintah juga perlu untuk membangkitkan masyarakat untuk mengembangkan potensinya agar terciptanya masyarakat mandiri yang dapat menciptakan suatu pekerjaan yang inovatif sehingga jumlah rakyat miskin di Indonesia dapat berkurang. Mengurangi konsumsi bahan bakar minyak juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi polusi dan menghemat biaya pengeluaran ,pemerintah bisa mensosialisasikan suatu acara seperti *car free day* agar konsumsi bahan bakar minyak bisa diminimalisir.

H. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

Kebijakan menurut Ealau dan Pewitt (1973), adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Sedangkan Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah semua bentuk kegiatan pelaksana usaha dan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara profesional

b. Saran

Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa istilah penting utamanya dalam ekonomi publik. Berikut beberapa terminologi penting tentang ekonomi pada sektor publik.

- 1) Pengeluaran pemerintah juga merupakan sebuah aktivitas penggunaan uang guna melaksanakan fungsi-fungsi dari pemerintah atau dalam arti lain adalah penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

- 2) Menyikapi masalah mengenai implementasi kebijakan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial tentunya tidak dapat lepas dari pemerintah. Oleh karena itu saran bagi pembuat kebijakan adalah agar selalu memikirkan dengan baik-baik komunitas manakah yang paling dirugikan dalam penerapan kebijakan tersebut. Apabila telah memutuskan untuk menerapkan isi kebijakan, maka pembuat kebijakan harus memberikan solusi bagi komunitas yang kurang diuntungkan. Sehingga pada implementasinya tidak menimbulkan banyak aksi protes

DAFTAR PUSTAKA

Aroef, Matthian. 2009. Grand Techno-Economic Strategy Bandung: PT Mizan Pustaka.

Prasetya, Ferry. 2010. Teori Pengeluaran pemerintah. Malang: Universitas Brawijaya

(<http://medinaayesha.blogspot.com/2013/06/teknik-analisis-biaya-manfaat-atau-cba.html>)

(<https://sidikpunya.wordpress.com/analisa-biaya-dan-manfaat/>)

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta : UGM Press.

Mangkoesebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE.

Mishan, E. J. and Easton Quah. 2007. Cost Benefit Analysis, 5 th edition. Newyork : Routledge.

Pearce, David W.. 2008. "Cost- Benefit Analysis" dalam Kuper, Adam, Jessica Kuper. 2008. Ensiklopedi Ilmu- Ilmu Sosial. Jakarta:Rajawali.

Rosen,HS (1999). Publicc Finance,5 th Edition.Singapore Mc.Graw-Hill

- jafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Niaga Swadaya.
- Sugiyono, Agus.2001. “Makalah Ekonomi Publik: Analisis Manfaat dan Biaya Sosial”. Dalam situs <http://sugiyono.webs.com/paper/p0103.pdf> diakses tanggal 15 November 2012 pukul 19.30.
- Arens, Alvin A., dan James K. Loebbecke. 2007. *Auditing dan Pendekatan Verifikasi :Pendekatan Terpadu*, Edisi Indonesia, Indeks: Jakarta
- Daft, L. Richard. 2009. *Management*, Edisi Keenam, Salemba Empat: Jakarta
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat, Salemba Empat: Jakarta
- Hansen, Don R dan Marynne M. Mowen. 2007. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Tujuh, Erlangga: Jakarta
- Haripratiwi, Ika.2006. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada BMT AL Ikhlas Yogyakarta*: Yogyakarta
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta

- Palenita, Hefdayana.2008. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Rumah Sakit Hosana Medica Pratama.*
- Singleton, Hall. 2009. *Audit Teknologi Informasi dan Assurance.* Edisi Kedua, Salemba Empat: Jakarta
- Stice dan Skousen. 2009. *Akuntansi Intermediate.* Edisi 16, Salemba Empat: Jakarta
- Dimiyati. Tjutju. 2003. *Operations Research Model – model Pengambilan Keputusan,* Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Handoko.1997. *Dasar – dasar Manajemen Produksi Dan Operasi.* BPFE, Yogyakarta.
- Hamdy Taha, *Operation Research An Introduction,* Edisi 4, Macmillan, New York
- Richard Bronson, *Theory and Problem of Operation Research ,* McGraw-Hill, Singapore.
- Subagyo Pangestu. 2000. Marwan Asri, dan T. Hani Handoko. *Dasar-Dasar Operation Research,* Yogyakarta: PT. BPFE-Yogyakarta.
- Aminudin, *Prinsip-Prinsip Riset Operasi,* Erlangga, 2005
- Yulian Zamit, *Manajemen Kuantitatif,* BPFE, Yogyakarta

Eddy Herjanto, 2003. *Manajemen Produksi dan Operasi*, Edisi Kedua Grasindo. Jakarta

Indrio Gitosudarmo, 2002. *Manajemen Operasi*. BPFE-Yogyakarta

Heizer. J & Render B, 2004. *Operations Management*, Seventh Edition (IE) Prentice Hall. USA.

Munjiati Munawaraoh, dkk., 2004. *Manajemen Operasi*. Unit Penerbitan Fakultas Ekonomi. (UPFE-UMY) Yogyakarta.

(<http://medinaayesha.blogspot.com/2013/06/teknik-analisis-biaya-manfaat-atau-cba.html>)

(<https://sidikpunya.wordpress.com/analisa-biaya-dan-manfaat/>)

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta : UGM Press.

Mangkoesebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE.

Mishan, E. J. and Easton Quah. 2007. Cost Benefit Analysis, 5 th edition. Newyork : Routledge.

- Pearce, David W.. 2008.“Cost- Benefit Analysis” dalam Kuper, Adam, Jessica Kuper. 2008. Ensiklopedi Ilmu- Ilmu Sosial. Jakarta:Rajawali.
- Sjafrizal. 2008.Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta : Niaga Swadaya.
- Sugiyono, Agus.2001. “Makalah Ekonomi Publik: Analisis Manfaat dan Biaya Sosial”. Dalam situs <http://sugiyono.webs.com/paper/p0103.pdf> diakses tanggal <http://medinaayesha.blogspot.com/2013/06/teknik-analisis-biaya-manfaat-atau-cba.html>
- (<https://sidikpunya.wordpress.com/analisa-biaya-dan-manfaat/>)
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta : UGM Press.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE.
- Mishan, E. J. and Easton Quah. 2007. Cost Benefit Analysis, 5 th edition. Newyork : Routledge.
- Pearce, David W.. 2008.“Cost- Benefit Analysis” dalam Kuper, Adam, Jessica Kuper. 2008. Ensiklopedi Ilmu- Ilmu Sosial. Jakarta:Rajawali.

Rosen, HS (1999). *Public Finance*, 5th Edition. Singapore Mc.Graw-Hill

jafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Niaga Swadaya.

Sugiyono, Agus. 2001. "Makalah Ekonomi Publik: Analisis Manfaat dan Biaya Sosial". Dalam situs [http : // sugiyono . webs . com / paper /p0103.pdf](http://sugiyono.webs.com/paper/p0103.pdf) diakses tanggal 15 November 2012 pukul 19.30.

N, David & Hyman. *Public Finance*. Sixth edition

Richard A. Musgrave and Alan T. Peacock (New York: St. Martin's Press, 1967), 168B76. Lindahl's article was originally published in 1919.

Hindriks, Jean & Myles, Gareth. 2004. *Hindriks-Intermediate Public Economics- 2004.pdf*.

Howard, Michael. 2001. *Public Sector Economics Howard.pdf*. Jamaica: University Of The West Indies Press

Myles, Gareth D. 2002. *Public_Economics Myles.pdf*. United Kingdom : Cambridge Univesity Press

Robbins, Donijo. 2005. *Public Sector Economics By Donijo Robbins.pdf*. Grand Rapids, Michigan : Grand Valley State University

Smith A. *Wealth of Nations*. Amherst, NY: Prometheus Books, 1991, originally written in 1776.

Musgrave RA. *Public Finance in a Democratic Society*. New York, University Press, 1986.

Musgrave RA. The nature of the fiscal state: the roots of my thinking, In *Public Finance and Public Choice: Two Contrasting*

Musgrave RA. *The Theory of Public Finance*, New York: McGraw-Hill, 1959.

Musgrave RA. Fiscal tasks, In *Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State*, Buchanan JM, Musgrave

www.kompas.com Unknown. “*public finance.pdf*”

LAMPIRAN I



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**MATA KULIAH ANALISIS KEUANGAN PERTAHANAN
MATERI : SOCIAL WELFARE**

TEMA : BANTUAN PANGAN NON TUNAI

Pembimbing : Kol Chb (k) Dr. Sundari, SE., MM.

OLEH :

ANDHIKA AL FATHANAH	NPM. 120170203003
CITRA PERTIWI	NPM. 120170203005
DONY SETIAWAN	NPM. 120170203008
EDWIN AULIA RAHMAN	NPM. 120170203009
ELESMI HANI	NPM. 120170203011
KELIK UMAR SUMAJI	NPM. 120170203013

**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
BOGOR
2018**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

A. Pendahuluan

Negara dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Maka dari itu Pemerintah sebagai lembaga yang merepresentasikan suatu Negara melakukan proses pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan proses industrialisasi yang dipercaya sebagai cara tercepat untuk mendapatkan kesejahteraan kepada warga negara. Salah satu kajian teoritis terkait hal ini adalah Negara Kesejahteraan atau *Welfare State*. Andersen, J. G. (2012) menyatakan bahwa *Welfare State* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk:

- a. Memastikan setiap negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai standar kelayakan;
- b. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi;
- c. Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Dari definisi tersebut diketahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Terlepas dari masih adanya perdebatan tentang perlu atau tidaknya kehadiran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pihak yang berseberangan tersebut berpendapat bahwa Negara tidak perlu ada dalam proses ekonomi, dan biarkan mekanisme pasar bekerja sepenuhnya dalam perekonomian. Jadi konsep Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* berupaya mengukur sejauh mana inter relasi antara perangkat negara (*State*), individu dan komunitas masyarakat (*Social*), serta sektor usaha (*Market/Corporation*), dalam tata kelola suatu negara.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep ini, hal ini terlihat pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan nasional Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu ciri Negara Kesejahteraan atau *Welfare State* adalah adanya jaminan sosial yang diciptakan oleh negara. Indonesia mendefinisikan jaminan sosial pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai seluruh sistem perlindungan dan



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini diluncurkan sebagai pengganti program sebelumnya yaitu program pemberian beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang kemudian berubah nama menjadi beras sejahtera (Rastra). Program BPNT dilakukan dengan semangat untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif. Sasaran dari program ini adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran BPNT adalah sebesar Rp110.000/KPM/Bulan, yang tidak dapat diambil tunai namun hanya bisa ditukarkan dengan besar dan/atau telur. Bantuan dapat disisakan dan akan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas pangan berupa beras dan telur berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan evaluasi.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- c. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM;
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Dalam jangka panjang, penyaluran BPNT diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Manfaat program BPNT dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- c. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Penyaluran BPNT dilakukan dengan menggunakan sistem perbankan untuk dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penyaluran BPNT mulai dilakukan pada tahun 2017 pada 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Secara bertahap BPNT akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. (Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai).

Dalam pelaksanaannya, karena relatif baru dan melibatkan transaksi yang terintegrasi dengan sistem perbankan maka diperlukan beberapa langkah antara lain adanya koordinasi antara para pihak - pihak pelaksana mulai dari pemerintah (mulai dari Kementerian/Lembaga terkait mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat terkecil di daerah), sektor perbankan, dan pedagang dan/atau pihak lain sebagai penyalur. Selain itu diperlukan juga proses edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Serta persiapan teknis lainnya yang melibatkan proses registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima,



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

proses penyaluran, pemanfaatan, dan jika terdapat kejadian khusus misalnya perubahan kondisi KPM di tahun berjalan.

Dari uraian diatas diketahui bahwa peran database KPM sebagai sasaran program, dan database agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi *e-warong* penyalur BPNT menjadi sangat krusial terhadap keefektifan program ini. Dan kehandalan database tersebut memerlukan adanya komitmen yang besar dari para pelaksana. Sebagai gambaran berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial per 14 Juni 2017, sampai saat ini jumlah *e-warong* yang terdaftar hanya tersebar pada 16 provinsi.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan keuangan inklusif yng merupakan respon atas pelayanan kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil kelas bawah dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dipilih dengan cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

disusun bersama antara Bank Indonesia , kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional keuangan Inklusif. Salah satunya dengan menggelontorkan program penanggulangan fakir miskin (PPFM) berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) yang terdiri dari bantuan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok rumah tangga. Semenjak diprakarsai pada tahun 2017 skema BPNT telah diujicobakan di beberapa kabupaten/kota sehingga mendapatkan apresiasi pemerintah untuk terus dilanjutkan pada tahun 2018 meski dikombinasikan dengan RASTRA (Beras Sejahtera) bagi Kabupaten/Kota yang belum ditunjuk sebagai pelaksana BPNT.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, dengan menggunakan sistem perbankan. Bantuan pangan non tunai diharapkan merubah pola bantuan langsung berupa barang yang selama ini dilakukan dengan menggandeng



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Badan Urusan Logistik (BULOG) menjadi pola bantuan pangan non tunai dengan memberdayakan pedagang pangan atau e-warung KUBE PKH. Bantuan pangan non tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dalam bentuk kartu bantuan pangan non tunai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan bantuan pada toko resmi yang ditunjuk oleh pemerintah guna mendapatkan barang bantuan pada e-warung, KUBE PKH yang bekerja sama dengan HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) yakni Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Guna menunjang bantuan tersebut ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan bantuan langsung non tunai diantaranya :

1. Pendataan

Data merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu (DT) Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. Sehingga rujukan data BPNT menggunakan data yang dikembangkan dari basis data terpadu (BDT) yang memuat data rumah



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

tangga maupun individu dengan kondisi kesejahteraan rendah. Namun data penduduk miskin selalu dinamis yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat selalu berubah sehingga diperlukan updating dan validasi data penduduk miskin setiap tahun untuk mengantisipasi perubahan data. Untuk itu diperlukan dukungan kepastian dan keandalan data secara terus menerus.

2. Pendampingan

Implementasi sebuah program turut dipengaruhi oleh upaya pendampingan. Upaya ini dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan Tim Koordinasi Rastra yang didukung oleh Koordinator Kota PKH (Korkot PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bawah pembinaan Dinas Sosial yang berperan dalam melakukan pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Pendampingan juga harus disertai dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pendamping program sehingga bantuan dapat terselenggara dan tepat sasaran.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM nantinya dapat menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan bahan pangan. Penggunaan kartu BPNT harus didukung oleh ketersediaan jaringan yang memadai. Masyarakat penerima juga harus familiar menggunakan teknologi kartu BPNT guna melakukan transaksinya pada e-warong resmi yang telah ditunjuk.

4. Kesiapan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pemerintah harus memastikan bahwa dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program BPNT memadai. Pemerintah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi juga harus mengalokasikan dana bersumber dari APBDes, APBD serta APBN yang dibutuhkan guna menyalurkan bantuan serta melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas sehingga program dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yakni Memberikan pemahaman kepada para pemangku



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai, Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai serta Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

5. Sarana Prasarana

Faktor lainnya yakni melakukan kerjasama dengan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya e-warong (elektronik Warung Gotong Royong) untuk menyediakan akses bagi pencairan BPNT serta memperbesar titik distribusi untuk memudahkan masyarakat hingga memudahkan dukungan penyediaan peralatan yang memadai untuk menjamin kelancaran hingga menjaga pasokan bahan pokok yang dibutuhkan untuk usaha memaksimalkan pencairan bantuan.



C. PEMBAHASAN

Salah satu indikator kesejahteraan adalah jumlah dan pemerataan pendapatan. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Ada banyak cara mengukur distribusi pendapatan. Salah satu caranya adalah dengan melihat distribusi pendapatan adalah dengan melihat seberapa banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pengeluaran yang dianggap perlu untuk dipenuhi agar memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Kebutuhan yang dipenuhi adalah kebutuhan makanan dan non makanan yang dihitung secara rata-rata dalam sebulannya. Dalam praktiknya, garis kemiskinan di negara maju lebih tinggi (mahal) daripada di negara berkembang. Dalam suatu negara, misalnya di Indonesia, garis kemiskinan juga dibedakan lagi menjadi garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Dan garis kemiskinan di setiap daerah atau provinsi pun akan berbeda-beda karena standar kebutuhan hidupnya berbeda.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), garis kemiskinan (GK) diperoleh dari penjumlahan GK makanan dan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Instrumen yang digunakan untuk melakukan distribusi pendapatan pemerintah memanfaatkan pajak dan subsidi. Subsidi adalah kebijakan yang digunakan untuk melakukan redistribusi pendapatan dengan menambahkan daya ekonomi pada golongan tertentu. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

rumah tangga untuk menyediakan atau mengkonsumsi suatu barang (komoditas). Tidak seperti barang publik, subsidi tidak dikonsumsi atau diterima oleh setiap orang (Samuelson & Nordhaus, 2002).

Subsidi yang baik adalah subsidi yang diberikan pada target (individu/keluarga/unit usaha) yang pantas untuk menerima subsidi. Subsidi yang dimaksud di sini adalah subsidi yang bukan diberikan atau melekat pada komoditas. Jika diberikan pada komoditas maka siapapun yang mengkonsumsi komoditas tersebut akan menerima subsidi, padahal di sisi prakteknya bisa jadi yang mengkonsumsi barang tersebut adalah pihak yang tidak pantas menerima subsidi.

Subsidi bisa diterapkan dengan berbagai cara, diantaranya adalah :

- a. Melalui Bantuan Langsung Tunai.
- b. Pemberian kupon untuk mendapatkan sejumlah komoditas tertentu, misalnya kupon untuk pembelian beras.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Pemberian kupon ini terbagi menjadi dua cara :

1. Kondisi di mana kupon yang didapatkan boleh diperjualbelikan.
2. Kondisi di mana kupon yang didapatkan ada larangan untuk diperjualbelikan.

c. Pemberian diskon pada komoditas tertentu.

Dalam pengalaman di Indonesia, ada dukungan publik yang kuat terhadap adanya kebijakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung kepada 40 persen penduduk termiskin. Menurut hasil survey LSI seperti yang dilaporkan World Bank pada tahun 2016, ketika ditanya tentang penyebab utama kemiskinan, 57% responden menyebutkan alasan eksternal yang berada di luar kendali individu, seperti yang berasal dari keluarga miskin (22%) atau memiliki nasib buruk (16%). Hampir separuh dari semua responden mendukung program perlindungan sosial sebagai ukuran kebijakan utama untuk mengatasi kesenjangan di dalam masyarakat. Contoh dari program perlindungan sosial antara lain adalah beras bersubsidi (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan keuangan bagi siswa miskin (BSM), dan asuransi kesehatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

yang dikenal sebagai BPJS (World Bank, 2016).

Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Rastra (Beras sejahtera) diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan). Secara spesifik Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

berdampak bagi kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada (Ratas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016) untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program penyaluran bantuan sosial dan subsidi, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melaluisistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabungserta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada bulan Januari 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha eceran, serta dukungan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2017, juga akan dilaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai di beberapa Kabupaten untuk menguji cobakan daerah perdesaan. Beberapa indikator yang perlu diujicobakan antara lain berupa mekanisme pelaksanaan dan kesiapan teknologi. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan bahan pangan melalui e-warung, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Penerima Manfaat Bantuan Pangan



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Non Tunai adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaa

Pagu Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai merupakan besaran jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi Pagu Bantuan Pangan Non Tunai Nasional. Pagu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi merupakan jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai di setiap provinsi. Pagu Bantuan Pangan Non Tunai untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Pagu Penerima Bantuan Pangan Kota merupakan jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai di setiap kota. Pagu Bantuan Pangan Non Tunai untuk setiap kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

pagu provinsi. Pemerintah kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Bantuan Pangan Non Tunai bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dilaksanakan secara masif bertahap mulai Januari 2018. Tahun depan, ada 98 kota dan 118 kabupaten di Indonesia akan mendapat bantuan jenis ini. Para penerimanya, tidak dapat mencairkan bantuan yang diberikan ke dalam bentuk uang tunai, 10 juta warga miskin yang sebelumnya menerima beras rastra sudah bisa dikonversi menjadi penerima BPNT. Ada 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima BPNT tahun depan dari target 15,6 juta keluarga penerima manfaat. Target penyaluran BPNT kepada 10 juta keluarga pun dilakukan bertahap sampai Agustus 2018. Sedangkan sisanya 5,6 juta keluarga diharapkan bisa tercapai juga di 2018 dan jika tidak maka dilanjutkan di 2019. Pada Januari 2018 diperkirakan ada 4 juta keluarga yang sudah bisa menerima BPNT, di Februari mencapai 7 juta keluarga, dan di



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Agustus 2018 ditargetkan mencapai 10 juta keluarga sudah bisa menerima BPNT.

Kartu yang lebih dikenal dengan e-wallet ini nantinya akan didistribusikan oleh bank-bank Himbara kepada warga miskin. Skema BPNT ini lebih fleksibel, lantaran selain bisa memilih kualitas beras, penggunaan kartu e-wallet ini nantinya akan diaplikasikan untuk distribusi subsidi LPG 3 kg dan bantuan pemerintah lainnya. Kalau dulu beras bersubsidi (Raskin) menemukan beras jamur, beras kekuningan dan seterusnya sekarang mereka boleh pilih ada beras kualitas medium, premium, bahkan ada super plus telur. Dulu subsidi maka penerima rastra masih harus bayar tebusan per kg Rp 1.600,00 Beras 15 kg bayar Rp 24.000,00 tahun 2018 tidak ada lagi subsidi, yang ada adalah bansos. Jadi mereka terima rastra, enggak ada harga tebusnya.

Dengan basis data dan transaksi yang lebih tercatat dengan baik, diharapkan penyaluran bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran dan tepat waktu kepada penerima. Keterlibatan bank BUMN alias Himbara dalam penyaluran BPNT adalah sebagai channel penyaluran bantuan ke dalam rekening masing-masing keluarga penerima manfaat. Dari agen



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

dimiliki Himbara 83.000 agen yang punya toko sembako kemudian dari Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, koordinasi Bulog 2.800 RPK. E-warung agen punya toko sembako atau RPK atau PKH ada 3.200 semua sedang dipetakan berikan layanan kepada 10 juta penerima bantuan pangan mulai Januari tahun 2018 dan Februari 2018, dilanjutkan bulan Juli dan Agustus 2018. Memang penyalurannya ini akan dilakukan bertahap, tidak setiap bulan, karena memang itu disesuaikan dengan pelaksanaan sehingga bisa berjalan dengan baik.

Masing-masing keluarga penerima BPNT akan mendapatkan uang Rp 110.000 per bulan yang ditransfer ke masing-masing rekening. Uang tersebut kemudian dapat dibelanjakan beras dan telur dengan komposisi yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga melalui agen Himbara dan e-Warung yang dioperasikan oleh koperasi di bawah Kementerian Sosial. Pasokan beras untuk keluarga penerima BPNT dipasok dari Bulog yang dijamin kecukupan pasokannya. Peran Bulog bisa tetap sebagai penyalur rastra lantaran masih ada sekitar 5,5 juta keluarga miskin yang belum terkonversi BPNT di tahap awal. Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga bisa menjadi supplier untuk e-warung yang menyediakan beras



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

bagi penerima bantuan. Soal bantuan pangan yang dibatas hanya beras dan telur, lantaran kedua bahan pokok tersebut dianggap sebagai pemenuhan kecukupan gizi dan saat ini paling dibutuhkan.

Penyaluran bansos non tunai dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dalam penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Selain itu, penyaluran bansos non tunai ini dilakukan untuk mengurangi perilaku konsumtif masyarakat, membangun kebiasaan menabung, dan meningkatkan pemahaman penerima bantuan untuk merencanakan keuangan dengan baik.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan pada materi bantuan pangan non tunai diantaranya :

1. Data Statistik setiap daerah harus valid, disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan, bahwa data penduduk miskin atau pra sejahtera sangat dinamis sehingga cenderung berubah sehingga diperlukan data yang jelas dan dilakukan pembaharuan setiap tahun.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

2. Anggaran bantuan pangan non tunai bisa lebih disesuaikan pada daerah masing-masing, harga barang kebutuhan pokok di tiap daerah tentunya berbeda dan fluktuatif sehingga anggaran bantuan yang dialokasikan bisa berbeda antar masing-masing daerah sasaran.
3. Perlu dijelaskan secara lebih detail tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi sasaran bantuan pangan non tunai. masyarakat penerima manfaat yang menjadi sasaran penerima program perlu dikategorikan secara lebih mendetail berupa persyaratan dan kondisi yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Sedangkan saran yang kami kemukakan diantaranya :

1. Ketersediaan e warong maupun toko penyedia bantuan pangan non tunai seharusnya dapat lebih banyak di pedesaan, Fasilitas berupa toko maupun warung belum terlalu banyak sehingga masih menyulitkan implementasi program. Untuk itu ke depan kiranya pemerintah diharapkan dapat memperbanyak kerjasama dengan toko maupun warung yang menjadi penyalur bantuan pangan non tunai,



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

2. Diperlukan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah pusat serta saling bersinergi dengan pemerintah daerah, kecamatan hingga kelurahan/desa, program bantuan pangan non tunai perlu terus diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat calon penerima sebagai upaya untuk memberikan edukasi dan pemahaman terhadap program bantuan dimaksud.



DAFTAR PUSTAKA

Andersen, J. G. (2012). *Welfare States and Welfare State Theory*. Aalborg: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. CCWS Working Paper

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada kemensos.go.id diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3754652/10-juta-keluarga-akan-terima-bantuan-pangan-non-tunai-2018>, diunduh pada tanggal 29 Januari 2018 jam 21.46 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3711442/2018-10-juta-penerima-rastra-beralih-ke-bantuan-pangan-non-tunai>, diunduh pada tanggal 29 Januari 2018 jam 22.04 WIB.

http://www.bantuanpangan.com/beranda/unduh/Pedoman_Pelaksanaan_Bantuan_Pangan_Non_Tunai_12_Januari_20



**PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

17_versi_1.pdf, diunduh pada tanggal 30 Januari 2018
jam 01.58 WIB.

Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai, 2017, Pedoman Umum Bantuan
Pangan Non Tunai.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada www.bi.go.id
diakses pada tanggal 27 Januari 2018.

Suprayitno, Bambang. (2017, Agustus). *Ekonomi Publik
Konsep & Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : UPP
STIM YKPN.

Tim Penyusun. 2017. “Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan
Non Tunai”. Jakarta.

Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan –
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

LAMPIRAN II



M A K A L A H

Mata Kuliah: ANALISIS KEUANGAN

PERTAHANAN

Dosen: Kol. Chb(k) Dr. Sundari, S.E., MM.

KESEJAHTERAANSOSIAL: DANA DESA

Oleh:

AMAR MUCHAQQI NIM 120170203001

DIAN TANZIYL FATHILMA NIM 120170203007

KURNIA DEWI SWAPRADINTA NIM 120170203014

MOCHAMAD ARCHAN NIM 120170203017

MUHAMMAD FIKRUZZAMAN

RAHAWARIN NIM 120170203018

MUHAMMAD IQBAL

MAULANA NIM 120170203019

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN FAKULTAS

MANAJEMEN PERTAHANAN UNIVERSITAS

PERTAHANAN

2018

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial atau *Social Welfare* berasal dari dua kata, yakni kesejahteraan dan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesejahteraan merupakan suatu hal atau keadaan sejahtera seperti keamanan, keselamatan, ketenteraman, sedangkan

sosial memiliki arti sifat-sifat kemasyarakatan. Hal ini berarti kesejahteraan sosial berarti kondisi masyarakat atau sifat masyarakat yang telah mencapai titik sejahtera meliputi kesehatan, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan UU tersebut, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang

Dasar (UUD) 1945 Alinea ke-empat yang berbunyi “.....*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut*

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” yang sejalan dengan Pancasila khususnya sila ke-5, yakni Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang mempunyai suatu perhatian utama dan langsung pada usaha peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat sebagai keseluruhan. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kemanusiaan seperti halnya sosial, budaya, iptek, hankamnas, dan terutama ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mencapai pemerataan pertumbuhan dan pembangunan, selain itu pemerintah juga memiliki andil dalam mengurangi angka pengangguran pada usia kerja. Sejak tahun 2014, pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai berjalan, melalui program Nawacita menjadi prioritas kerja, satu dari beberapa program yang memicu pemerataan pertumbuhan adalah dengan melalui Dana Desa, khususnya pada desa terluar dan terdepan

Dana Desa menjadi salah satu cara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah perdesaan. Konsep dan implementasi Dana Desa diilandasi oleh landasan regulasi melalui UU No. 6 Tahun

2014 tentang Desa yang kemudian didukung oleh PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan UU Desa ini adalah pengejawantahan dari Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang ada dengan keragaman sebelum dan sesudah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum status desa dalam sistem konstitusional Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan mempromosikan adat istiadat, tradisi, dan budaya desa;

4. Mendorong inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat dan potensi pengembangan aset desa bersama untuk kesejahteraan desa;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga negara dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa;
7. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu menjaga kohesi sosial sebagai bagian dari pertahanan nasional;
8. Meningkatkan ekonomi masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Adanya Dana Desa dapat membantu desa dalam menghadapi harapan baru, menentukan posisi, kewenangan, kejelasan status hukum dan peran dirinya terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Tidak berhenti sampai di

situ, dengan adanya Dana Desa maka dapat meningkatkan fungsi dari otonomi daerah sehingga

A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Merujuk kepada hipotesis yang dilakukan oleh *Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation (ASPE)*, Kementerian Kesehatan dan Jasa Manusia Amerika Serikat (AS), dikatakan bahwa sebuah kebijakan kesejahteraan sosial memiliki 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi, yakni:

1. Pengaruh Institusional dan Politik;
2. Kebutuhan; dan
3. Kapasitas Fiskal.

Pada implementasinya di Indonesia, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial pun tidak bisa dijauhkan dari ketiga faktor tersebut. Dana Desa selaku salah satu bentuk dari kebijakan kesejahteraan sosial membutuhkan payung regulasi yang memadai

kebutuhan masyarakat. Terakhir, keberadaan alokasi anggaran yang dapat memastikan berjalannya program tersebut juga diperlukan. Oleh karenanya, pembahasan pada bagian ini akan mencakup ketiga faktor tersebut terkait dengan implementasi Dana Desa.

1. Pengaruh Institusional dan Politik

Institusi dan Politik tidak dapat terpisahkan dari perumusan dan pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, peranan keduanya terkulminasi dalam bentuk regulasi yang menjadi landasan terselenggaranya alokasi Dana Desa, yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan sehingga tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi UU Desa kemudian mengatur pelimpahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas sebagai berikut:

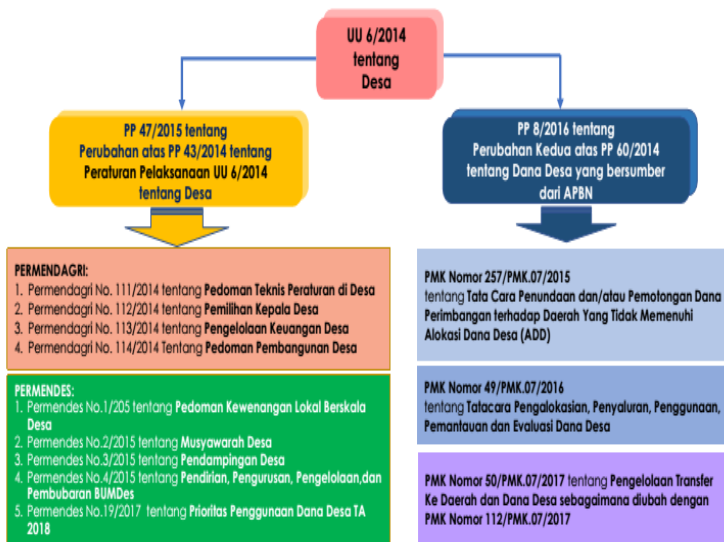
- i. Rekognisi, yakni pengakuan terhadap hak asal usul;
- ii. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling

menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

- iii. Subsidiaritas, yakni penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- iv. Keberagaman, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai
- v. Kegotong-royongan, yakni kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- vi. Kekeluargaan, yakni kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- vii. Musyawaharah, yakni proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- viii. Demokrasi, yakni sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

- ix. Kemandirian, yakni suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri;
- x. Partisipasi, yakni turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- xi. Kesetaraan, yakni kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- xii. Pemberdayaan,
- xiii. Keberlanjutan, yakni proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.



Grafik 1 - Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa
(Sumber: Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan, 2017)

Ditinjau dari perspektif taksonomi, alur penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat digambarkan oleh Grafik 1 di atas.

2. Kebutuhan

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang

berbasis perdesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di Kawasan perdesaan. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka intervensi mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung bias perkotaan. Masih belum sempurnanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa, yang menjadi hak masyarakat desa terhadap pelayanan yang mesti disediakan oleh pemerintah.

Pada pelaksanaannya, Indeks Pembangunan Desa (IPD) disusun sebagai upaya dalam mengakomodasi beberapa aspek pemenuhan SPM Desa, selain juga digunakan sebagai indikator perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, IPD dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa di Indonesia, pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan desa, dan pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2015- 2019 di Indonesia. Terdapat lima dimensi yang masing-masing di dalamnya mencakup beberapa variabel terdapat dalam IPD, yakni:

i. Pelayanan Dasar a. Pendidikan b. Kesehatan

- ii. Kondisi Infrastruktur
 - a. Infrastruktur Ekonomi b. Infrastruktur Energi
 - c. Infrastuktur Air Bersih dan Sanitasi
 - d. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

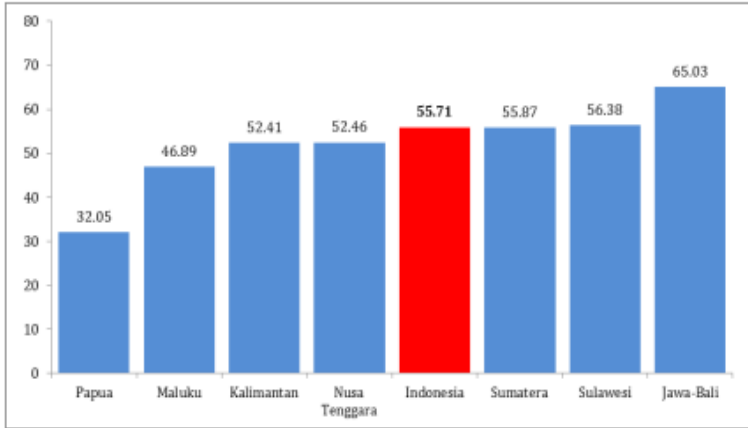
- iii. Aksesibilitas/Transportasi
 - a. Sarana Transportasi
 - b. Aksesibilitas Transportasi

- iv. Pelayanan Umum
 - a. Kesehatan Masyarakat
 - b. Olahraga

- v. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Kemandirian
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan buku Indeks Pembangunan Desa (IPD) (2014), rata-rata

pembangunan desa di Indonesia baru mencapai angka 55,71. Dari angka tersebut, hanya terdapat tiga pulau besar yang melebihi angka rata-rata nasional, yakni Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan terutama Papua, masih berada di bawah angka rata-rata nasional.



Grafik 2 – Indeks Pembangunan Desa per Kawasan Pulau di Indonesia

Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan tingkat kemajuannya, IPD membagi desa ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Desa Mandiri, yakni desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik dengan nilai IPD di atas 75;
- b. Desa Berkembang, merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar,

infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai dengan nilai IPD di atas 50 namun di bawah 75.; dan

- c. Desa Tertinggal, yakni desa yang ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim dengan nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Nama Wilayah Pulau	IPD 2014	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Desa Menurut Tipologi Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
Sumatera	55,87	57,70	41,03	73,77	52,00	55,11	8,07	22,24	0,61	22.910
Jawa-Bali	65,03	68,24	50,79	78,10	55,52	73,49	0,94	28,11	3,04	23.117
Nusa Tenggara	52,46	51,95	31,01	79,44	41,55	64,11	2,14	3,13	0,06	3.945
Kalimantan	52,41	53,44	34,56	68,95	53,16	58,95	3,31	5,34	0,10	6.486
Sulawesi	56,38	55,27	38,24	79,92	49,01	65,08	2,65	8,05	0,08	8.635
Maluku	46,89	46,99	29,81	67,78	42,39	51,60	1,83	1,18	0,02	2.254
Papua	32,05	27,50	17,68	47,75	40,19	41,44	8,29	0,81	0,01	6.746
Indonesia	55,71	56,73	39,21	73,50	51,72	61,59	27,22	68,86	3,92	74.093

Tabel 1 – Rincian Kategori Indeks Pembangunan Desa (IPD) per Kawasan Pulau di Indonesia

3. Kapasitas Fiskal

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan UU No.6

Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Dana Desa dari APBN;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%);
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum);

5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota;
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

B. HAMBATAN YANG DIHADAPI

Pada tahun 2017, alokasi dana desa mencapai Rp 60 trilyun, angka ini lebih besar Rp 46,7 trilyun jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan kembali meningkatkan alokasi dana menjadi Rp 120 trilyun. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah penggunaan dana desa tersebut.

Adanya alokasi dana desa menjadi sebuah kesempatan untuk membangun dan memperbaiki desa, akan tetapi sebagian besar desa belum memiliki perangkat desa yang mampu membelanjakan dana desa tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terutama tentang penyertaan modal bagi BUMDesa yang belum begitu dipahami oleh kepala desa. Desa harus mampu menyusun program kerja yang dapat menciptakan perubahan ekonomi bagi desa tersebut. Selain itu, perangkat desa harus mampu mengemban amanah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, keuangan desa,

pembangunan desa dengan dana desa yang diberikan. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara professional, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Dalam realita, terdapat banyak kepala desa yang belum mampu mengemban amanah untuk mengelola dana desa. Pada akhirnya kepala desa tidak mampu membangun efektivitas dan sinergi kerja sama dalam tim, serta tidak mampu menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Masalah kedua, terdapat perangkat desa yang belum memahami teknis mengenai aturan hukum dana desa dan tidak memahami keseluruhan panduan mengenai dana desa sehingga pemahaman pengelolaan dana desa terbatas pada pencairan, alokasi dan pelaporan administratif dana desa tersebut.

Ketiga, masih lemahnya pengawasan publik. Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 112 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa. Serta Pasal 115 bahwa Pemerintah Daerah Kabupater/Kota memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan berbanding terbalik dengan tingkat penyalahgunaan dana desa. Semakin lemah

pengawasan Pemerintah maka akan semakin kuat kemungkinan perangkat desa untuk menyalahgunakan dana desa tersebut.

Tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah distribusi dana desa per kapita antardesa yang masih belum berimbang dan laporan penggunaan dana desa yang terlambat. Penyebabnya adalah terlambatnya penyampaian laporan penggunaan dana desa. Laporan penggunaan dana desa yang disampaikan nantinya akan menjadi tolak ukur distribusi dana desa pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, laporan penggunaan dana desa tahap I tidak sampai 50 persen.

Sementara sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, syarat penyaluran dana desa pada tahap selanjutnya harus menyampaikan laporan penggunaan minimal 50 persen dari pagu tahap I.

Tantangan juga muncul pada proses penggunaan dana desa. Sesuai dengan program pemerintah penggunaan dana desa diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan desa dapat berupa peningkatan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa

peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, pengelolaan usaha ekonomi produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, pelestarian lingkungan hidup dan penguatan tata kelola desa yang demokratis. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat penggunaan dana desa diluar bidang prioritas.

Penyerapan dan pelaksanaan dana desa yang lambat juga merupakan masalah bagi pemerintah. Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai lambat dalam menyerap anggaran akan dikenai sanksi oleh Kementerian Keuangan. Sesuai Ketentuan PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah dan PMK No. 4 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Pemda yang terlambat menyampaikan Perda APBD dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat memacu Pemda untuk dapat mempercepat dan melaksanakan anggaran secara optimal dan tepat waktu.

Apabila Pemda terlambat menyampaikan Perda APBD, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU sebesar 25 persen dari besarnya penyaluran DAU per bulan. Bila Pemda memiliki posisi kas yang tidak wajar, seperti memiliki dana yang disimpan di Bank dan jumlahnya lebih dari estimasi kebutuhan belanja operasional dan belanja modal dalam tiga bulan kedepan,

maka penyaluran DBH atau DAU akan dikonversi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, bila daerah belum dapat merealisasikan penyerapan DAK Fisik dan capaian output pada triwulan sebelumnya, maka penyaluran DAK Fisik pada periode berikutnya tidak dapat dilakukan. Hingga Agustus 2017, Anggaran yang disimpan Bank oleh Pemerintah Daerah mencapai Rp 222,6 trilyun.

Selain tantangan yang masih dihadapi tersebut, terdapat juga 10 jenis penyimpangan yang dilaporkan diantaranya: tidak adanya pembangunan di desa, pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/Rencana Anggaran Biaya, dugaan adanya *mark up* oleh oknum aparat desa, tidak adanya transparansi, masyarakat tidak dilibatkan, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat, kongkalikong pembelian material bahan bangunan, proyek fiktif dan penggelapan honor aparat desa.

C. PEMBAHASAN

Terdapat tiga hal yang menjadi indikator kesejahteraan suatu masyarakat, yaitu:

1. Adanya pemerataan pendapatan yang berarti bahwa pendapatan suatu negara atau kelompok masyarakat hampir bisa dikatakan merata bagi semua orang atau tidak dikuasai

oleh segelintir orang saja. Hal ini tentu berkaitan dengan tersedianya lapangan kerja, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Pendidikan yang bisa dirasakan oleh semua pihak dan kalangan, baik itu tingkat dasar maupun untuk Pendidikan tinggi. Pemerintah diharuskan mampu memberikan fasilitas Pendidikan yang murah tapi juga berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, sehingga dampaknya kualitas pengetahuan masyarakat akan tinggi dan berdaya saing sumber daya manusiannya dengan negara lain.
3. Kualitas kesehatan yang meningkat dan harapan hidup yang tinggi. Kesehatan merupakan faktor penting yang menunjang kesejahteraan masyarakat, karena tanpa kesehatan yang bagus tidak akan tercapai apapun keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan apabila masih banyak terdapat keluhan di masyarakat tentang gangguan kesehatan, maka negara dianggap belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakatnya.

Untuk itu berkaitan dengan upaya mencapai kesejahteraan untuk masyarakat tersebut pemerintah melahirkan undang-undang desa nomer 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Cita-cita dan semangat UU 6/2014 adalah perlindungan

dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan asas utama rekognisi-subsidiaritas. Perlindungan dan pemberdayaan desa di Indonesia agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan komitmen koordinasi yang sinergi dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di perdesaan Indonesia yang menurut BPS (2016) pada tahun 2015, dari lebih 255 juta jiwa penduduk Indonesia, sebanyak lebih 119 juta jiwa (46,7%) penduduk Indonesia hidup di desa. Maka dari itu desa memiliki peranan penting untuk memulai kesejahteraan sosial.

Isu utama yang diangkat pada pembahasan kompleksitas penyaluran dana desa pada pembahasan ini adalah terkait langsung dengan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Kuantitas dan kualitas SDM (sumberdaya manusia) yang belum memadai;

2. Kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis yang belum memadai serta longgarnya pengawasan, sementara aliran dana semakin besar mengalir ke desa.

Pertama, mengurai kompleksitas kebijakan keuangan desa dapat direlasikan dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sejumlah titik atau faktor kritis berpotensi menjadi masalah strategis dari semua tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Identifikasi regulasi dan empiris dari sejumlah referensi kembali bermuara kepada situasi dan kondisi masalah klasik, yaitu kemampuan dan kompetensi (kualitas) SDM (sumberdaya manusia) dalam mengelola keuangan publik (amanah rakyat), termasuk dalam hal ini dengan masalah jumlah (kuantitas) personil pemerintah yang menguasai pengelolaan keuangan desa. Sumberdaya manusia perangkat desa sangat bervariasi dilihat dari sisi pendidikan formalnya, dari lulusan SD sampai dengan Sarjana (S1), namun rata-rata lulusan SMP, dengan kualitas yang belum memadai dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015; DJPK, 2016).

Rendahnya pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi perangkat desa ini rentan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kesempatan mengambil keuntungan finansial yang tidak sah berupa modus fraud/korupsi (KPK, 2015), atau dengan belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa sendiri dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, memiliki risiko melakukan kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum (Ismail dkk., 2016).

Contoh kasus terkaitnya lemahnya kompetensi Perangkat desa yang dimanfaatkan pihak lain, dimana oknum tenaga pendamping yang seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dan aparat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan justru menjadi sumber masalah, dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa. Ketua UPK dan Fasilitator PNPM Perdesaan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Cikarang karena diduga melakukan korupsi dana PNPM Perdesaan sebesar Rp1 miliar lebih, dengan modus operandi berkolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikkan harga barang tersebut (mark-up) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk

keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu (KPK, 2015).

Kondisi yang dikemukakan KPK pada tahun 2015 tersebut setidaknya telah terbukti terulang kembali. Pada Mei 2016, Kejaksaan Negeri Masohi di Ambon menetapkan 9 orang tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2015 yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, terdiri dari 6 orang Kepala Desa, 2 orang Bendahara Desa, dan 1 orang Pendamping Desa (<http://regional.kompas.com/>).

Sebelumnya, April 2016 reskrim Malang Polda Jatim juga menangani dugaan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp. 420 juta dengan 11 orang tersangka perangkat desa (<http://www.klikapa.com/>).

Tingkat pendidikan formal perangkat desa yang rendah juga berkorelasi dengan tahapan awal dari pengelolaan keuangan desa, yaitu tahap perencanaan. Rendahnya kualitas mengelola penyusunan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), yang selanjutnya berdampak kepada kualitas APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang selanjutnya juga berdampak kepada kualitas pelaksanaan pembangunan desa (KPK, 2015; DJPK, 2016).

Kedua, kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis yang belum memadai serta longgarnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, sementara aliran dana semakin besar ke desa. Belum memadainya kelengkapan regulasi dan petunjuk teknis pendukung pengelolaan keuangan desa menyebabkan minimnya (longgarnya) pengawasan. Definisi pengelolaan uang negara yang notabene adalah uang rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah sendiri ada perbedaan terkait pengawasan, sedangkan yang dikelola sama berdasarkan sumbernya.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut PP 43/2014 Pasal 93 Ayat 1 (peraturan pelaksanaan UU 6/2014), adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan “pengawasan” keuangan daerah (Pasal 1 Angka 6).

Tidak adanya kata “pengawasan” dari definisi Pengelolaan Keuangan Desa mungkin akan dapat terjawab dengan jelas kalau ada penjelasan dari pemerintah sendiri atau dari konseptor/pembuat peraturan itu sendiri. Kata “pengawasan” sendiri dalam UU 6/2014 dominan disandingkan dengan kata “pembinaan” terutama pada Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 112- 115), terkait peran dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Yang selanjutnya dalam PP 43/2014 juga diatur peran dan fungsi Camat sebagai pembina dan pengawas desa (Pasal 154).

Peran dan fungsi Camat menjadi vital dan strategis dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa selaku SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdekat dengan desa maupun karena amanat PP 43/2014, terutama terkait pengelolaan keuangan desa, bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain (Pasal 101 Ayat 3).

Namun ruang lingkup evaluasi, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada Camat dalam PP tersebut belum diatur secara jelas, karena dalam peran dan fungsi Camat sebagai pembina dan pengawas dalam Pasal 154 belum menegaskan fungsi pembinaan dan pengawasan Camat dalam konteks pengelolaan keuangan desa, dengan hanya secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dilakukan melalui:

- (a) fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- (b) fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; (c) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- (d) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- (e) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; (f) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- (g) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- (h) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- (i) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;

- (j) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- (k) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (l) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban

lembaga kemasyarakatan; (m) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; (n) fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; (o) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa; (p) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; (q) koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan (r) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Belum adanya regulasi yang jelas dalam hal delegasi evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa terutama terkait mekanisme dan ruang lingkup evaluasi dari APBDesa, seperti apakah Camat berwenang untuk menolak anggaran kegiatan dalam APBDesa yang sudah menjadi hasil musyawarah desa dan disetujui oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sejauh apa tanggung jawab Camat

jika mengesahkan APBDesa yang tidak sesuai dengan RPJMDesa, RKPDesa, atau ketentuan regulasi pusat. Kesiapan dan kecakapan Camat beserta perangkatnya juga menjadi PR tersendiri dalam peran pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi diharapkan juga pada level memahami dan menguasai pengelolaan keuangan desa untuk mengantisipasi dan mengatasi kelemahan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa yang rata-rata belum memenuhi kualifikasi untuk mengelola dana dalam jumlah besar. KPK (2015) mensinyalir risiko yang paling perlu dihindari dengan ketidakjelasan fungsi Camat beserta perangkatnya ini adalah potensi terjadinya abuse oleh para Camat dalam membina dan mengevaluasi desa. Para Camat berpotensi membuat diskresi yang seharusnya tidak perlu dan mengambil keuntungan tertentu dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Desa juga dapat merasa tersandera oleh Camat dalam memberikan persetujuan APBDesa sehingga muncul hal-hal yang bersifat transaksional antara Kepala Desa/Perangkat Desa dan Camat/Perangkat Kecamatan dalam evaluasi dan pengawasan APBDesa.

Potensi masalah strategis berikutnya terutama pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah belum adanya regulasi untuk standar pelaporan keuangan desa. UU 6/2014 menyatakan bahwa Desa menjadi subyek pembangunan, menyebabkan aliran dana negara (APBN dan APBD) ke desa, sehingga menyebabkan kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Namun, UU 6/2014 tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh BPK (BPK RI Perwakilan Sulsel, 2015; Hoesada, 2016).

Berdasarkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU 15/2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Bahwa PP 43/2014 maupun turunannya Permendagri 113/2014 dan Permendagri 1/2016 baru mengatur dalam tataran sistem dan prosedur, belum ada standar pelaporan keuangan desa (Hoesada, 2016).

Untuk dapat di audit oleh BPK sebagai auditor eksternal yang ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, tidak terkecuali Pemerintahan Desa, tentu saja membutuhkan standar pelaporan keuangan desa. Memasuki tahun kedua implementasi UU 6/2014, tepatnya 22 April 2016, telah diadakan High Level Meeting Standar Pelaporan Keuangan Desa oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan), dengan kesimpulan utama, KSAP dapat meneruskan rencana penyusunan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan Desa, dan agar dalam penyusunan standar senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholders keuangan desa, serta standar diharapkan sederhana sehingga mudah diterapkan oleh desa.

Penutup Undang-Undang RI Nomor 6/2014 tentang Desa telah ditetapkan dan implementasi atas amanat ini akan memasuki tahun ke tiga pada 2017. Redistribusi uang negara (dari APBN dan APBD) kepada desa dalam jumlah besar, yang menjadi hak desa, merupakan isu hangat dan politis, menyertai hiruk pikuk pemerintahan baru di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sejumlah kompleksitas yang menghadirkan masalah dan potensi masalah kebijakan pengelolaan pemerintah dan keuangan

desa dalam implementasi UU 6/2014 ini menimbulkan pro dan kontra.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan telaah kritis di atas, idealnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia dapat dijalankan secara efisien dan efektif terutama dalam hal penggunaan dana/uang publik. Pertama, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, koordinasi, dan sinergi implementasi yang harus “luar biasa” antar stakeholder terutama pada level pengambil kebijakan dan keputusan serta pelaksana dari kebijakan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Termasuk mengatasi masalah serta mengisi dan menutupi potensi “lubang- lubang” masalah regulasi yang belum lengkap. Kedua, urgensi peningkatan kuantitas dan kualitas kemampuan dan kompetensi SDM (sumberdaya manusia) perangkat Desa (termasuk tenaga Pendamping Desa), perangkat Kecamatan, perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi hal yang mendasar, merupakan kebutuhan utama, dan bukan “pilihan”.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh FPPD (Eko, 2015a:64) terhadap keuangan desa, ditemukan variasi dalam kapasitas dan efektivitas SDM, yaitu: (1) desa yang tidak memperoleh pelatihan dan pendampingan secara memadai,

kapasitas dan efektivitasnya sangat rendah; (2) desa yang memperoleh pelatihan dan pendampingan baik oleh Pemkab maupun NGOs, kapasitas dan efektivitas relatif baik, dimana pelayanan dasar, infrastruktur desa, maupun ekonomi desa tumbuh dengan baik; dan (3) desa yang memiliki kepala desa progresif dan pegiat desa yang dedikatif secara mandiri mampu mengelola dana dengan kapasitas dan efektivitas yang memadai. Dari tiga temuan ini menyuratkan pentingnya peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM yang terkait dengan implementasi UU 6/2014.

Implementasi UU 6/2014 oleh negara kepada desa, bahwa desa mengemban amanah dan memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah, mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memberi akibat kepastian bahwa desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara (APBN) dan daerah (APBD). Implementasi ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip

manajemen publik yang baik. Dalam konteks ini, bahwa negara memiliki peraturan, hukum, administrasi, birokrasi, perencanaan, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Singkatnya, negara punya aturan, dengan frasa “tata negara” (Eko, 2015b).

"Cara desa" dan "tata negara" merupakan dua paradigma yang memiliki nalar dan kepentingan berbeda, dimana benturan antara dua paradigma ini membuahkan dilema intervensi negara masuk desa. Kalau negara tidak hadir, salah, dianggap melakukan pembiaran. Namun kalau negara hadir, membawa "tata negara" ke dalam desa dengan modernisasi, korporatisasi, teknokratisasi, dan birokratisasi, dianggap keliru, dianggap tidak mengakui, menghormati, memberdayakan dan memuliakan "cara desa". (Eko, 2015b) Mencari dan menyepakati solusi untuk menghindari membenturkan dua paradigma ini akan lebih baik untuk mencari titik keseimbangan baru antara "cara desa" dengan "tata negara".

Tujuan jangka panjang dari dana desa adalah desa-desa yang menerima dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara peningkatan pelayanan publik di desa, meningkatkan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Pada praktiknya perlu adanya sinergitas pengawasan dalam mengoptimalisasi dana desa yang digelontorkan kepada desa-desa, sinergitas tersebut terjadi diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur desa, dan juga dibantu dengan lembaga terkait seperti KPK, sehingga lebih tepat guna, dan tepat sasaran

REFERENSI

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/19450781/jokowi-tetapkan-dana-desa-untuk-padat-karya-dimulai-januari-2018>

<https://bisnis.tempo.co/read/1040112/dana-desa-untuk-padat-karya-sri-mulyani-minta-dukungan-daerah>

<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Andreawaty. 2015. Polemik Kewenangan Kelola Desa. Harian Ekonomi Neraca. 28 Januari. (<http://www.neraca.co.id/>, diakses 28 Januari 2018)

BPKP RI. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :Jakarta.http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeu_desa.pdf, diakses 28 Januari 2018)

Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.
2017. Kementerian Keuangan.

Buku Saku Dana Desa. 2017. Kementerian Keuangan.

Buku Indeks Pembangunan Desa. 2014. Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Badan Pusat
Statistik (BPS).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI. 2017.

Slide "Kebijakan Dana Desa TA 2017 ". ([http:// www .
djpk.depkeu.go.id / wpcontent/uploads/. - KEBIJAKAN-
DANA-DESA-dan-ADD2017_Kemenkeu.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/2016/03/01.KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD2017_Kemenkeu.pdf), Diakses
Januari 2018) DJPK RI. 2016. Slide "Kebijakan Dana Desa
TA 2016".([http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content /
uploads / 2016 / 03 / 01.KEBIJAKAN- DANA- DESA-dan-
ADD-2016_ Kemenkeu.pdf](http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf), diakses 28 Januari 2018)

Eko, Sutoro. 2015a. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, dan
Semangat UU. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia.Jakarta:Maret. ([http://www.keuandangesa.com/
wpcontent/uploads/](http://www.keuandangesa.com/wpcontent/uploads/)

2015/04/REGULASI-BARU-DESA-BARU-Ide-Misi-dan
Semangat UU-Desa.pdf, diakses 28 Januari 2018)

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri. Slide Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 28-30 April: Jakarta. (https://www.kemendagri.go.id/sites/default/files/field/file_pendukung/Arah%20Kebijakan%20Tata%20Kelola%20Pasca%20Pengalihan%20PNPM_02.pdf, diakses 28 Januari 2018)

Kementerian Keuangan RI. 2016. Keterangan Pers RAPBN 2017 <http://www.kemendagri.go.id/sites/default/files/Keterangan%20Pers%20NK%20RAPBN%202017.pdf>, diakses 28 Januari 2018)

Koran Sindo. 2015. Polemik Pengelolaan Dana Desa. 20 Januari. (<http://nasional.sindonews.com/>, diakses Januari 2018)

KPK. 2015. Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Deputi Bidang Pencegahan – KPK : Jakarta. (<http://acch.kpk.go.id/>, diakses 28 Januari 2018)

LAMPIRAN III



TUGAS TERSTRUKTUR

Mata Kuliah: **Analisis Keuangan Pertahanan**

Kode Mata Kuliah: M- EP2205

Dosen Pengampu: **Brigjen TNI Dr. Yudi Sutrasna, M.M**

Dosen: **Kolonel Chb. Dr. Sundari, S.E., M.M.**

AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh:

ANANGGA PRATAMA

SETIAWINATA NIM. 120170203002

DEA FADILLAH DAMAI NIM. 120170203006

EGGY ARMAND RAMDANI NIM. 120170203010

LUTFIA INGGRIANI NIM. 120170203015

LUTVIANA AZIZAH NIM. 120170203016

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN

FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN

UNIVERSITAS PERTAHANAN

2018

AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan manusia tidak dapat mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga mampu menyelesaikan tugas hidupnya secara mandiri. Pendidikan dapat mencakup seluruh proses hidup dengan segenap bentuk interaksi individu dan lingkungannya baik secara formal, informal, maupun non formal, dalam rangka mewujudkan dirinya sesuai tahapan dan tugas perkembangannya.

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi, satu dengan lainnya saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara dekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian yang luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah

proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Syah, 2008). Pengajaran bertugas mengarahkan proses agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan (Hamalik, 2007).

Rechey (2000) dalam bukunya, *Planing for Teaching: and Introduction* menjelaskan pengertian pendidikan sebagai berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru (generasi muda) pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya di tengah masyarakat. Jadi, proses pendidikan jauh lebih luas ketimbang proses yang berlangsung di sekolah semata. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial terpenting yang berfungsi untuk mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Keterkaitan pendidikan dengan keadaan sosial sangatlah erat, sehingga pendidikan mungkin mengalami proses spesialisasi dan institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan modern. Meski demikian proses pendidikan secara menyeluruh tidak bisa dilepaskan dari proses informal yang berlangsung di luar sekolah.

Secara khusus di Indonesia, pendidikan memiliki payung hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional dirumuskan guna mengantarkan peserta didik menjadi individu yang memiliki kualifikasi : (1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) Berakhlak mulia; (3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan; (4) Memiliki kesehatan jasmani dan rohani; (5) Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, dan (6) Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan yang diselenggarakan harus mengintegrasikan tiga bidang kegiatan utama secara sinergis, yaitu: bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Hanya dengan mengintegrasikan ketiga bidang utama ini, maka pendidikan dapat dipandang bermutu, efektif, dan ideal.

Selain aspek institusional tersebut, pendidikan juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam mengakses lembaga pendidikan. Sejalan dengan program Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun dan upaya pemberantasan buta huruf, maka akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan, baik ke lembaga pendidikan formal maupun non-formal harus menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penelitian ini adalah untuk merumuskan konstruksi solusi akses pendidikan Indonesia sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan sosial. Akses pendidikan tersebut juga merupakan bagian dari amanah konstitusi dimana mencerdaskan bangsa adalah salah satu tujuan nasional.

b. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah guna melengkapi kajian keilmuan pada pokok bahasan kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder pendidikan. Selain itu, kajian ini dapat menjadi masukan bagi pengampu kebijakan pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan visioner.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

a. Pendahuluan

Pendahuluan memaparkan kajian awal yang mengantarkan bahasan pokok dengan fakta-fakta awal. Secara garis besar, bagian pendahuluan mencakup bagian umum yang memberikan gambaran awal, maksud dan tujuan yang

memberikan arah penulisan, dan ruang lingkup dan tata urutan yang memberikan penjelasan bagian-bagian pembahasan.

b. Faktor yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi akan memaparkan bagian-bagian yang turut serta berperan dalam pokok masalah dan bahasan. Faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari internal maupun faktor dari eksternal.

c. Hambatan yang Dihadapi

Masalah yang belum terpecahkan tersebut terhambat oleh sejumlah hambatan yang menunda pemecahan masalah. Pada bagian ini dipaparkan hambatan-hambatan yang menjadi *barier* penyelesaian masalah.

d. Pembahasan

Pada bagian ini dipaparkan bagian inti dari kajian ini. Setelah sebelumnya dipaparkan fakta-fakta awal, faktor yang mempengaruhi dan hambatan yang dihadapi, maka pada bagian pembahasan ini dikaji dengan mendalam masalah dan pemikiran tim peneliti.

e. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian akhir kajian, maka tim peneliti menyimpulkan kajian pada kalimat-kalimat pamungkas. Selain kesimpulan, tim peneliti juga memberikan saran pada *stakeholder* dan

pengampu kebijakan guna perbaikan dan akselesasi penyelesaian masalah.

4. Dasar Referensi

Referensi yang digunakan dalam kajian ini adalah buku, jurnal maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan pokok bahasan materi. Daftar referensi yang digunakan tercantum dalam daftar pustaka.

B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Akses pendidikan bagi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya:

1. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah hasil kerja (Poerwadaminta, 2003). Pengertian lebih spesifik menyebutkan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, komisi, ongkos, laba, maupun bagi hasil (Marbun, 2003).

Bagi masyarakat *revenue* bermakna total penerimaan yang diterima pada periode tertentu. Pendapatan yang diterima tersebut sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. Pendapatan inilah yang menjadi dasar

bagi konsumsi individu maupun kelompok (Reksoprayitno, 2004).

Notasi pendapatan dalam ekonomi adalah:

Dimana:

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

S = Tabungan

Berdasarkan rumus pendapatan tersebut, sejatinya pendapatan akan dibagi menjadi dua kategori pengeluaran, yakni konsumsi dan tabungan. Tabungan bagi beberapa masyarakat diganti menjadi Investasi atau terdiri dari tabungan dan investasi.

Lantas dimana posisi pendidikan? Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pendidikan dan segala hal yang menunjang pendidikan adalah bagian dari konsumsi. Hal ini tak lepas dari biaya yang dikeluarkan oleh individu, keluarga maupun pemerintah secara rutin untuk membiayai pendidikan. Padahal seyogyanya pendidikan adalah investasi.

Pendidikan sebagai investasi adalah pemikiran masyarakat maju yang berprinsip bahwa pendidikan tinggi pada kemudian hari akan memberikan pendapatan lebih tinggi bagi individu.

Sama halnya dengan investasi, pengeluaran yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan baru akan diterima oleh individu pada kemudian hari.

Pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi akses pendidikan masyarakat. Pendapatan perkapita Indonesia sebesar Rp47,96 juta per tahun dengan rasio gini 39,4. Meski tingkat pendapatan perkapita mendekati Rp4 juta perbulan, namun perbedaan antara pendapatan masyarakat termiskin dengan terendah masih cukup tinggi.

Meski pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi lembaga pendidikan dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi masyarakat miskin, namun sejatinya terdapat biaya-biaya lain yang belum tercover yang harus menjadi pengeluaran masyarakat. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi akses pendidikan di Indonesia.

Pilihan paling realistis bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah dengan berkerja daripada belajar. Keberadaan peserta didik yang bekerja merupakan sebuah realita sosial yang umum ditemui pada berbagai negara di dunia terutama di negara berkembang termasuk Indonesia saat ini. Keterlibatan siswa berumur 10-24 tahun yang melakukan kegiatan bekerja selama seminggu terakhir mencapai 7,44% dengan rincian

daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing sebesar 6,69% dan 8,29 %.

Bagi masyarakat miskin, dalam jangka pendek bekerja lebih menguntungkan karena menghasilkan uang dalam waktu cepat yang menjadi akar masalah kehidupannya. Padahal pada sisi lain, sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendidikan adalah investasi masa depan yang dapat mengantarkan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih mapan di kemudian hari.

2. Budaya Masyarakat

Sebagian masyarakat Indonesia masih memandang rendah lembaga pendidikan. Akibatnya beberapa masyarakat merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan. Hal ini terutama dapat ditemui pada masyarakat pedesaan yang memiliki persepsi bahwa masa depannya adalah menjadi seorang petani.

3. Struktur Sosial

Di sejumlah negara berkembang, perlakuan diskriminasi terhadap wanita dalam hal pemberian kesempatan pendidikan masih sangat tinggi kadarnya. Afghanistan, misalnya, akses ke pendidikan nyaris tertutup bagi wanita. Wanita dianggap sebagai bagian yang terpinggirkan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, atau bahkan tidak perlu bersekolah.

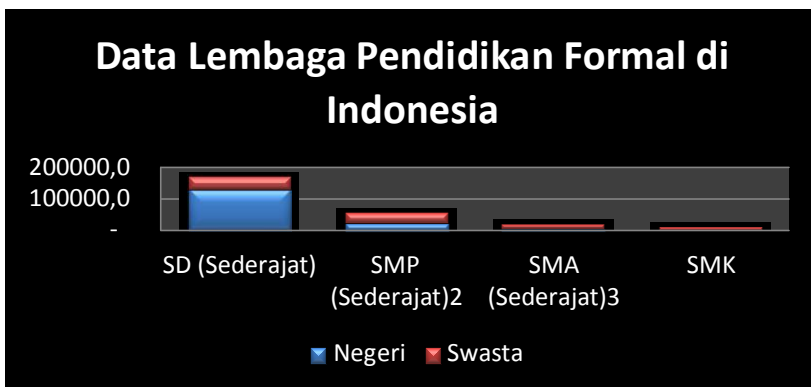
Selain struktur sosial wanita, beberapa masyarakat dengan pemahaman strata sosial yang melekat atau kasta, orang-orang tertentu dianggap tidak pantas untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Hal ini tak lepas dari politik masa lalu penjajah Belanda yang hanya memberikan kesempatan kepada pribumi kaum priyayi untuk mengenyam pendidikan formal.

C. HAMBATAN YANG DIHADAPI

Mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mengalami berbagai macam hambatan, yakni:

1. Ketersediaan Lembaga Pendidikan

Salah satu masalah klasik yang menjadi hambatan bagi pemerataan akses pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Secara kuantitas, jumlah lembaga pendidikan di Indonesia cukup banyak, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal, namun persebaran lembaga pendidikanlah yang menjadi masalah.



Sumber: bps.go.id

Grafik 1.

Data Lembaga Pendidikan Formal di Indonesia

Merujuk pada data di atas, jumlah lembaga pendidikan formal yang tersedia di Indonesia untuk tingkat SD dan sederajat berjumlah 17.357 lembaga dengan dominasi lembaga negeri sebanyak 133.720 lembaga (77,04%) dan 39.855 lembaga (22,96%). Hal tersebut berbanding terbalik untuk tingkat SMP dan sederajat yang didominasi oleh lembaga swasta sebanyak 31.955 lembaga (56,34%) dibanding lembaga negeri sebanyak 24.761 lembaga (43,66%) dari total keseluruhan sebanyak 56.716 lembaga.

Begitu pula tingkat SMA dan sederajat dimana 14.236 lembaga (65,37%) swasta dan 7.541 lembaga negeri (34,63%) dari total keseluruhan sebanyak 14.236 lembaga.. Sedangkan

SMK dari total keseluruhan sebanyak 13.953 lembaga didominasi oleh lembaga swasta sebanyak 10.410 lembaga (74,61%) dibanding 3.543 lembaga swasta (25,39%).

Meski memiliki jumlah yang cukup fantastis, namun hal yang perlu digarisbawahi adalah persebarannya yang tidak merata. Pulau Jawa sebagai tempat dimana pusat pemerintahan berdiri, memiliki hampir separuh (47,57%) dari total lembaga pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Jawa Timur dalam hal ini adalah provinsi dengan lembaga pendidikan terbanyak (15,05%), diikuti Jawa Barat (13,98%), Jawa Tengah (11,73%), Banten (3,64%), DKI Jakarta (2,04%), dan DIY (1,13%).

Bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan jumlah lembaga pendidikan paling sedikit (0,29%). Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki 490 SD (sederajat), 186 SMP (sederajat), 69 SMA (sederajat), dan 29 SMK (sederajat). Provinsi Papua dengan jumlah penduduk 3.149.400 orang di tahun 2015 hanya memiliki 3.652 lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah.

Bahkan jika merujuk data BPS, diketahui bahwa persentase ruang kelas dengan kondisi baik bekisar 20-30% pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Untuk pendidikan menengah,

persentase ruang kelas dengan kondisi baik sekitar 40%. Sementara untuk ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang, rata-rata 60% ruang kelas pada jenjang SD dan SMP dan hampir separuh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang pada jenjang pendidikan menengah. Persentase ruang kelas dengan kondisi rusak berat relatif kecil pada jenjang SMP dan SM. Akan tetapi, ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada jenjang SD mencapai 10,94%.

Hal ini belum dibandingkan dengan spesifik memperhitungkan ketersediaan lembaga pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) yang bukan hanya minim dari sisi jumlah, namun juga minim dari sisi sarana dan prasarana.

2. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

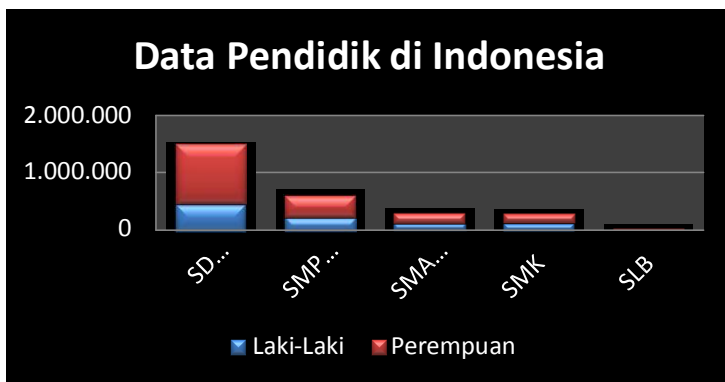
Sama halnya dengan ketersediaan lembaga pendidikan, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan pun masih mejadi masalah besar bagi Indonesia. Tak jarang fakta-fata di lapangan mengemuka dimana satu

orang

pendidik

harus

men



didik 2-3 kelas sekaligus di satu tempat yang sama.

Sumber: bps.go.id

Grafik 2.

Data Pendidik di Indonesia

Data menunjukkan bahwa dari total 2.748.495 orang pendidik, 993.140 adalah laki-laki (36,13%) dan 1.755.354 (63,87%) orang perempuan. Jumlah pendidik SD (sederajat) adalah 1.485.432 orang atau 54% dari total pendidikan keseluruhan. Pendidikan tingkat SMP (sederajat) sebanyak 632.013 orang (22,99%), pendidik SMA (sederajat) sebanyak 310.708 orang (11,30%), pendidik SMK sebanyak 295.849 orang (10,76%) dan pendidik SLB sebanyak 24.492 orang (0,89%).

Namun apabila dikaji lebih mendalam, sebaran pendidik ini masih terkonsentrasi di pulau jawa, hampir separuh pendidik Indonesia 44,97% atau sebanyak 1.235.937 orang. Jawa Barat

dalam hal ini adalah provinsi dengan jumlah pendidik terbanyak (13,55%), diikuti Jawa Timur (12,50%), Jawa Tengah (11,10%), Banten (3,47%), DKI Jakarta (2,89%), dan DIY (1,46%).

Bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi dengan jumlah pendidik paling sedikit (0,35%). Provinsi Kalimantan Utara hanya memiliki 5.035 pendidik SD (sederajat), 2.318 pendidik SMP (sederajat), 1.176 pendidik SMA (sederajat), 766 pendidik SMK (sederajat), dan 48 pendidik SLB. Provinsi Papua dengan jumlah penduduk 3.149.400 orang di tahun 2015 hanya memiliki 30.895 pendidik di lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah.

Selain secara kuantitas, pendidik juga bermasalah dari sisi kualitas. Pada tahun 2016, persentase seluruh guru yang memiliki ijazah S1 atau lebih sebesar 84,86%. Artinya, masih terdapat sebanyak 15,14% guru yang belum memiliki ijazah S1 (BPS, 2017)..

Pendidik merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan proses pendidikan, sehingga kualifikasi dan kompetensi guru perlu selalu dievaluasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dievaluasi melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, sementara kompetensi guru diperoleh melalui pendidikan profesi.

Menurut Permendiknas RI No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan guru pada SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat, dan SMK/MAK/ sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru juga harus menjadi prioritas perbaikan pendidikan.

3. Infrastruktur

Infrastruktur turut menjad bagian yang dapat menghambat akses pendidikan. Laporan Global Competitiveness Report

2015-2016 oleh World Economic Forum (WEF) Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia masih belum diikuti oleh pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal mencapai potensi penuh.

Pembangunan infrastruktur tersebut termasuk di dalamnya infrastruktur pendukung pendidikan. Selain masalah lembaga pendidikan dan masih belum terpenuhinya standar sarana-prasarana pendidikan yang memadai, Indonesia juga mendapat hambatan dari infrastruktur bagi masyarakat mengenyam pendidikan. Berita mengenai anak yang harus berjalan melewati hutan atau menyebrang sungai tanpa perahu bukanlah hal aneh di Indonesia.

4. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan turut menjad hambatan dalam meraih akses pendidikan. Meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana besar di sektor pendidikan, seiring penetapan 20% APBN adalah dana pendidikan, lewat skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), namun hal ini tak menjadikan masalah dana pendidikan selesai begitu saja.

Biaya pendidikan mencakup biaya perjalanan dari rumah menuju lembaga pendidikan, biaya seragam dan peralatan sekolah maupun biaya-biaya lain yang mendukung. Biaya pendidikan ini dalam tatanan ekonomi makro masuk dalam salah satu dari 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP) yang sangat mempengaruhi inflasi.

D. PEMBAHASAN

Filsafat pendidikan mengkaji tentang pendidikan dengan membedakan dua istilah yang berbeda tetapi hampir sama bentuknya, *Paedagogie* dan *Paedagogiek*. *Paedagogie* berarti “pendidikan” dan *Paedagogiek* artinya “ilmu pendidikan”. Perkataan *Paedagogos* yang pada mulanya berarti pelayan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian *paedagoog* (dari *paedagogos*) berarti seorang yang tugasnya, membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke arah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.

Aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan dalam pendidikan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku (Soyomukti 2010). Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha

menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah (Poerbakatja, 1982).

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Salah satu visi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembangunan pendidikan nasional harus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of child*) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Mengakomodir itu semua, pemerintah telah menjalankan berbagai program pendidikan, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 diantaranya adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, dengan target sasaran tahun 2019: Angka Partisipasi PAUD sebesar 77,2%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 94,8%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 114,1%, APM SMP/MTs sebesar 82,0%, APK SMP/MTs/Paket B sebesar 106,9%, APM SMA/MA/SMK sebesar 67,5%, APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 91,6%, dan APK Perguruan Tinggi sebesar 36,7%.

Lalu bagaimana realisasinya? Secara nasional, capaian APK PAUD 3-6 tahun masih jauh di bawah target pembangunan yaitu hanya

34,62%. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, APK PAUD di perkotaan (36,96%) lebih besar dibandingkan di perdesaan (32,29%). Hal ini disebabkan oleh akses dan fasilitas untuk pelayanan PAUD yang belum merata, dimana fasilitas PAUD lebih banyak tersedia di perkotaan.

Namun penghitungan APK tidak mempertimbangkan kesesuaian umur penduduk yang mengikuti PAUD. APK kelompok umur 3-5 dan 3-6 tahun bergantung pada banyaknya penduduk kelompok umur tersebut. Kelompok umur 3-6 tahun yang cakupannya lebih besar tentu memiliki APK lebih kecil, baik dilihat dari daerah tempat tinggal, jenis kelamin, maupun status ekonomi. Angka Partisipasi Murni (APM) mempertimbangkan kesesuaian umur penduduk yang mengikuti pendidikan usia dini.

APM PAUD pada masing-masing kelompok umur menggambarkan partisipasi anak dalam rentang umur tersebut yang mengikuti PAUD. Berdasarkan daerah tempat tinggal, APM PAUD di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. APM kelompok umur 3-5 tahun di perkotaan sebesar 34,81%, sedangkan di perdesaan lebih kecil yaitu sebesar 30,94%. Begitu pula untuk kelompok umur 3-6 tahun, APM PAUD di perkotaan sebesar 36,37%, lebih besar dibandingkan di perdesaan yang sebesar 31,70%.



Sumber: bps.go.id

Grafik 3.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia Tahun 2016

Selama tahun 2016, satu dari empat penduduk umur 5 tahun ke atas masih bersekolah, sedangkan sisanya tidak/belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Jika dikaji menurut kelompok umur, terlihat kesenjangan yang cukup nyata antar kelompok umur sekolah (7-24 tahun). Semakin tinggi kelompok umur sekolah, maka semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya.

Partisipasi bersekolah penduduk umur 7-24 tahun relatif tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, masing-masing sebesar 99,09% dan 94,88%. Tingginya partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dalam bersekolah

sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah dilaksanakan selama dua dekade terakhir.

Sayangnya, kondisi demikian tidak terjadi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Bervariasinya nilai APS yang dihasilkan antar jenjang pendidikan menyebabkan nilai APS secara keseluruhan hanya sekitar 70%. Artinya, tujuh dari sepuluh orang penduduk kelompok umur 7-24 tahun masih bersekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Idealnya, indikator ini terus meningkat mencapai 100% pada tahun 2030 nanti sesuai dengan target pendidikan pada pilar ke empat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

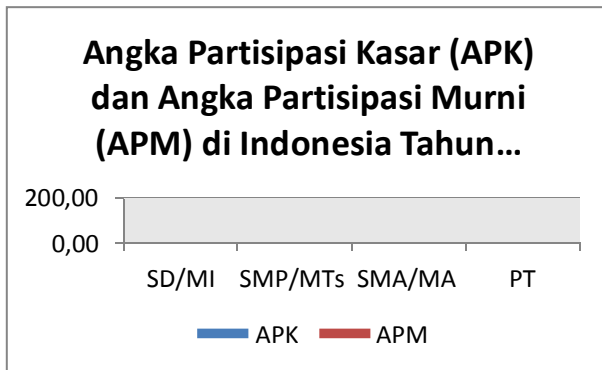
Pada tahun 2016, APS paling tinggi terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun dan paling rendah pada kelompok umur 19-24 tahun (Gambar 3,5).. Partisipasi bersekolah penduduk umur 7-24 tahun relatif tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, masing-masing sebesar 99,09 persen dan 94,88 persen yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk di kelompok umur 7-12 tahun dan 13- 15 tahun terlibat secara aktif dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan baik formal maupun non formal. Tingginya APS kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun dalam bersekolah sebagai dampak positif adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun yang sudah

dilaksanakan selama dua dekade terakhir. Melalui fenomena ini juga terlihat bagaimana umur sebagai salah satu karakteristik demografis ternyata dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap partisipasi penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan. Hal ini terjadi lebih karena semakin meningkatnya umur penduduk, maka kesempatan mereka untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi semakin terbatas baik dalam hal biaya, akses dan kemampuan akademis.

Meskipun pada kelompok umur pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) menunjukkan persentase yang relatif tinggi (lebih dari 90 persen), pada kenyataannya mereka yang bersekolah pada kelompok umur 7-24 tahun belum mencapai tiga perempat dari total penduduk kelompok umur 7-24 tahun. Hasil olah data lebih lanjut menunjukkan bahwa ada tujuh dari sepuluh orang penduduk kelompok umur 7-24 tahun masih bersekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, sedangkan sisanya memilih untuk tidak bersekolah. Pilar ke empat dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyebutkan bahwa di tahun 2030 nanti seluruh penduduk kelompok umur sekolah sudah memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan paparan fakta terkait dengan partisipasi pendidikan penduduk kelompok umur 7-24 tahun, maka fokus pembangunan pendidikan selanjutnya selain mengembangkan pendidikan dasar guna mencapai target yang diharapkan, wacana mengenai wajib belajar

dua belas tahun juga sudah mulai direncanakan dengan matang mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Program wajib belajar sembilan tahun masih menjadi sorotan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah mewujudkan pendidikan dasar bagi penduduk usia sekolah. Oleh karena itu, perlu diketahui provinsi mana saja yang partisipasi penduduk usia sekolahnya masih memerlukan perhatian khusus dari para pemangku kebijakan. Pada tahun 2016, dari 34 provinsi hampir seluruhnya sudah memiliki APS 7-15 tahun di atas 95 persen, kecuali Provinsi Papua (80,43 persen) yang menempati APS 7-15 tahun terendah. Sedangkan APS 7-15 tahun tertinggi terdapat di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 99,77 persen. Melihat realitas tersebut, maka fokus pemerintah untuk terus memberikan kemudahan akses pendidikan bagi Provinsi Papua adalah hal prioritas.



Sumber: bps.go.id

Grafik 4.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

di Indonesia Tahun 2016

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (sederajat) tahun 2016 sebesar 109,31, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (sederajat) sebesar 90,12, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (sederajat) sebesar 89,89, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) PT sebesar 23,44. APK tingkat pendidikan dasar dan menengah telah menunjukkan angka yang cukup membanggakan dengan rerata 93,21, berarti 93 orang dari 100 anak usia sekolah telah mengenyam pendidikan. Adapun APK perguruan tinggi masih menunjukkan angka rendah, hal ini tak lepas dari fokus program pemerintah pada program pendidikan dasar dan menengah.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD (sederajat) sebesar 96,82, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (sederajat) sebesar 77,95, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA (sederajat) sebesar 59,95, Angka Partisipasi Murni (APM) PT 17,91. APM untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah lebih rendah dari APK tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal ini karena APM mengukur pula kesesuaian usia peserta didik dengan lembaga pendidikan. Rerata APM tingkat pendidikan dasar dan menengah

sebesar 78,15, bermakna 78 orang dari 100 anak Indonesia bersekolah. Sedangkan perguruan tinggi masih menunjukkan angka rendah, hal ini tak lepas dari fokus program pemerintah pada program pendidikan dasar dan menengah.

Namun apabila data tersebut dikaji lebih dalam, persebarannya masih menunjukkan ketimpangan antar daerah. APM tertinggi untuk pendidikan SD (sederajat) adalah Provinsi DIY dengan APM sebesar 99,21 hanya kurang 0,79 menuju angka sempurna. APM tertinggi untuk pendidikan SMP (sederajat) adalah Provinsi Aceh dengan APM sebesar 85,73. APM tertinggi untuk pendidikan SMA (sederajat) adalah Provinsi Bali dengan angka 71,71.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa adalah provinsi dengan tingkat APM yang cukup tinggi. APM untuk pendidikan SD (sederajat) adalah sebesar 97,57, APM untuk pendidikan SMP (sederajat) sebesar 80,56, dan APM untuk pendidikan SMA (sederajat) sebesar 60,27. APM tingkat SMA (sederajat) saja masih menunjukkan angka rendah meski Jawa adalah pusat ekonomi Indonesia.

Sedangkan APM terendah, sama halnya dengan APS, dipegang oleh Provinsi Papua, baik untuk tingkat SD (sederajat), SMP (sederajat) dan SMA (sederajat). APM untuk pendidikan SD (sederajat) adalah sebesar 78,66, APM untuk pendidikan SMP sebesar 54,26, dan APM untuk pendidikan SMA (sederajat) sebesar

43,27. Melihat realitas tersebut, maka fokus pemerintah untuk terus memberikan kemudahan akses pendidikan bagi Provinsi Papua adalah hal prioritas.

E. METODE DAN TEKNIK

Beberapa cara dalam program layanan bimbingan dan konseling mengenai bentuk-bentuk yang ada dalam teknik bimbingan individual yang dikemukakan oleh Fenti Hikmawati adalah sebagai berikut.

1. Informasi Individual

Informasi individual berfungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang membutuhkan informasi tentang cara bergaul dengan teman, cara mengerjakan tugas dengan baik, cara mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya, maupun cara menghadapi guru ataupun orang tua. Siswa yang merasa terkadang mereka telah salah dalam hal mengerjakan tugas, memilih teman, ataupun bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, maka dapat dibantu dengan teknik informasi individual ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan informasi-informasi tersebut kepada para siswa bisa dilakukan dengan cara seperti memberikan informasi lisan kepada para siswa, baik itu secara individual ataupun secara kelompok, memberikan informasi kepada para siswa,

berdiskusi dengan guru kelas ataupun yang lainnya, dan lain sebagainya.

2. Penasehatan Individual

Salah satu yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam menangani kesulitan yang dihadapi siswa adalah memberikan nasehat. Nasehat yang diberikan ini dapat dilakukan dengan cara individual maupun kelompok. Nasehat apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa tentu saja sesuai dengan kebutuhan setiap siswa.

3. Pengajaran Remedial Individual

Pengajaran remedial diperuntukkan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu. Sehingga guru pembimbing akan melakukan remedial terhadap siswa tersebut agar mencapai standar yang telah ditentukan.

4. Penyuluhan individual

Penyuluhan digunakan untuk menangani masalah yang bersangkutan dengan masalah psikologis seperti halnya: tidak memiliki konsentrasi dalam belajar, sulit bergaul dengan teman sebayanya, tidak berminat pada mata pelajaran tertentu

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.

Akses pendidikan bagi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya: pendapatan masyarakat, budaya masyarakat dan struktur sosial. Sedangkan pemerataan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mengalami berbagai macam hambatan, yakni: ketersediaan lembaga pendidikan, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan insfrastruktur, infrastruktur turut menjad bagian yang dapat menghambat akses pendidikan, dan biaya pendidikan.

Akses pendidikan Indonesia telah menunjukkan angka yang cukup baik, namun belum memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan dalam RPJM 2014-2019. Akses pendidikan bagi masyarakat tingkat pra-sekolah masih relatif rendah jika dibandingkan tingkat dasar dan menengah yang memang disokong oleh program wajib belajar. penignkatan kualitas pendidikan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

DAFTAR PUSATAKA

- BPS. (2017). *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2016*. Jakarta: BPS.
- Hamalik, Oemar. (2007). *Evaluasi Kurikulum Pendekatan Sistematis*. Bandung: Yayasan Al Madani Terpadu.
- Hikmawati, Fenti. (2011). *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali.
- Marbun, B.N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poerbakawtja, Soegarda . (1982). *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Poerwadaminta, W.J.S. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai. Pustaka.
- Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.
- Richey, Robert William. (2000). *Planning for Teaching: An Introduction to Education*. New York: McGraw-Hill.

Soyomukti, Nurani. (2010). *Teori-Teori Pendidikan*. Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media

Syah, Muhibin. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.

www.bps.go.id.

LAMPIRAN IV



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DALAM KERANGKA NEGARA
KESEJAHTERAAN**

**TUGAS MATA KULIAH ANALISIS KEUANGAN
PERTAHANAN
MATERI SOCIAL WELFARE KOL.
CHB (K) DR. SUNDARI, SE, MM**

OLEH : KELOMPOK IV

BAMBANG PRASOJO W.	120170203000
INDRIANA SULISTYOWARNI	120170203012
NURUMA ULI NUHA	120170203000
SETIO ADININGSIH P	120170203021
TATAS WERDININGTYAS	120170203022
YUDHA DWI P	120170203023

**PRODI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
FEBRUARI 2018**

a. PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum

Pertumbuhan adalah sarana yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah tujuan dari pemerintah dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kesehatan, asupan makanan dan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya. Namun dalam kasus ini, biaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seringkali tidak sepenuhnya dianggap sebagai analisis kesejahteraan. Indikator kesejahteraan sosial seringkali diasumsikan menggunakan produktifitas nasional. Apabila kita membahas tentang kesejahteraan sosial masyarakat, maka tidak akan pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dinamis yang melibatkan proses peningkatan kapasitas produksi. Menurut Clarke (2003), kesejahteraan didefinisikan sebagai fungsi konsumsi terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sebagai fungsi lingkungan, fungsi surplus konsumen, sebagai fungsi tertimbang dengan probabilitas bertahan hidup dan sebagai kecenderungan konsumsi marjinal.

Namun pendapat lain menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan merupakan fungsi dari pengeluaran dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Komponen penting dari kesejahteraan sosial adalah produksi

rumah tangga, tingkat perekonomian suatu keluarga, akses kebebasan menikmati sumber daya alam, kenyamanan seseorang, kebebasan individu dan distribusi pendapatan. Sehingga berdasarkan berbagai pendapat yang telah dijelaskan Clarke (2003), tidak ada pengertian khusus tentang kesejahteraan sosial karena dapat diukur dan dapat didefinisikan dengan berbagai cara.

Pendapat berbeda menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial di negara maju dikenal dengan istilah jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*security insurance*) yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (Husna, 2014). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Di Indonesia, kesejahteraan sosial diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa *“setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”*.

Kesehatan merupakan kontributor utama dalam kesejahteraan ekonomi, jika suatu negara mampu meningkatkan perekonomiannya, harus diikuti dengan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Anggaran pendapatan negara dalam APBN telah mengatur porsi untuk pengeluaran public yang digunakan pada sektor kesehatan. Kesehatan dalam pengertiannya diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009, pasal 1 *“kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”*.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan, Indonesia memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada UU Nomor 40 Tahun 2004, pasal 1 ayat 1 *“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk*

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”

Jaminan Kesehatan (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penulisan tugas *Social Welfare* dalam materi Jaminan Kesehatan dalam kerangka negara kesejahteraan adalah meningkatkan pengetahuan mahasiswa di bidang *Social Welfare* dan menganalisis bagaimana pelaksanaan jaminan kesehatan di Indonesia.

b. Tujuan

Setelah melaksanakan penulisan tugas *Social Welfare* dalam materi Jaminan Kesehatan dalam kerangka

negara kesejahteraan, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Indonesia dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Indonesia.

III. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 *“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”*. Jenis program Jaminan Sosial meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Setiap warga negara memiliki hak untuk sejahtera dan hidup sehat serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah terutama kepada masyarakat yang kurang beruntung atau masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses kesehatan secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat hidup sehat, maka pemerintah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk menjamin agar peserta atau warga negara yang mengikuti program jaminan sosial nasional dalam bentuk kesehatan dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (UU Nomor 40 Tahun 2004, Pasal 19, Ayat 2).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1 *“Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”*.

Indonesia dalam upaya untuk mencapai UHC (*Universal Health Coverage*) ditahun 2019 yang mewajibkan seluruh masyarakat atau warga negara Indonesia mengikuti program yang digagas oleh pemerintah ini, manfaat yang dijamin oleh program JKN berupa pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan termasuk obat dan bahan medis, pemberian manfaat ini dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (Putri, 2014).

Program Jaminan Kesehatan Nasional berbeda dengan penyelenggaraan program jaminan/asuransi kesehatan privat atau komersil. Asuransi kesehatan komersil berlangsung berdasarkan

kesepakatan jual beli antara perusahaan asuransi dengan pembeli produk asuransi (Putri, 2014). Dalam program asuransi kesehatan yang bersifat komersil, pemerintah hanya mengatur tentang perijinan badan usaha dan tata cara perjanjian jual-beli, sedangkan besaran iuran, manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat dan tata cara pengelolaan diatur sendiri oleh perusahaan asuransi tersebut.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program prioritas pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya. Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah berperan dalam menentukan kebijakan (regulator), pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan nasional (JKN).

Terdapat tiga aktor utama yang berperan sebagai regulator yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tugas utama DJSN adalah merumuskan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran serta melakukan pengawasan terhadap BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), sedangkan pengawasan juga dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pada hakikatnya Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan kepada peserta secara menyeluruh, terstandar, dengan sistem pengelolaan yang terkendali mutu dan biaya dan terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Jaminan Kesehatan Nasional bersifat *nirlaba* dalam artian pengelolaan dana digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta dan setiap surplus akan disimpan sebagai dana cadangan dan untuk peningkatan manfaat dan kualitas layanan. Serta prinsip Ekuitas dalam pelayanan Jaminan Kesehatan adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Prinsip ini diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar prosentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.

c. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial dari negara termasuk jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Sosial sangat penting dilakukan pemerintah dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan dalam menggerakkan sistem perekonomian negara yang manfaatnya dapat mensejahterakan kehidupan bangsa.

Bangsa yang sehat akan mampu berkontribusi dalam usaha pembangunan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Faktor Pendapatan

Indonesia dikenal dengan negara agraris dan maritime, dimana sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan. Namun dengan perkembangan perekonomian, Indonesia telah menjadi negara industri, pembangunan industri untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Masyarakat mulai meninggalkan desa dan berpindah ke kota, sedangkan matapencaharian petani dan nelayan masih dilakukan oleh masyarakat marjinal yang hidup dalam angka kemiskinan. Manusia urban yang tidak memiliki pendidikan

yang tinggi menggantungkan dirinya untuk dapat bertahan hidup dengan bekerja menjadi buruh kasar di pabrik dengan sistem kerja kontrak (*outsourcing*) dengan gaji sesuai UMR daerah masing-masing. Semakin meningkatnya angka pertumbuhan manusia di Indonesia tiap tahun dan menumpuknya manusia urban di perkotaan, membuat beban pemerintah semakin bertambah dalam pemenuhan kesehatan warga negaranya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat. Setiap perusahaan diwajibkan untuk ikut serta dalam program JKN yang berguna melindungi seluruh pekerja dengan cara pemotongan gaji pekerja untuk membayar iuran kesehatan tersebut.

Pemerataan kesehatan nasional oleh pemerintah dilakukan dengan cara membayar iuran kesehatan bagi masyarakat yang mampu sesuai dengan porsi gaji yang didapatkan, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mampu akan dibantu oleh pemerintah serta dibantu oleh masyarakat yang mampu membayar iuran, karena sebagian iuran kesehatan yang mereka bayarkan akan disumbangkan untuk masyarakat

yang tidak mampu. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia dari tahun 2010-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia

Tahun	Pendapatan/Kapita (Juta)	Jumlah Penduduk (Jt Jiwa)
2010	28,2	238,5
2011	32,4	242
2012	35,1	245,4
2013	38,4	248,8
2014	41,9	252,
2015	45,2	255,5
2016	48	258,7

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan pendapatan perkapita penduduk Indonesia setiap tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 dari Rp. 28,2 jt hingga mencapai Rp 48 jt. Hal ini menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan semakin meningkat dan masyarakat memiliki akses lebih besar untuk dapat menikmati kesehatan yang lebih baik.

Peningkatan pendapatan perkapita berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Menurut kelompok kami, hal ini disebabkan karena ketika masyarakat menerima *income* dari hasil kerjanya dan merasa bahwa hidupnya telah sejahtera, maka mereka tidak akan khawatir jika memiliki anak lebih dari dua orang, karena akses kesehatan mereka lebih mudah akibat *income* masyarakat tinggi.

Dengan adanya program JKN ini setidaknya dapat membantu masyarakat untuk dapat mengakses kesehatan lebih mudah. Jumlah peserta program JKN per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

PESERTA	JUMLAH (Jiwa)	KETERANGAN
Pegawai Negeri Sipil	13,851,821	Pekerja Penerima Upah
TNI	1,574,303	
POLRI	1,248,544	
BUMN	1,480,978	
BUMD	178,206	
Perusahaan Swasta	26,557,190	
Pekerja Mandiri	25,397,828	
Bukan Pekerja	5,008,454	

APBN	92,380,352	Penerima Bantuan Iuran
APBD	20,305,273	

Tabel 2. Peserta Program JKN

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2018

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa total peserta yang mengikuti program JKN sebesar 187,982,949 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebesar 261,900,000 jiwa, artinya sebesar 71,78% masyarakat Indonesia telah mengikuti program JKN yang diselenggarakan pemerintah dan sekitar 28,23% masyarakat Indonesia yang tidak ikut dalam program JKN.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: PBI Jaminan

Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dan Bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:

- a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya

2) Akses Kesehatan

Kesehatan merupakan modal utama yang perlu diperjuangkan setiap individu untuk dapat hidup sejahtera dalam membangun keluarga serta kehidupan sosial. Akses kesehatan masyarakat saat ini menjadi salah satu isu permasalahan yang mendasari program JKN terbentuk.

Akses kesehatan masyarakat di desa, daerah perbatasan serta daerah pedalaman sulit untuk didapatkan oleh warga, sedangkan akses kesehatan masyarakat yang tinggal di kota termasuk kabupaten dan provinsi mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Perbedaan yang menonjol antara fasilitas akses kesehatan di desa dan kota membuat program Jaminan Kesehatan Nasional harus menyediakan kemudahan baik tenaga medis dan ketersediaan obat terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Data pos kesehatan pada Faskes tingkat pertama peserta JKN-KIS adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Faskes Pertama Peserta JKN – KIS

Pos Kesehatan	Jumlah Keikutsertaan JKN-KIS	Prosentase (%)
Puskesmas	7,056	32,9
Puskesmas Rawat Inap	2,787	13,0

Klinik Pratama	4,319	20,1
Klinik TNI	665	3,1
Klinik POLRI	560	2,6
RS Daerah Pratama	19	0,1
Dokter Praktek	4,878	22,7
Dokter Gigi	1,189	5,5

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Selain dari ketersediaan pos kesehatan di daerah pedesaan khususnya daerah perbatasan dan daerah pedalaman yang memang memiliki keterbatasan akses transportasi, namun ketersediaan dokter praktek atau dokter umum yang di tugaskan di daerah pedalaman dan daerah perbatasan juga perlu dipertimbangkan. Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pos kesehatan mulai dari dokter praktek hingga Rumah Sakit Daerah wajib mengikuti program JKN demi terwujudnya kemudahan akses kesehatan bagi warga yang berada di pedesaan terutama daerah pedalaman dan perbatasan. Kemudahan administrasi bagi peserta JKN perlu ditingkatkan oleh pemerintah serta peserta yang tidak mampu membayar iuran dapat dibantu oleh pemerintah serta masyarakat yang mampu secara finansial dan ekonomi mebayar iuran untuk kesehatan.

3) Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak yang didapatkan oleh peserta JKN adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama antara seluruh peserta JKN. Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa *“kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”*. Hak yang didapatkan oleh peserta yang mengikuti program JKN adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hak dan Manfaat Peserta JKN

Pelayanan	Jenis Manfaat
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	Administrasi Pelayanan
	Pelayanan Promotif
	Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
	Tindakan medis non spesialis
	Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
	Transfusi darah sesuai kebutuhan medis

	Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama
	Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi
<p>Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan</p>	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi pelayanan 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialis 3. Tindakan medis spesialis sesuai indikasi medis 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 5. Pelayanan alat kesehatan implant 6. Pelayanan penunjang diaknosis lanjutan 7. Rehabilitasi medis 8. Pelayanan darah 9. Pelayanan dokter forensik 10. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
	<p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan inap non intensif

	2. Perawatan inap di ruang intensif 3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri
--	--------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Pada dasarnya, individu selalu menginginkan hidupnya terpenuhi baik secara finansial maupun secara sosial. Individu akan melakukan apapun untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Individu selalu akan melihat apa manfaat yang akan ia peroleh ketika mengikuti suatu kegiatan dalam hidupnya. Jika manfaat yang diperoleh banyak maka individu tersebut akan berusaha memperoleh keuntungan tersebut, seperti prinsip individu pada ilmu ekonomi menjelaskan bahwa manusia selalu ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Terbukti bahwa banyak individu di Indonesia tertarik mengikuti program JKN ini karena manfaat yang ditawarkan cukup banyak, serta besar iuran yang dibebankan kepada peserta JKN tidak terlampaui mahal. Besarnya iuran program JKN adalah sebagai berikut

Tabel 5. Besar Iuran JKN menurut Tingkat Pekerja

Jenis Peserta	Iuran Wajib	Keterangan
PNS, TNI/ POLRI, Pejabat	5% dari gaji pokok per bulan	3% dibayar oleh pemberi kerja

Negara, Pegawai Pemerintah Non PNS		dan 2% dibayar oleh peserta
PPU BUMN, BUMD dan Swasta	5% dari gaji pokok per bulan	4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta
Iuran Keluarga PPU	1% dari gaji pokok per orang per bulan	dibayar peserta
Iuran Kerabat Keluarga PPU	a. Rp. 25,500/bulan b. Rp. 51,000/bulan c. Rp. 80,000/bulan	a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I

Ket : PPU (Pekerja Penerima Upah)

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa, tingginya jumlah peserta JKN dari total jumlah penduduk di Indonesia yaitu sebesar 71,78% karena iuran yang dibayarkan individu tidak begitu mahal dan langsung dipotong dari hasil upah yang mereka terima setiap bulan. Misalnya seorang individu yang bekerja di perusahaan swasta mendapatkan gaji Rp 1,000,000 dan harus membayar iuran kesehatan sebesar 5% atau Rp 50,000, sehingga gaji pokok yang didapatkan sebesar Rp 950,000. Ketertarikan masyarakat pada

program JKN didasarkan pada besarnya iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta tidak terlalu mahal dan manfaat yang didapatkan dari program ini adalah manfaat kesehatan medis karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Masyarakat yang tidak mampu secara finansial membayar iuran ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan iuran yang dibayarkan berasal dari APBN ataupun APBD. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem JKN di Indonesia, menghadapi UHC (*Universal Health C*) yang akan dihadapi Indonesia tahun 2019 mendatang.

d. HAMBATAN YANG DIHADAPI

Setiap program kerja yang dilakukan pemerintah guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dalam perjalanannya, program JKN di Indonesia telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan akses kesehatan bagi warga yang ikut serta dalam program tersebut.

Program JKN tidak hanya memberikan manfaat untuk individu namun juga memberikan manfaat ekonomi untuk negara. Berdasarkan berita yang dikutip dari Oktarinda (2017) JKN diproyeksikan dapat berkontribusi terhadap perekonomian

Indonesia hingga Rp 289 Triliun hingga tahun 2021. Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto mengatakan bahwa *“JKN-KIS memiliki dampak yang bersifat berkelanjutan, program tersebut mampu mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan, dengan bertambahnya peserta JKN akan meningkatkan investasi disektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan”*.

Program JKN yang diselenggarakan pemerintah akan meningkatkan harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN berkontribusi sebesar 0,84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1% kepesertaan JKN setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 1 juta/tahun/kapita (Oktarinda, 2017).

Tantangan yang akan dihadapi negara kedepan adalah bonus demografi yang diterima oleh Indonesia. Bonus demografi untuk menghadapi Indonesia tahun 2045 merupakan bonus yang akan didapatkan Indonesia sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan (Nuha, 2017).

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan. Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode 2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19% pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk diperkirakan kembali menurun menjadi 0,6% pada periode 2030-2035 saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi (BPS, 2018).

Dengan adanya program JKN yang diselenggarakan pemerintah saat ini mampu membantu masyarakat selain kesehatan juga mengontrol jumlah anak yang akan dilahirkan. Meskipun pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat, masyarakat diharapkan dapat membatasi jumlah anak agar tidak menjadi beban negara kedepan. Dalam misi pemerintah yang ingin mencapai UHC ditahun 2019, tugas pemerintah membenahi sistem JKN agar seluruh masyarakat dapat mengikuti program kesehatan ini.

Sesuai dengan tujuan *Universal Health Coverage* adalah memastikan semua orang akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan pembayaran. UHC ditetapkan berdasarkan konstitusi WHO 1948 yang

menyatakan kesehatan merupakan hak asasi manusia (Pusat Informasi Jaminan Kesehatan Indonesia, 2018).

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program JKN berdasarkan BPJS Watch yang dikutip dari <http://www.republika.co.id> meliputi: pasien kerap diminta membeli obat sendiri, membayar biaya perawatan dan obat karena total biaya sudah melebihi paket INA CBGs, pasien diminta membeli darah, menunggu jadwal operasi berbulan-bulan, adanya penolakan RS dengan alasan kamar penuh. "Tetapi, kalau pasien umum bisa langsung diterima", jauhnya layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan, keterbatasan kemampuan finansial untuk menjalani proses pengobatan. (<http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/06/24/nqfssa4-bpjs-watch-pelaksanaan-jkn-banyak-masalah>).

Selain berbagai permasalahan tersebut, terdapat pula permasalahan antara pihak BPJS dengan RS yang melayani pasien BPJS seperti dikutip dalam <https://news.detik.com/berita/d-3643405/icw-temukan-49-kecurangan-terkait-jaminan-kesehatan-di-15-provinsi> yaitu terkait klaim tagihan BPJS Kesehatan untuk mendapat kelebihan bayar pihak RS mendiagnosa pasien tidak sesuai dengan penyakitnya, permasalahan lain yaitu berdasar hasil temuan audit BPK 2016 di JKN menyampaikan proses verifikasi belum optimal

dan terdapat kelebihan klaim pembayaran pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebesar Rp 2,69 miliar, adanya bentuk kecurangan oknum petugas BPJS yaitu peserta sudah rutin membayar iuran bulanan namun saat digunakan berobat kartu tidak bisa digunakan, kecurangan yang dilakukan pihak RS di Samarinda adalah pembatasan rawat inap.

Contoh penemuan pasien BPJS selalu diberitahu ada pembatasan rawat inap max 4-5 hari, permasalahan di Blitar yaitu temuan kecurangan terjadi pada klaim palsu, penggelembungan tagihan obat dan alkes, pasien rujukan semu, memperpanjang masa perawatan bisa dilakukan beragam modus. Ada juga manipulasi kelas perawatan, penyimpangan prosedur dan meminta *cost sharing* tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. PEMBAHASAN

Beberapa waktu yang lalu (Februari 2017), Oxfam (*Oxford Committe for Famine Relieve*) merilis potret ketimpangan kesejahteraan Indonesia. Satu persen warga terkaya negeri ini menguasai hampir separuh (49 persen) kekayaan nasional. Berikutnya empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40 persen penduduk termiskin, atau sekitar 100 juta orang. Dalam satu hari, pendapatan dari bunga orang

terkaya di Indonesia melampaui 1.000 kali belanja orang miskin untuk kebutuhan pokok selama satu tahun¹. Potret kesenjangan di atas cukup mengejutkan, tidak salah jika Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi keenam tertinggi di dunia.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun yang lalu, dimana 97,5 persen aset nasional masih dimiliki oleh 2,5 persen bisnis konglomerat. Sementara itu, sisa aset nasional dimiliki oleh kelompok ekonomi kecil yang jumlah berbanding terbalik dengan aset yang dimiliki oleh konglomerasi, 97,5 persen dari seluruh dunia usaha². Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia tersebut terlihat dari masih meluasnya masalah kemiskinan. Pada kurun waktu 1976-1996, tingkat kemiskinan menurun drastis dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen. Akan tetapi jumlah itu meningkat secara spektakuler pasca krisis ekonomi 1998.

¹ Wijayanto, Ketimpangan Ekonomi dan Media, Koran Tempo, Senin 20 Maret 2017, halaman 11.

² Suharto, Edie dalam Welfare State dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, mengungkapkan bahwa pada tahun itu, Indonesia adalah salah satu macan ekonomi Asia, dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pertahun. Namun angka pertumbuhan yang begitu tinggi tidak disertai dengan pemerataan pendapatan.

Pada akhir tahun 1999, *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3 persen dari seluruh penduduk (BPS-UNDP, 1999). Angka kemiskinan itu akan bisa bertambah jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. Kategori kemiskinan meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan ataupun yang memiliki pekerjaan tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beberapa metode untuk mengukur angka kemiskinan di suatu negara yang masing-masing akan menghasilkan gambaran yang berbeda-beda atas situasi tersebut. Salah satu pendekatan yang seringkali digunakan untuk mengukur angka kemiskinan adalah dengan melihat dimensi pendapatan atau tingkat konsumsi.

Jika kita menggunakan ukuran daya beli sebesar \$ 2 per hari, di Indonesia terdapat 110 juta rakyat miskin atau setara dengan 40 persen populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, jika menggunakan batas pengeluaran di angka \$ 2,10 per hari, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai

103,2 juta jiwa atau 39,6 persen³. Dari sekian angka-angka tersebut, memperlihatkan kegagalan konsep *developmentalism* (pembangunanisme) yang hanya melihat pembangunan berlandaskan pertumbuhan semata. Yang mengakibatkan tingginya kesenjangan pendapatan atau kesejahteraan.

Maka dalam konsep negara kesejahteraan, tingginya kesenjangan tersebut harus menjadi tanggungjawab penuh negara, kehadiran dalam proses bernegara. Secara sederhana, negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Dalam konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan, memaknai kesejahteraan pada kondisi sejahtera (*well being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian layanan sosial dan tunjangan sosial⁴. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang

³ World Bank Group. 2016. Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change. Washington, DC: World Bank.

⁴ Suharto, Edi. 25 Juli 2006. *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara, Makalah Seminar, "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia*, IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta.

meletakkan dasarnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian peran yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada warganya. Dalam pendekatan negara kesejahteraan, ada 4 (empat) model⁵ yang berlaku di beberapa negara, diantaranya: *pertama*, model universal. Pelayanan sosial diberikan secara merata oleh negara kepada seluruh penduduknya, baik dia kaya ataupun miskin. Model ini disebut *the Scandinavian Welfare State* yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Finlandia dan Denmark.

Model yang dijalankan oleh Swedia, dianggap sebagai model yang ideal dan berkembang lebih maju daripada model Inggris, Australia ataupun Amerika Serikat. *Kedua*, Model Korporasi atau *Work Merit Welfare States*. Model ini berasal dari kontribusi pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Model ini memberikan pelayanan sosial kepada mereka yang mampu memberikan kontribusi atau yang bekerja, melalui skema asuransi sosial. Negara-negara yang menerapkan model ini adalah Jerman dan Austria, yang sering disebut dengan model Bismark. *Ketiga*, Model Residual. Dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru.

Pelayanan sosial diberikan khususnya kebutuhan dasar diberikan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung

⁵ *Ibid.*

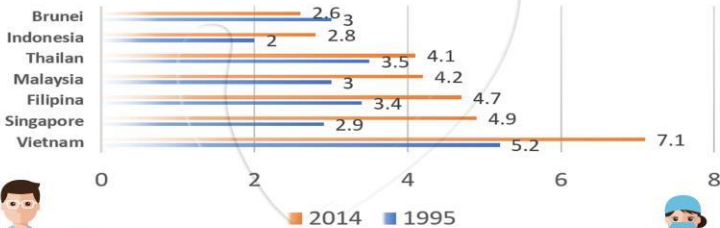
(*disadvantaged groups*), seperti pengangguran, miskin, penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus, hingga orang lanjut usia (yang tidak kaya). *Keempat*, Model Minimal. Ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil, dan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal. Umumnya diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota tentara, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Negara-negara yang menggunakan model ini seperti Spanyol, Italia, Chile, Brazil, Korea Selatan, Filipina, Srilangka, dan Indonesia.

Selain model, Suharto juga mengklasifikasikan negara-negara berdasarkan pengeluaran untuk pembangunan sosial. Suharto melihat, besar kecilnya pendapatan negara atau kekayaan sebuah negara, tidak lantas menjadikan negara itu juga memberikan anggaran belanja yang besar pula untuk pembangunan sosial. Artinya, kemampuan ekonomi suatu negara tidak menentukan besarnya belanja pembangunan sosialnya. Spektrum ini dapat dilihat dari pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, yang dikategorikan/diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori negara. Pertama, negara sejahtera, yang memiliki GDP tinggi dan pengeluaran sosial yang tinggi pula. Negara-negara yang terdapat dalam kategori ini meliputi negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat yang menerapkan model negara kesejahteraan universal dan korporasi. Kedua, Negara Baik Hati, memiliki Pembangunan

ekonomi yang relatif rendah namun keadaan tersebut tidak menghambat negara untuk melakukan belanja pembangunan sosial yang relatif tinggi. Negara-negara yang termasuk didalamnya adalah Yunani dan Portugal. Ketiga, Negara Pelit, dengan Pembangunan Sosial yang relatif rendah. Sedangkan pembangunan ekonominya tinggi, negara yang termasuk di dalamnya adalah Jepang dan Amerika Serikat. Keempat, Negara Lemah, dengan Pembangunan ekonomi dan sosialnya yang rendah. Indonesia, Kamboja, Laos dan Vietnam termasuk di dalamnya.

Sesuai yang telah disebutkan di atas, Indonesia merupakan negara yang menggunakan model minimal. Hal tersebut terlihat dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang relatif masih kecil, khususnya dibidang kesehatan, dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Dapat terlihat seperti gambar di bawah ini.

PENGELUARAN KESEHATAN, TOTAL (% TERHADAP PDB)



Sumber : Worldbank | Dialah : Visi Teliti Saksama | Infografis : Arizar Ghiffari

Negara-negara maju telah lama mendanai layanan kesehatan dengan porsi 70- 85% bersumber dana publik. Sumber dana publik di Mungtai telah menembus 87%. Sementara Pemerintah Malaysia dalam dua dekade menanggung 50-60% belanja kesehatan rakyatnya. Pemerintah China yang di tahun 2000 sama dengan kita, kini telah menanggung 55% belanja kesehatan seluruh rakyatnya. Tetapi, Pemerintah Indonesia (termasuk belanja JKN/asuransi sosial) sejak 20 tahun silam hanya menanggung sekitar 40% belanja kesehatan seluruh rakyat, terendah. Belanja publik kesehatan Indonesia hanya US\$ 36/kapita di tahun 2014, yang dikelola BPJSK hanya sekitar US\$ 27 per kapita per tahun. Rata-rata belanja kesehatan total dunia per kapita di tahun yang sama

mencapai US\$ 1.061. Jangan heran jika kualitas dan produktifitas bangsa kita jauh tertinggal (Perkumpulan Prakarsa, 18).

Salah satu program kesejahteraan sosial yang diterapkan oleh Indonesia adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan secara nasional menggunakan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Melalui prinsip tersebut, kepesertaan JKN bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip tersebut, diharapkan akan terjadi gotong royong antar peserta dalam dua hal. *Pertama*, gotong royong risiko sakit dari penduduk sehat kepada penduduk sakit. *Kedua*, gotong royong risiko pengeluaran kesehatan yang besar/katastropik dari penduduk kaya kepada penduduk miskin. Dengan demikian, hal ini akan mendukung terselenggaranya prinsip ekuitas (kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memiliki halangan, khususnya halangan finansial, guna mengakses pelayanan kesehatan⁶.

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta

Karena sifat kesehatan yang *uncertainty*, eksternalitas dan informasi asimetrik yang tinggi dan cepat, maka pendanaan kesehatan tidak dapat diserahkan begitu saja kepada masing-masing rumah tangga. Pendanaan kesehatan oleh rumah tangga merupakan bagian pendanaan *out of pocket* untuk masyarakat Indonesia saat ini. Kesehatan merupakan pendanaan yang paling regresif, paling memberatkan penduduk berpenghasilan rendah, sehingga pendanaan kesehatan perlu untuk dikelola secara sentral oleh negara atau lembaga yang mewakilinya. Oleh karena sifatnya yang seperti itu, maka tidak ada negara maju dan menengah yang membiarkan rakyatnya membayar sendiri-sendiri biaya berobat. Pembiayaan dibebankan kepada seluruh warga negara melalui pajak atau iuran jaminan kesehatan. Prinsipnya ketika mereka sehat, mereka akan membayar dan saat mereka sakit tidak perlu lagi untuk membayar. Tujuannya sederhana, mewujudkan ekuitas egaliter yakni layanan kesehatan yang berkualitas memadai sesuai kebutuhan medis seseorang terlepas dari kondisi ekonomi orang tersebut. Itulah tujuan utama pendanaan publik, *universal health coverage* yang dunia telah berkomitmen mewujudkan hal tersebut pada tahun 2030

f. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan JKN *merupakan* kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak rakyat atas kesehatan yang bisa kita maknai sebagai *political will* pemerintah. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pembangunan sosial harus dimaknai sebagai bagian dari investasi sosial dan manusia.

Program JKN yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan bagian dari *political will* tersebut, akan tetapi dengan sekian permasalahan yang dihadapi saat ini. Pemerintah perlu memberikan bukti nyata program itu bukan hanya setengah-setengah. Dalam hal ini, Pemerintah perlu ketegasan dalam memaksa warganya untuk berkontribusi secara langsung terhadap JKN, dan tentunya lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Termasuk dalam hal ini rumah sakit, karena perlu disadari bahwa pemenuhan hak warga dalam masalah kesehatan adalah pertarungan kepentingan antara pemerintah dengan pengusaha (kesehatan).

Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai belanja sosial khususnya JKN dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat semesta. Maka ada ada dua pendekatan dalam rekomendasi terhadap program JKN, yaitu pendekatan kemitraan dan operasional. Dimana pendekatan kemitraan ini harus berdasarkan

pada prinsip kesetaraan (*equality*), *mutual respect*, *compatible/two way communication*, keterbukaan (*openess*); manfaat bersama (*mutual benefit*), *defined expectation*, *shared goals*, *complementary skills*, *synergy*, *result oriented*; dan tanggung jawab (*responsibility*). Sedangkan dalam pendekatan operasional meliputi aspek: kebijakan, perlu adanya peraturan khusus mengenai pengelolaan program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, yang disertai atau didukung dengan peraturan lainnya. Aspek pengelolaan dana, mengembangkan mekanisme iuran yang ‘memaksa’ bagi seluruh peserta BPJS. Aspek pelayanan, perlu dibuat sistem informasi terintegrasi yang mencakup semua wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Lola. Purbolaksono, Arfianto. Dan Nur, Asrul Ibrahim. 2014. *Jaminan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Kota: Dari Implementasi Hingga Harapan Pembangunan Kesejahteraan Paska Pilpres 2014 (Studi Kasus DKI Jakarta)*. The Indonesian Institute: Jakarta.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2018. *Jumlah Peserta BPJS*. <https://bpjs-kesehatan.go.id/> (diakses 28 Januari 2018 pukul 08.50 WIB)
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi 2017*. Jakarta. www.bps.go.id (diakses 27 Januari 2018 pukul 20.00 WIB).
- Clarke, M. 2003. *Is Economic Growth Desirable ? A Welfare Economic Analysis of The Thai Experience*. Thesis for degree of Doctor of Philosophy. Centre for Strategic Economic Studies. Victoria University.
- <http://validnews.co/JKN--JAMINAN-KESEHATAN-BAGI-SELURUH-RAKYAT-INDONESIA-V0000881>. JKN :

Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Diakses:
Sabtu, 27 Januari 2018. Pukul: 23.25 WIB.

http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_40.htm. Diakses:
Minggu, 28 Januari 2018. Pukul: 01.09 WIB.

Husna, N. 2014. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.
Jurnal Al-Bayan, Vol 20 (29) : 45-58

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *Satu Tahun
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*. Direktorat
Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional: Jakarta.

Lauranti, Maria. Dkk. (2017). *Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Nasional: Ekuitas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan
Hampir Miskin di Indonesia*. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta.

Nuha, N.U. 2017. *Cyber Security: Membangun Pertahanan
Indonesia Melalui Bela Negara Tanpa Senjata*. Essay
Sastra Fest Indonesia. Jakarta.

Oktarinda, A. 2017. *Begini Dampak Program JKN-KIS bagi Perekonomian Indonesia*.
<http://finansial.bisnis.com/read/20170815/215/681359/begini-dampak-program-jkn-kis-bagi-perekonomian-indonesia> (diakses 28 Januari 2018, pukul 13.10 WIB)

Pusat Informasi Jaminan Kesehatan Indonesia, 2018. *Universal Health Coverage (UHC)*.
<http://jkn.jamsosindonesia.com/topik/detail/uhc#.Wm107nmySM8> (diakses 27 Januari 2018, pukul 21.20 WIB).

Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. Putri, A.E. 2014. *Paham JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Seri Buku Saku Ke-4. Fredrich Ebert Stiftung dan Dewan Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta.

<http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/06/24/nqfssa4-bpjs-watch-pelaksanaan-jkn-banyak-masalah>. *BPJS Watch-Pelaksanaan JKN Banyak Masalah*. Diakses tanggal 29 Januari 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3643405/icw-temukan-49-kecurangan-terkait-jaminan-kesehatan-di-15-provinsi>.
ICW Temukan 49 Kecurangan Terkait Jaminan Kesehatan di 15 Provinsi. Diakses tanggal 29 Januari 2018.

World Bank Group. 2016. *Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in an Era of Demographic Change*. Washington, DC: World Bank.



SRI SUNDARI

lahir di Jakarta, pada Tanggal 8 Mei 1965,

Riwayat Pendidikan umum: (1) Diploma Tiga Fakultas Teknik Informatika Komputer di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Lulus Tahun 1989,

(2) Strata Satu Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PBM Jakarta Lulus Tahun 2004, (3) Magister Manajemen Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu Asmi Pulo Mas Jakarta Lulus Tahun 2006, (4) Pada Tahun Akademik 2015 telah selesai Studi Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta,

Riwayat Pendidikan Militer : (1) Sekolah Perwira Wajib Militer Tahun 1991 dengan pangkat Letnan dua (Letda), (2) Sekolah Peralihan Perwira (Sekalihpa) Tahun 1994, (3) Sekolah Komando Angkatan Udara (Sekkau) Tahun 1998, (4) Mendapatkan tanda jasa Satya Lencana 8 tahun, 16 tahun, 24 Tahun dan sampai saat ini berpangkat Kolonel.

Riwayat Pekerjaan: (1) Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad Suad) Jakarta tahun 1991 s.d. 1999, (2) Badan Pembekalan Mabes TNI (Babek TNI) tahun

1999 s.d. 2008, (3) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan tahun

2008 s.d. 2014, (4) Direktorat Perencanaan Pertahanan Kemhan Tahun 2014, dan (5) Universitas Pertahanan Tahun 2016 sampai sekarang.

Produk Buku yang telah di buat : (1) Evaluasi Implementasi Kebijakan Kinerja Analisis Madya Pada Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI; (2) kerjasama sipil militer; (3) Profesionalisme Kinerja Personel Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan dalam mendukung kesadaran Bela Negara



BUKU PANDUAN MENGAJAR

ISBN 978-602-74999-9-7

ISBN 978-602-74999-9-7



Manajemen Pertahanan